



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 74);
31. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 75);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

7.1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada koordinat 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 08°2' - 08°8' Lintang Selatan. Kota Blitar terletak pada jarak sekitar 160 km ke arah Barat Daya terhadap Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Kota Blitar terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Blitar merupakan batas langsung (border) dari Kota Blitar. Secara rinci, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sanan Kulon dan Nglepok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 32,59 km². Dengan luas ini, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Provinsi Jawa timur setelah Mojokerto. Kota Blitar terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Diantara ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km² (37,31%), kemudian Kecamatan Kepanjen Kidul 10,50 km² (32,22%), dan yang terkecil adalah Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar km² 9,93 (30,47%).

Berdasarkan wilayah administrasi, yaitu terdapat 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul, dan Sukorejo masing-masing terdiri dari 7 Kelurahan, adapun jumlah Kelurahan di Kota Blitar adalah 21 Kelurahan. Dari 21 Kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul dengan luas sekitar 2,68 km². Sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Karangsari dan Turi, yaitu dengan luas masing-masing sekitar 0,51 km² dan 0,52 km².

Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar mencakup urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pangan;
- h. lingkungan hidup;
- i. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. perhubungan;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. penanaman modal;
- n. kepemudaan dan olah raga;
- o. perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Blitar juga melaksanakan urusan pilihan yang mencakup:

- a. pariwisata;
- b. perdagangan.

Adapun penunjang urusan meliputi:

- a. pengawas;



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. perencanaan;
- c. keuangan;
- d. kepegawaian

Sedangkan yang merupakan pendukung adalah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

7.1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

7.1 PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
- 7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 7.4.1 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO
- 7.4.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
- 7.4.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 7.4.2.4 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 7.4.2.5 Kebijakan Akuntansi Aset
- 7.4.2.6 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 7.4.2.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 7.4.2.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
- 7.4.2.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- 7.4.2.10 Konsolidasi Laporan Keuangan

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan LRA
 - 7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 7.5.1.2.2 Belanja Modal
 - 7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
 - 7.5.1.2.4 Belanja Transfer
 - 7.5.1.3 Pembiayaan
 - 7.5.1.4 SiLPA/SiKPA
- 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.2.5 Lain-lain
- 7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset
 - 7.5.3.1.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.1.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan
 - 7.5.3.1.5 Aset Lainnya
 - 7.5.3.2 Kewajiban
 - 7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Ekuitas
- 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan – LO
 - 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
 - 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO
 - 7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO
 - 7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO
 - 7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO
 - 7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - 7.5.4.2 Beban
 - 7.5.4.2.1 Beban Pegawai
 - 7.5.4.2.2 Beban Persediaan
 - 7.5.4.2.3 Beban Jasa
 - 7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan
 - 7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas
 - 7.5.4.2.6 Beban Bunga
 - 7.5.4.2.7 Beban Subsidi
 - 7.5.4.2.8 Beban Hibah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial
- 7.5.4.2.10 Beban Penyusutan
- 7.5.4.2.11 Beban Amortisasi
- 7.5.4.2.12 Beban Transfer
- 7.5.4.2.13 Beban Penyisihan Piutang
- 7.5.4.2.14 Beban Lain-Lain
- 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
- 7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 7.5.4.5 Pos Luar Biasa
- 7.5.4.6 Surplus/Defisit – LO
- 7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 - 7.5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 7.5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Saldo Awal Ekuitas
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO
 - 7.5.6.3 Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - 7.5.6.4 Ekuitas Akhir
- 7.5.7 INFORMASI PENTING LAIN YANG DIPERLUKAN
 - 7.5.7.1 Dana Tugas Pembantuan (TP)
 - 7.5.7.2 Penerimaan Kas yang tidak Melalui RKUD
 - 7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah
 - 7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi
 - 7.5.7.5 Pelaksanaan Pendataan Barang Milik Daerah Tahun 2019 dan 2020
 - 7.5.7.6 Pandemi COVID-19
- 7.5.8 Penutup



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD**

7.2.1. EKONOMI MAKRO

Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB dan pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, indeks gini dan tingkat pengangguran terbuka, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang umumnya dalam waktu satu tahun. Manfaat PDRB antara lain :

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah diukur dengan harga berlaku saat itu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi, begitu juga sebaliknya. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk daerah.
- b. Distribusi PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- c. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- e. PDRB Atas Dasar Harga Konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan.
- f. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 1 Target dan Realisasi PDRB perkapita ADHB

(dalam juta rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2016	37.719,22	37.719,22
2017	40.494,22	41.445,46



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun	Target	Realisasi
2018	43.269,21	44.828,94
2019	46.044,20	47.044,20
2020	48.819,19	*)

*) : Data belum rilis

Tabel 2 PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha/Industri	2016	2017	2018	2019	2020
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	172.914,9	178.373,2	186.040,7	193.059,9	195.645,46
2 Pertambangan dan penggalian	335,8	341,8	361,7	368,1	349,41
3 Industri Pengolahan	502.362,5	552.608,4	607.975,8	659.375,4	654.040,16
4 Pengadaan Listrik dan Gas	3.297,9	3.915,4	4.274,5	4.586,1	4.482,58
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang	7.709,9	8.192,1	8.621,9	9.059,8	9.536,59
6 Konstruksi	414.679,8	452.641,9	484.943,1	512.114,6	481.486,38
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.271.622,4	1.379.424,1	1.535.545,4	1.675.162,2	1.579.931,93
8 Transportasi dan Pergudangan	222.264,7	247.375,3	273.406,3	298.819,0	283.348,74
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277.001,5	308.495,1	337.319,9	365.962,2	338.443,12
10 Informasi dan Komunikasi	556.924,4	607.745,0	648.784,1	703.269,3	760.949,90
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	589.209,9	640.867,6	688.195,9	717.424,4	719.777,55
12 Real Estate	196.689,2	211.459,2	233.172,7	252.182,7	262.054,10
13 Jasa Perusahaan	38.903,4	43.617,3	48.734,7	53.151,5	50.772,80
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	339.763,0	360.188,6	397.528,0	438.481,1	450.571,16
15 Jasa Pendidikan	374.821,8	399.640,3	428.107,1	461.589,8	487.435,37
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.881,0	110.234,8	118.797,8	129.137,4	143.488,40
17 Jasa Lainnya	261.904,7	277.244,1	300.521,6	318.502,2	285.831,29
PDRB	5.331.286,7	5.782.364,1	6.302.331,2	6.792.246,7	6.708.144,94

Sumber: BPS Kota Blitar, 2021



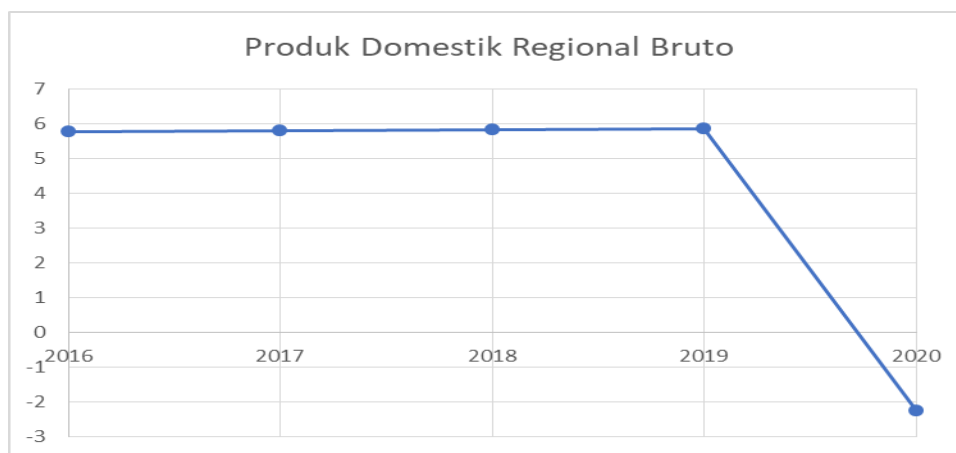
PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sektor perdagangan mendominasi dengan nilai Rp1.579.931,93. Semakin dominannya sektor perdagangan mencerminkan karakteristik sebagai sebuah wilayah perkotaan.

Karakteristik sebagai wilayah perkotaan juga semakin diperkuat dengan berkembangnya sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp760.949,90. Sektor ini menggeser sektor jasa keuangan dan asuransi sehingga menempati posisi ketiga dengan nilai sebesar Rp719.777,55. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kebutuhan komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan utama masyarakat di era 4.0. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan *work from home* dan sekolah online, membuat sektor komunikasi meningkat pesat, disaat lapangan usaha yang lain cenderung menurun..

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha



Sumber : BPS Kota Blitar, 2020

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB. Dari 5,76 pada tahun 2016, naik menjadi 5,78 pada tahun 2017, lalu menjadi 5,83 pada tahun 2018, dan naik tipis menjadi 5,84 pada tahun 2019. Adanya pandemi membuat laju pertumbuhan PDRB Kota Blitar merosot tajam menjadi -2,28. Kebijakan Pemerintah untuk *Stay at Home* untuk mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19 membuat sektor usaha menurun, sehingga berdampak pada turunnya konsumsi rumah tangga, yang menjadi penyebab utama turunnya PDRB ini, mengingat konsumsi rumah tangga adalah penopang terbesar PDRB.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

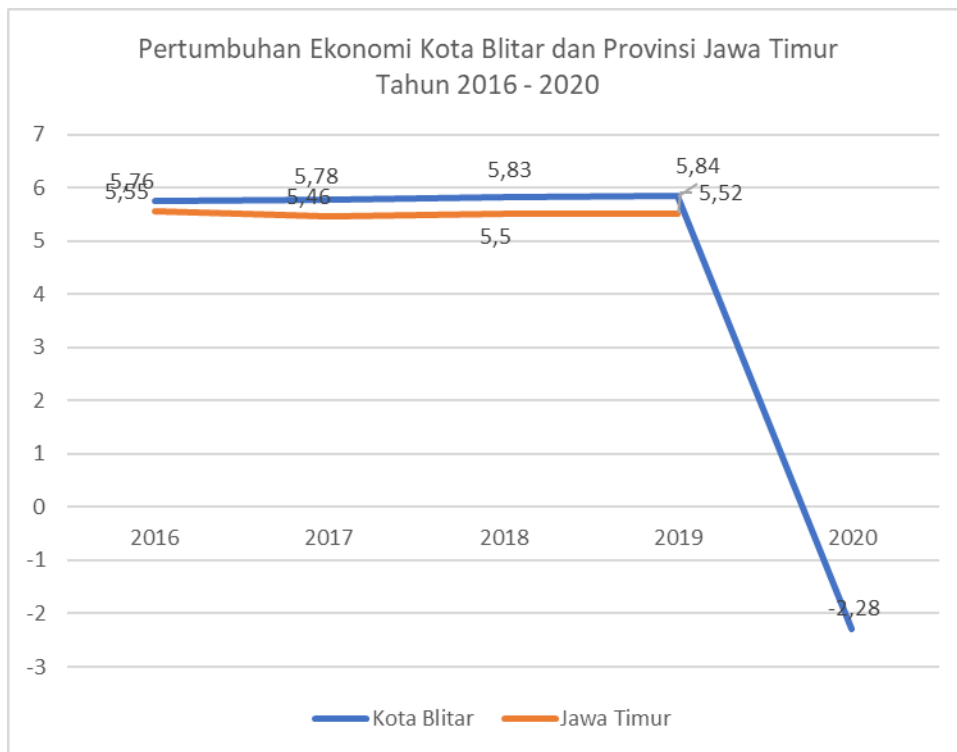
Tabel 3 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Target	Realisasi
2016	5,76	5,76
2017	5,81	5,78
2018	5,86	5,83
2019	5,90	5,84
2020	5,95	-2,28



PEMERINTAH KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Blitar dan BPS RI, 2021, diolah

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2020 turun sangat tajam menjadi -2,28, sedangkan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur 2020 belum rilis. Pertumbuhan ekonomi yang minus ini adalah efek dari Pandemi Covid-19 yang sangat memukul sektor ekonomi. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus, berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan harus melakukan efisiensi besar-besaran agar tetap dapat bertahan, bahkan banyak yang mengurangi skala usaha, memberhentikan karyawan karena pendapatan perusahaan tidak cukup untuk membayar gaji karyawan. Masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga akhirnya mengurangi tingkat konsumsinya, sehingga berakibat turunnya PDRB, mengingat PDRB sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga, selain dari belanja pemerintah.

3. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

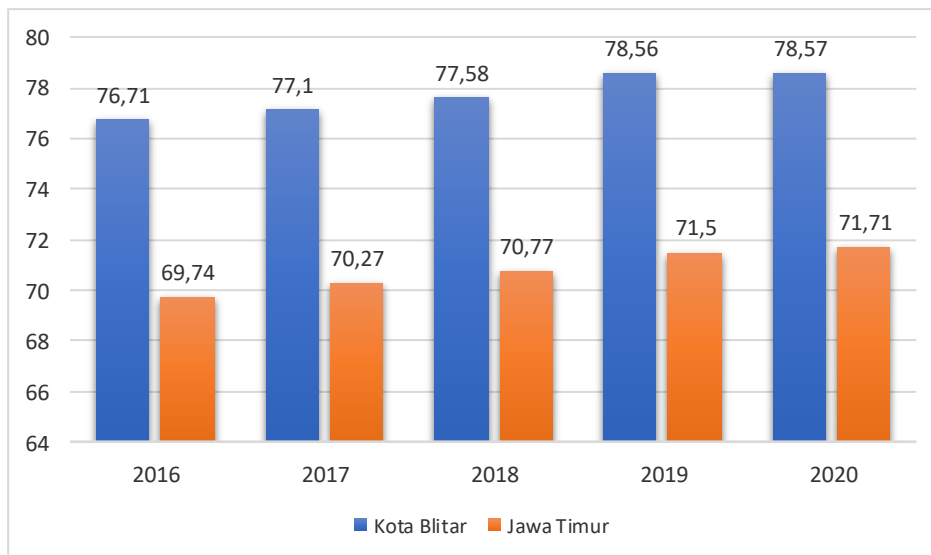
indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Tabel 4 Komponen IPM, IPM Kota Blitar, dan IPM Jawa Timur 2016 – 2020

Kompenen IPM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	73,09	73,17	73,36	73,60	73,75
Harapan Lama Sekolah	14	14,01	14,02	14,31	14,32
Rata-Rata Lama Sekolah	9,88	9,89	9,90	10,10	10,11
Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan (Rp.000)	12.499	12.910	13.391	13.851	13.733
IPM Kota Blitar	76,71	77,10	77,58	78,56	78,57
IPM Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71

Sumber : BPS Kota Blitar, 2020

Gambar 3
IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020



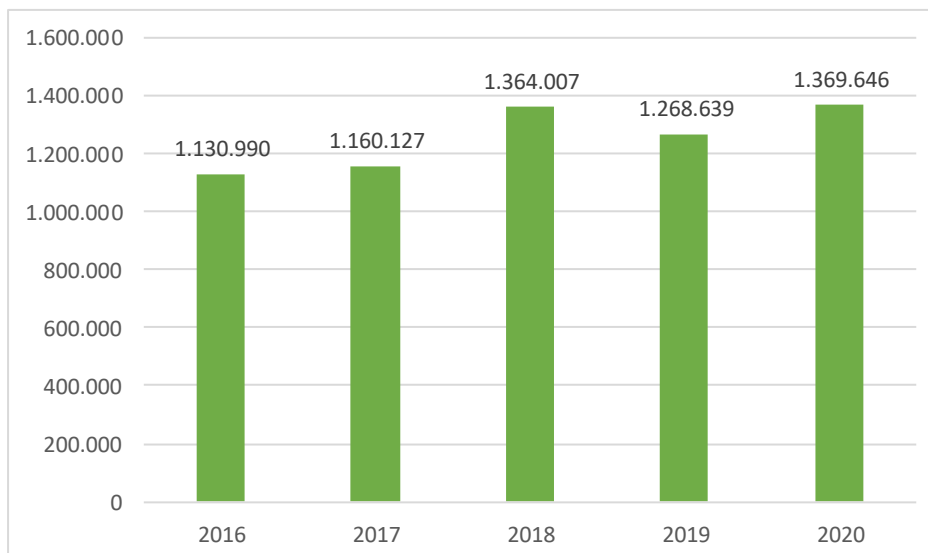
Secara Umum IPM Kota Blitar masuk dalam kategori tinggi. IPM Kota Blitar selalu diatas IPM Jawa Timur. Pada Tahun 2020 IPM Kota Blitar 78,57 dan IPM Propinsi Jawa Timur 71,71 Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar lebih baik dibandingkan rata-rata kesejahteraan Kabupaten/Kota lainnya di lingkup Propinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 4
Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun 2016 -2020



Standar hidup masyarakat Kota Blitar direpresentasikan dengan komponen pengeluaran perkapita yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tahun 2016 pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp1.130.990,00, naik tipis pada 2017 menjadi Rp1.160.127. Tahun 2018 melonjak tajam menjadi Rp1.364.007,00, namun turun pada 2019 menjadi Rp1.268.639,00 dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi Rp1.369.646,00.

4. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (BPS, 2020).

Tabel 5 Target dan Realisasi Angka Kemiskinan

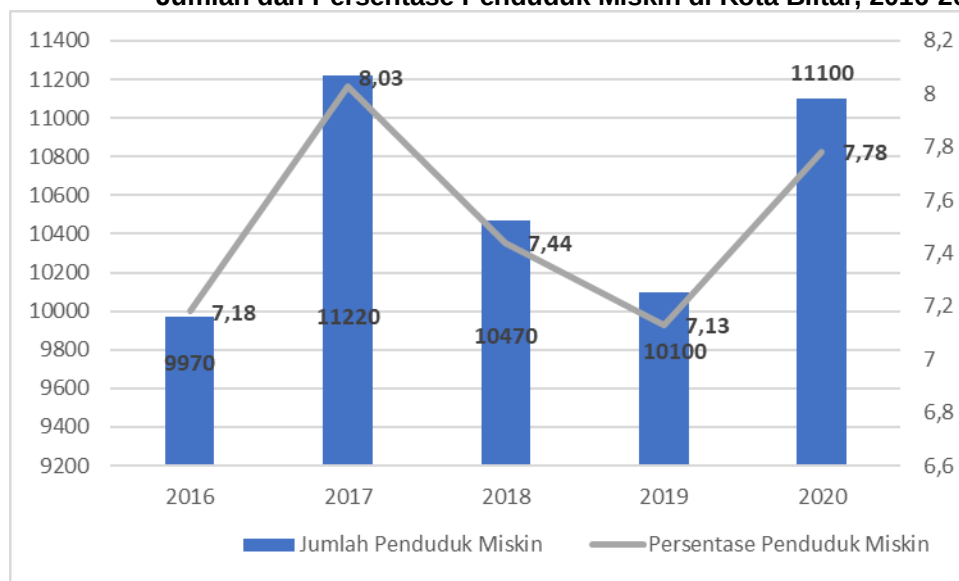
Tahun	Target	Realisasi
2016	6,72	7,18
2017	6,72	8,03
2018	6,61	7,44
2019	6,49	7,13



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun	Target	Realisasi
2020	6,39	7,78

Gambar 5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Blitar, 2016-2020



Sumber : BPS Kota Blitar, 2020

Gambar diatas memperlihatkan kemiskinan di Kota Blitar berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin 9.970 jiwa. Berikutnya pada 2017 naik cukup signifikan menjadi 11.220 jiwa, lalu turun pada tahun 2018 menjadi 10.470 jiwa dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 10.100 jiwa. Namun pada bulan Maret 2020 kemiskinan naik sebesar 0,65 poin persen atau sebanyak 1.000 jiwa menjadi 11.100 jiwa. Naiknya jumlah penduduk miskin ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan cukup signifikan, sehingga harus melakukan PHK agar tetap dapat bertahan.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Miskin dan Indikator Kemiskinan Kota Blitar
Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indikator Kemiskinan	
		Jumlah	Persentase	Kedalaman	Keparahan
2016	356.147	9.970	7,18	1,04	0,20
2017	383.021	11.220	8,03	0,93	0,24
2018	425.832	10.470	7,44	1,05	0,31
2019	456.778	10.100	7,13	1,14	0,23
2020	465.868	11.100	7,78	0,98	0,22

Sumber : BPS, 2020



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Tabel 7 Inflasi Bulanan Kota Kediri 2017 – 2019

Bulan	2017	2018	2019
Januari	0.94	0.14	0.15
Februari	0.70	0.26	-0.08
Maret	-0.13	0.10	0.16
April	0.38	0.14	0.36
Mei	0.50	0.17	0.05
Juni	0.44	0.43	0.08
Juli	-0.11	0.09	0.44
Agustus	-0.17	-0.10	-0.23
September	0.31	0.20	-0.27
Oktober	-0.12	0.16	0.32
Nopember	0.23	0.40	0.38
Desember	0.43	0.29	0.29

Sumber : BPS Kota Kediri, 2020

Data Inflasi Kota Blitar merujuk pada Inflasi Kota Kediri karena daerah penghitung Inflasi adalah daerah yang berada di bawah Bank Indonesia, sehingga Kota Blitar mengadopsi Kota Kediri untuk pendekatan Inflasinya dengan pertimbangan karakteristik antara kedua kota yang hampir sama. Inflasi bukan indikator dalam RPJMD Kota Blitar 2016-2021.

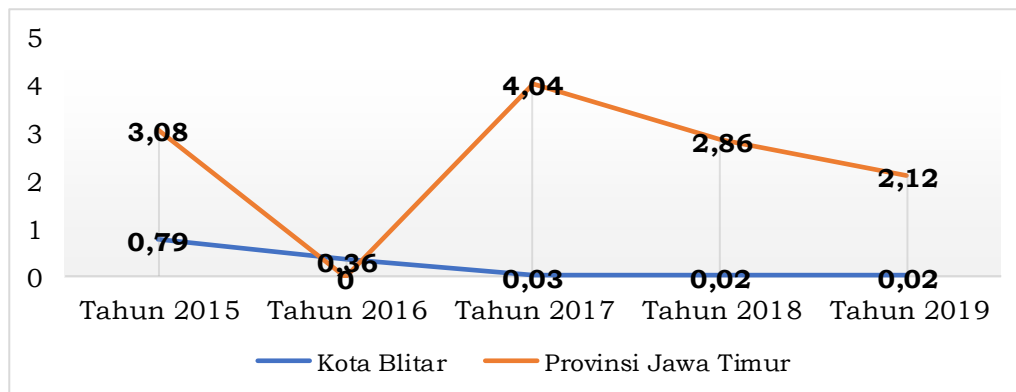


PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 6

Laju Inflasi Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



Sumber : 1) Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

2) Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun laju inflasi Kota Blitar cenderung menurun walaupun sangat tipis, dan dalam 2 tahun terakhir konstan di angka 0,02. Laju Inflasi Kota Blitar jauh dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Timur. Adapun data inflasi tahun 2020 baik Kota Blitar maupun Provinsi Jawa Timur belum rilis.

6. Indeks Gini

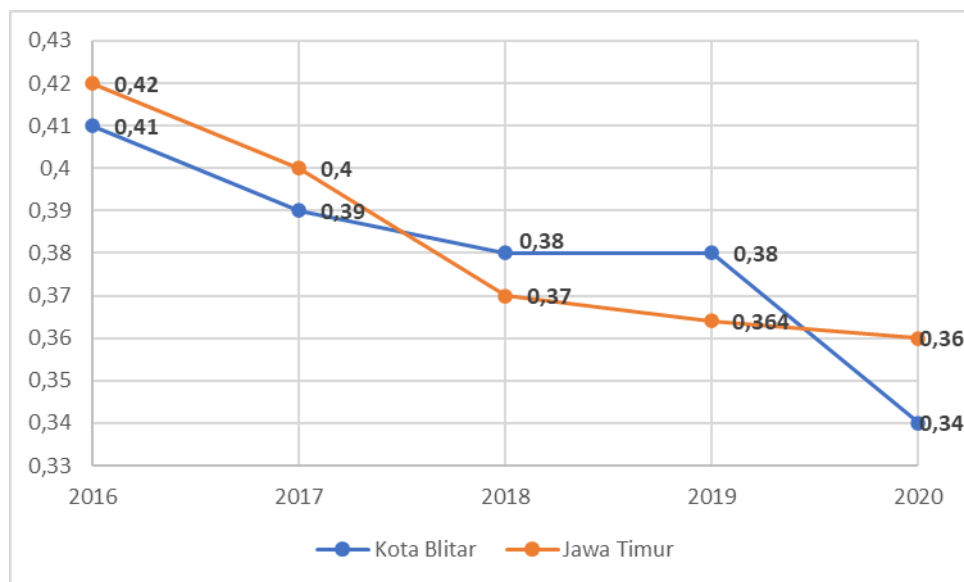
Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.



PEMERINTAH KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 7

Indeks Gini Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : 1) BPS Kota Blitar, 2020 diolah

2) BPS Provinsi Jawa Timur, 2020, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Gini Kota Blitar pada tahun 2016 0,41. Pada tahun 2017 berhasil turun 0,02 sehingga menjadi 0,39, dan stagnan di tahun 2018-2019 pada angka 0,38. Lalu pada tahun 2020 berhasil turun menjadi 0,34.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengertian pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

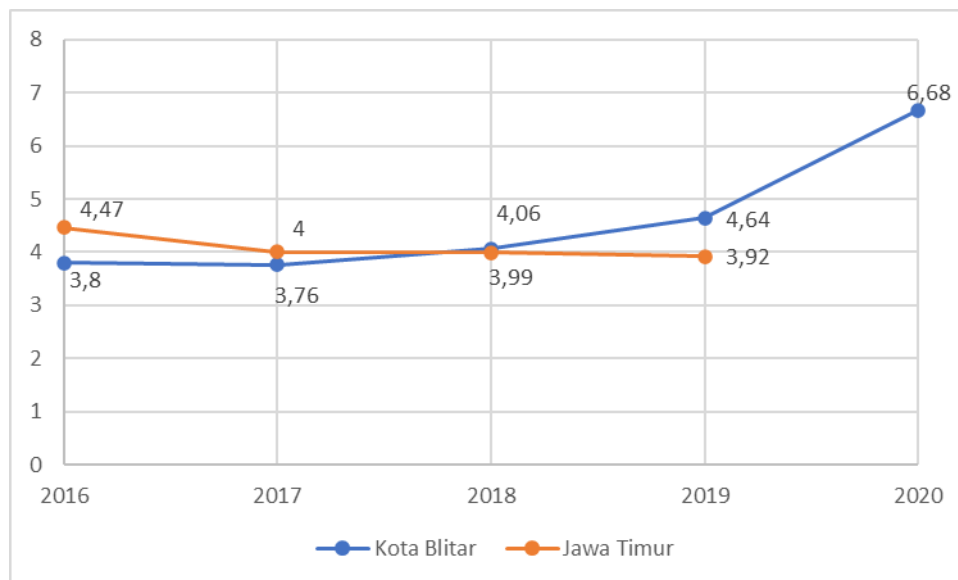
Tabel 8 Target dan Realisasi Angka Pengangguran Terbuka

Tahun	Target	Realisasi
2017	3,60	3,76
2018	3,60	4,06
2019	3,50	4,64
2020	3,5	6,68



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar
Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Kota Blitar dan BPS RI, 2020, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar pada tahun 2016 sebesar 3,8 berada di bawah Jawa Timur yaitu 4,47. Kemudian pada tahun 2017 bergerak turun menjadi 3,76. Pada tahun 2018 naik menjadi 4,06 sementara Jawa Timur berhasil turun menjadi 3,99. Tahun 2019 angka TPT Kota Blitar semakin naik menjadi 4,64, sementara Jawa Timur berhasil turun menjadi 3,92. Tahun 2020 melonjak cukup signifikan menjadi 6,68, sementara angka TPT Jawa Timur tahun 2020 belum rilis. Naiknya angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Anjuran pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, sampai pembatasan sosial berskala besar berdampak besar terhadap permintaan dan penawaran barang dan jasa. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi rumah tangga. Hal ini berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Pada semester I/2020 BPS menyatakan iklan lowongan pekerjaan menyusut 50% dibanding sebelum pandemi. Trend yang menunjukkan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka ini perlu diantisipasi dan dikendalikan melalui program kegiatan maupun kebijakan.

7.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

a. Umum

Tahun 2020 adalah tahun kelima dalam proses pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016–2021. Tahun ini merupakan tahap penguatan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kreatif sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada penguatan pengembangan kerjasama daerah & dunia usaha serta optimalisasi jalur informasi guna meningkatkan investasi, dengan tetap mengedepankan sektor perdagangan, industri (industri kecil) dan pariwisata sebagai penyangga utama pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud visi pembangunan Kota Blitar semakin sejahtera.

Uraian Kebijakan Umum APBD tahun 2020 secara garis besar meliputi kebijakan umum bidang pendapatan, kebijakan umum bidang belanja dan kebijakan umum bidang pembiayaan pada bagian dibawah ini.

b. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka diversifikasi, efisiensi, dan efektifitas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui berbagai upaya baik dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah maupun usaha-usaha lain yang sah. Melalui langkah intensifikasi yang dilakukan secara kreatif dan inovatif, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, dan sedapat mungkin mengurangi beban masyarakat.

Keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi terhadap pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan baru.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan.
- 4) Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan antar OPD penghasil PAD.

Dalam koridor strategi pengembangan perekonomian Kota Blitar, selama ini dikenal sebuah strategi yang dinamakan sebagai "Pendapatan Terbuka". Strategi ini merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui proses sinergitas kegiatan antar sektor sehingga menimbulkan sebuah proses *multiplier effect* secara terus menerus dan berlanjut yang pada ujungnya menghasilkan "pendapatan" berupa segala bentuk investasi baik yang berupa uang tunai maupun barang yang beredar dalam kegiatan perekonomian riil di tengah kehidupan masyarakat.

c. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka diversifikasi, efisiensi dan efektivitas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah harus selalu diupayakan secara sungguh-sungguh melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi secara proporsional, realistis dan obyektif. Dalam implementasinya, upaya ini tetap berpedoman dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pelayanan yang tidak memberatkan warga masyarakat. Kebijakan PAD dimaksud tetap diarahkan dengan titik berat pada:

- 1) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Penetapan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis punggutannya dan *less distortive* perekonomian;
- 5) Pelembagaan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran proses pengelolaan pendapatan daerah;
- 7) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 8) Peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
- 9) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

d. Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan penetapan prioritas alokasi anggaran melalui pendekatan *money follow program*. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi prioritas yang harus tercapai, terutama dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

e. Strategi Pengendalian Belanja Daerah Tahun 2020

Strategi pengendalian belanja daerah Kota Blitar tahun 2020 dititik beratkan kepada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang dan pendukung, dengan tetap melakukan sinkronisasi dengan program/kegiatan di RPJMD Kota Blitar.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat, dan social, serta fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (*performance budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil.
- 4) Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif, dan efisien antara lain meliputi :

- 1) Esensi utama penggunaan dan APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minial (SPM), terdiri dari: pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.
- 4) Pemenuhan *Universal health coverage* (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat Kota Blitar.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 5) Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur.
- 7) Penerapan usulan anggaran kegiatan dan sebaran belanja dengan perhitungan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB).

Kebijakan Belanja Daerah oleh Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dari sisi pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp880.888.048.545,75 dari anggaran Pendapatan sebesar Rp819.532.186.965,78. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp174.601.781.878,75 atau 129,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.002.799.612,78, dan dari Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp688.978.396.667,00 atau 103,36% dari anggaran sebesar Rp666.601.928.353,00. Sedangkan untuk Lain – lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp17.307.870.000,00 atau 96,54% dari target sebesar Rp17.927.459.000,00.
2. Sebaliknya Belanja terealisasi sebesar Rp868.055.395.687,07 atau 87,32% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp994.082.778.213,99. Realisasi belanja yang kurang dari anggaran sebesar 12,68% disebabkan karena kebutuhan riil SKPD dalam mengemban misi daerah untuk melayani masyarakat telah menggunakan pendekatan prioritas dan akuntabel serta dapat menekan belanja yang bukan prioritas daerah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dari uraian di atas dapat kami rinci untuk pendapatan pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% (Pelampauan/ dibawah anggaran)
1	PENDAPATAN	819.532.186.965,78	880.888.048.545,75	107,49
1.1	Pendapatan Asli Daerah	135.002.799.612,78	174.601.781.878,75	129,33
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.474.963.300,00	37.530.970.035,90	119,24
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.941.224.475,00	6.689.853.444,00	112,60
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.041.098.840,30	1.041.098.840,30	100,00
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.545.512.997,48	129.339.859.558,55	133,97
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	666.601.928.353,00	688.978.396.667,00	103,36
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	553.195.131.653,00	560.074.563.472,00	101,24
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	36.362.372.650,00	36.012.047.175,00	99,04
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	30.979.488.653,00	45.222.695.790,00	145,98
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	402.974.374.000,00	400.918.516.000,00	99,49
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	82.878.896.350,00	77.921.304.507,00	94,02
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	56.837.217.000,00	56.837.217.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	56.837.217.000,00	56.837.217.000,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	56.569.579.700,00	72.066.616.195,00	127,39
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.732.020.700,00	70.229.057.195,00	128,31
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.837.559.000,00	1.837.559.000,00	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.927.459.000,00	17.307.870.000,00	96,54
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.927.459.000,00	17.307.870.000,00	96,54
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	819.532.186.965,78	880.888.048.545,75	107,49



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sedangkan realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Pelampauan/ Dibawah Anggaran
2	BELANJA	994.082.778.213,99	868.055.395.687,07	87,32
2.1	BELANJA OPERASI	811.198.583.541,54	724.635.646.540,39	89,33
2.1.1	Belanja Pegawai	339.314.765.474,00	293.925.147.874,69	86,62
2.1.2	Belanja Barang	392.551.001.405,54	377.654.652.692,70	96,21
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	45.645.144.537,00	38.493.073.000,00	84,33
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.140.782.550,00	14.015.883.398,00	42,29
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	546.889.575,00	546.889.575,00	100,00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	127.242.906.213,45	114.808.593.714,45	90,23
2.2.1	Belanja Tanah	1.010.194.900,00	627.630.320,00	62,13
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	56.262.384.925,09	51.660.497.640,20	91,82
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	30.165.504.647,29	28.630.154.932,72	94,91
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	30.846.625.294,84	26.271.196.590,72	85,17
2.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	4.207.645.246,23	3.281.295.800,81	77,98
2.2.6	Belanja Aset lainnya	4.750.551.200,00	4.337.818.430,00	91,31
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.641.288.459,00	28.611.155.432,23	51,42
2.4	TRANSFER	0,00	0,00	0,00
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	994.082.778.213,99	868.055.395.687,07	87,32

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa optimalisasi kegiatan yang dibiayai APBD dalam mengimplementasikan otonomi daerah mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi menggunakan basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Biasanya, basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kota Blitar dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kota Blitar disusun dengan periode pelaporan yaitu tahunan, pada akhir tahun akan didapatkan Laporan LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan (implementasi) akuntansi pemerintahan adalah berbasis akrual. Kami yakin dalam pelaksanaan pasti masih ada kekurangan sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Guna mendapatkan prinsip konsistensi maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang berdampak pada adanya dampak kumulatif.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut:

7.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau diterima di OPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi, maka dana tidak ditransfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah perihal jumlah hak perolehan daerah. Dana transfer dalam penyampaianannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Blitar yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima dengan pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

b. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

c. Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi. Selain itu untuk pendapatan yang diterima oleh OPD/Unit Kerja tidak melalui RKUD diakui sebagai pendapatan sepanjang OPD/Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan atas penerimaan dana dimaksud dan atau timbulnya pengesahan pendapatan dan belanja.

Transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat secara bruto, antara lain adalah :

- a. Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kota Blitar) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b. Upah pungut yang dipotong oleh penyetor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut).
- c. Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

7.4.2.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar untuk pembayaran gaji pegawai dalam



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan realisasi klasifikasi yang diterapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah, apabila dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

7.4.2.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Blitar, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Blitar terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kota Blitar, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

7.4.2.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- a. Klasifikasi Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

- 1) Pungutan :

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas :

- a) Piutang Pajak Daerah yang timbul atas pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Dapat diketahui dari Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain tentang penetapan pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
 - b) Piutang Retribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada atau ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain tentang penetapan retribusi yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, dan sebagainya.

2) Perikatan yaitu piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, seperti:

- a) Pemberian pinjaman, merupakan piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.
- b) Penjualan, piutang yang timbul dapat dari pemindahtanganan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c) Kemitraan, piutang pemerintah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.
- d) Pemberian fasilitas/jasa, piutang timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Ketika hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

Pengakuan piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diterima; atau

- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Sedangkan pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman, dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan, diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Besaran tarif penyusutan piutang ditentukan dari penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11 Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d	> 3 s.d	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	R	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	R	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	R	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	R	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	R	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	R	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	R	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	R	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	R	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	R	Macet

Sedangkan penyisihan piutang sesuai tabel berikut :

Tabel 12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2020

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0 %
B	Kurang Lancar	10 %
C	Diragukan	50 %
D	Macet	100 %

7.4.2.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Blitar, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pendekatan dalam pengakuan beban persediaan, yaitu:

- a. Dalam pendekatan aset, beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, dengan maksud untuk persediaan-persediaan yang penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, dinas kesehatan dan puskesmas maupun di sekretariat OPD.
- b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan, dengan maksud persediaan-persediaan yang penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan OPD.

Persediaan, diukur dengan menggunakan yaitu :

- a. Metode Perpetual:

Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, utamanya untuk persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

termasuk didalamnya UPTD Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Dalam ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik :

Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD.

Persediaan dinilai dengan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO), atau barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dikeluarkan, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Selain itu dengan metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Untuk persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp500.000,00 atau aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai minimum kapitalisasi yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, tidak disajikan di neraca, namun tetap dicatat dalam daftar aset tetap ekstrakomptabel.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi Non Permanen di Pemerintah Kota Blitar adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Koperasi dan UM kepada kelompok masyarakat, usaha mikro dan koperasi di wilayah Kota Blitar. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan Investasi Non Permanen yang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kategori dari investasi non permanen, yaitu:

a. Lancar

Investasi Non Permanen dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo.

b. Dalam Perhatian Khusus

Investasi Non Permanen dikategorikan DPK apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 3 bulan.

c. Kurang Lancar

Investasi Non Permanen dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 bulan sampai dengan 4 bulan.

d. Diragukan

Investasi Non Permanen dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 4 bulan sampai dengan 6 bulan.

e. Macet

Investasi Non Permanen dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 bulan.

Adapun besarnya penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 13 Penyisihan Dana Bergulir

No	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	Lancar	0%
2	Dalam Perhatian Khusus	5%
3	Kurang Lancar	15%
4	Diragukan	40%
5	Macet	70%

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Blitar adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

a. PD. BPR Artha Praja

b. PDAM

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Blitar atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 5) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria manfaat ekonomi atas aset tetap dan nilai rupiah pengeluaran. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai perolehan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 14 Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	Tanah	Seluruhnya
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
01	Alat-alat Besar	20.000.000,00
02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000,00
03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	500.000,00
04	Alat-alat angkutan air bermotor	1.000.000,00
05	Alat-alat angkutan air tidak bermotor	500.000,00
06	Alat-alat angkutan udara	1.000.000,00
07	Alat-alat Bengkel	500.000,00
08	Alat-alat ukur	500.000,00
09	Alat-alat Pertanian	500.000,00
10	Alat-alat Peternakan	500.000,00
11	Alat-alat Perikanan	500.000,00
12	Alat Kantor	500.000,00
13	Meubelair	500.000,00
14	Alat pengukur waktu	500.000,00
15	Alat pembersih	500.000,00
16	Alat pendingin	500.000,00
17	Alat Dapur	500.000,00
18	Alat Rumah Tangga	500.000,00
19	Komputer	500.000,00
20	Alat Studio	500.000,00
21	Alat-alat Komunikasi	500.000,00
22	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
23	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
24	Alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
01	Bangunan Gedung tempat kerja	Seluruhnya
02	Bangunan Gedung tempat tinggal	Seluruhnya
03	Bangunan Menara	Seluruhnya
04	Bangunan Lainnya	Seluruhnya
05	Bangunan Bersejarah	Seluruhnya
06	Bangunan Tugu Peringatan	Seluruhnya



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	07 Bangunan Candi	Seluruhnya
	08 Rambu-rambu	500.000,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri atas:	
	01 Jalan	Seluruhnya
	02 Jembatan	Seluruhnya
	03 Bangunan Air	Seluruhnya
	04 Instalasi	Seluruhnya
	05 Jaringan	Seluruhnya
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
	01 Buku	Seluruhnya
	02 Terbitan	Seluruhnya
	03 Barang-Barang Perpustakaan	Seluruhnya
	04 Barang Bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga	Seluruhnya
	05 Alat olahraga lainnya	200.000,00
	06 Hewan/Ternak dan Tumbuhan (ikan, hewan, tanaman)	500.000,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 15 Kapitalisasi Pengeluaran Belanja yang Menambah Nilai Aset

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.3.1	Tanah	Seluruhnya
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
	01 Alat-alat Besar	10.000.000,00
	02 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000,00
	03 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	500.000,00
	04 Alat-alat angkutan air bermotor	1.000.000,00
	05 Alat-alat angkutan air tidak bermotor	500.000,00
	06 Alat-alat angkutan udara	1.000.000,00
	07 Alat-alat Bengkel	500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
08	Alat-alat ukur	500.000,00
09	Alat-alat Pertanian	500.000,00
10	Alat-alat Peternakan	500.000,00
11	Alat-alat Perikanan	500.000,00
12	Alat Kantor	500.000,00
13	Meubelair	500.000,00
14	Alat pengukur waktu	500.000,00
15	Alat pembersih	500.000,00
16	Alat pendingin	500.000,00
17	Alat Dapur	500.000,00
18	Alat Rumah Tangga	500.000,00
19	Komputer	500.000,00
20	Alat Studio	500.000,00
21	Alat-alat Komunikasi	500.000,00
22	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
23	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
24	Alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
01	Bangunan Gedung tempat kerja	12.500.000,00
02	Bangunan Gedung tempat tinggal	12.500.000,00
03	Bangunan Menara	12.500.000,00
04	Bangunan Lainnya	12.500.000,00
05	Bangunan Bersejarah	12.500.000,00
06	Bangunan Tugu Peringatan	12.500.000,00
07	Bangunan Candi	12.500.000,00
08	Rambu-rambu	12.500.000,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri atas:	
01	Jalan	12.500.000,00
02	Jembatan	12.500.000,00
03	Bangunan Air	12.500.000,00
04	Instalasi	12.500.000,00
05	Jaringan	12.500.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
01	Buku	Tidak dikapitalisasi
02	Terbitan	Tidak dikapitalisasi
03	Barang-Barang Perpustakaan	Tidak dikapitalisasi
04	Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian/alat olahraga	Tidak dikapitalisasi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
	05 Alat olahraga lainnya	Tidak dikapitalisasi
	06 Hewan/Ternak dan Tumbuhan	Tidak dikapitalisasi
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau masih dalam proses pengerjaan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, namun apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

7.4.2.6. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, dan pembentukannya didasarkan pada perencanaan yang matang. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Dana cadangan diakui pada saat SP2D LS Pembentukan dana cadangan. Sedangkan pengukurannya sesuai nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Hasil dari yang diperoleh dari dana cadangan diukur sebesar nominal yang diterima.

7.4.2.7. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Pemanfaatan Aset Tetap daerah



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun Guna Serah (BGS);
- b. Bangun Serah Guna (BSG);
- b. Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan diluar entitas. Adapun jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak paten dan hak cipta, hasil kajian, pengembangan dan *heritage* ATB (ATB yang memiliki nilai sejarah/budaya, film/seni).

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Blitar karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lainnya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya berupa pendapatan atau penghematan belanja yang dapat diukur dengan andal telah diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset lainnya dalam pengerjaan jika jangka waktu perolehannya melebihi satu tahun anggaran atau melewati tanggal pelaporan. Sebagai *intangible asset work in progress*.

Aset lainnya diukur dan dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM setelah dikurangi dengan setoran, harga perolehan. Khusus untuk ATB utamanya *software* dan hasil kajian/penelitian/pengembangan memiliki masa manfaat 5 tahun dan dilakukan amortasi secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

7.4.2.8. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Blitar.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan selain itu kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota Blitar menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Blitar pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemerintah Kota Blitar yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Blitar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kota Blitar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang Perhitungan Fihak Ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam rangka implementasi Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya disajikan pada laporan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan

Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.4.2.10. Konsolidasi Laporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Blitar sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan (Dalam hal ini BPKAD selaku PPKD).

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Blitar sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD/OPD dan PPKD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K SKPD dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Blitar merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban memberikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan mencakup seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) yang terdiri dari 28 OPD dan 39 Unit Kerja.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

7.5.1.1 PENDAPATAN LRA

Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp880.876.905.111,23 atau 107,49% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan sebesar Rp819.532.186.965,78. Realisasi Pendapatan Tahun 2020 turun 6,36% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp940.722.867.100,39. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp174.590.638.444,23 atau 129,32 % dari anggaran sebesar Rp135.002.799.612,78. Realisasi PAD Tahun 2020 naik sebesar 5,09% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2019 sebesar Rp166.140.178.781,39. Adapun rincian penerimaan PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1.	Pajak Daerah	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		31.474.963.300,00	37.530.670.035,90	44.650.054.610,03

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp37.530.670.035,90 atau 119,24 % dari anggaran sebesar Rp31.474.963.300,00 yang turun 15,94% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp44.650.054.610,03. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pajak Hotel	BPKAD	485.000.000,00	658.258.000,00	135,72	1.082.717.025,00	(424.459.025,00)	(39,20)
2	Pajak Restoran	BPKAD	3.006.900.000,00	3.429.992.394,00	114,07	4.544.325.347,60	(1.114.332.953,60)	(24,52)
3	Pajak Hiburan	BPKAD	542.500.000,00	525.239.018,00	96,82	2.119.693.250,00	(1.594.454.232,00)	(75,22)
4	Pajak reklame	BPKAD	300.000.000,00	432.680.237,90	144,23	614.505.667,43	(181.825.429,53)	(29,59)
5	Pajak Penerangan Jalan	BPKAD	10.200.000.000,00	10.579.994.562,00	103,73	10.311.381.864,00	268.612.698,00	2,61
6	Pajak Parkir	BPKAD	110.000.000,00	131.922.731,00	119,93	335.986.763,00	(204.064.032,00)	(60,74)



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Pajak	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
7	Pajak Air Tanah	BPKAD	30.563.300,00	49.590.598,00	162,26	63.321.286,00	(13.730.688,00)	(21,68)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BPKAD	9.300.000.000,00	12.260.347.020,00	131,83	12.061.691.607,00	198.655.413,00	1,65
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPKAD	7.500.000.000,00	9.462.645.475,00	126,17	13.516.431.800,00	(4.053.786.325,00)	(29,99)
Jumlah			31.474.963.300,00	37.530.670.035,90	119,24	44.650.054.610,03	(7.119.384.574,13)	(15,94)

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah di Kota Blitar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar. Kebijakan Umum Pajak Daerah Kota Blitar mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
5. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan atas Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan *Official Assesment* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah. *Official Assesment* diterapkan pada pada Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.

Pada Tahun 2020 terdapat penurunan realisasi dari tahun lalu sebesar 15,94% dikarenakan efek dari pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyaknya



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kota Blitar adalah menerbitkan Surat Edaran Nomor 973/1527/410.206.1/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Wajib Pajak tertentu yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir diberikan Insentif Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan yang tidak memungut pajak kepada konsumennya diberikan insentif berupa pembebasan selama 3 (tiga) bulan masa pajak yaitu bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020.
- b. Kepada Wajib Pajak Parkir di tempat hiburan dan lingkungan sekitar sekolah diberikan insentif berupa pembebasan selama 3 (tiga) bulan masa pajak yaitu bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2020.
- c. Kepada Wajib Pajak yang memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan diberikan insentif berupa penundaan pembayaran untuk masa pajak bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020 sampai dengan paling lambat 31 Oktober 2020.
- d. Pada Masa Pajak bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir tetap berkewajiban menyampaikan SPTPD kepada BPKAD Kota Blitar.

		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.	Retribusi Daerah	5.941.224.475,00	6.681.655.444,00	10.138.463.905,50

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp6.681.655.444,00 atau 112,46% dari anggaran sebesar Rp5.941.224.475,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 turun 34,10% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp10.138.463.905,50. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
A.	Retribusi Jasa Umum							
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	640.814.636,00	523.368.004,00	81,67	1.254.259.472,00	(730.891.468,00)	(58,27)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	170.000.000,00	209.898.000,00	123,47	274.487.000,00	(64.589.000,00)	(23,53)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan	1.131.050.000,00	1.280.344.000,00	113,2	1.791.873.000,00	(511.529.000,00)	(28,55)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	755.000.000,00	848.697.000,00	112,41	1.035.003.000,00	(186.306.000,00)	(18,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	397.500.000,00	442.244.400,00	111,26	527.227.901,00	(84.983.501,00)	(16,12)
6	Retribusi Penyediaan/Penyediaan edotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00	18.480.000,00	123,2	23.400.000,00	(4.920.000,00)	(21,03)
7	Retribusi Pengolahan limbah cair	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.170.000,00	103,4	10.900.000,00	(5.730.000,00)	(52,57)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	20.172.700,00	201,73	17.719.200,00	2.453.500,00	13,85
9	Sewa Alat-alat Berat/Walls	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.360.000,00	6.400.000,00	61,78	24.650.000,00	(18.250.000,00)	(74,04)
10	Pelayanan Pemeriksaan Lab kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	99.750.000,00	151.680.000,00	152,06	150.470.000,00	1.210.000,00	0,80
Jumlah A			3.234.474.636,00	3.506.454.104,00	108,41	5.109.989.573,00	(1.603.535.469,00)	(31,38)
B.	Retribusi Jasa Usaha							
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	OPD Penghasil	973.072.339,00	1.193.370.640,00	122,64	1.649.085.232,50	(455.714.592,50)	(27,63)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	115.200.000,00	157.700.000,00	136,89	140.550.000,00	17.150.000,00	12,20
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	115.200.000,00	115.716.500,00	100,5	117.722.000,00	(2.005.500,00)	(1,70)
4	Retribusi Tempat khusus parkir	OPD Penghasil	405.150.000,00	457.825.000,00	113	676.309.000,00	(218.484.000,00)	(32,31)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	250.000.000,00	325.139.000,00	130,06	315.877.000,00	9.262.000,00	2,93
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	87.900.000,00	92.250.000,00	104,95	176.315.000,00	(84.065.000,00)	(47,68)
7	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	45.000.000,00	46.053.000,00	102,34	60.591.000,00	(14.538.000,00)	(23,99)
8	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	300.000.000,00	372.360.000,00	124,12	1.048.140.000,00	(675.780.000,00)	(64,47)
Jumlah B			2.291.464.839,00	2.760.414.140,00	120,47	4.184.589.232,50	(1.424.175.092,50)	(34,03)
C.	Retribusi Perijinan Tertentu							
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	414.420.000,00	414.354.200,00	99,98	842.492.100,00	(428.137.900,00)	(50,82)
2	Retribusi Ijin Trayek	Dinas Perhubungan	865.000,00	433.000,00	50,06	1.393.000,00	(960.000,00)	(68,92)
Jumlah C			415.285.000,00	414.787.200,00	99,88	843.885.100,00	(429.097.900,00)	(50,85)
Jumlah keseluruhan (A+B+C)			5.941.224.475,00	6.681.655.444,00	112,46	10.138.463.905,50	(3.456.808.461,50)	(34,10)

Pengelolaan Retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Ijin Trayek menjadi retribusi dengan realisasi terendah yaitu sebesar 50,06%. Terdapat penurunan realisasi sebesar 34,10% dari tahun lalu , disebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehubungan pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Blitar juga memberikan pembebasan atau keringanan dalam pembayaran Retribusi Daerah sebagai upaya mendukung Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi wabah Covid-19, yaitu:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Tagihan atas Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 di Kota Blitar;
2. Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 118/125.a/410.115/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pembebasan Pembayaran Retribusi.

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
3.		1.041.098.840,30	1.041.098.840,30	1.169.069.219,24

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pos penerimaan untuk menampung pendapatan dari Hasil Investasi berupa deviden tunai. Penyertaan Modal ini sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Blitar memiliki Penyertaan Modal kepada PDAM, PD BPR Artha Praja dan PT Bank Jatim.

Atas penyertaan modal ini PD BPR Artha Praja berkewajiban menyetorkan 50% dari Laba bersih setelah dipotong Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. Penerimaan *cash dividen*/bagian laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja Tahun 2019 yang dibayarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp222.321.391,50 yang dibayarkan Tanggal 8 April 2020.

Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menghasilkan deviden. Penerimaan *cash dividen*/bagian laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim Tahun Buku 2019 yang dibayarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp818.777.448,80. Deviden tersebut telah ditransfer pada Tanggal 20 Mei 2020. Sedangkan Penyertaan Modal terhadap PDAM belum menghasilkan deviden mengingat kondisi keuangan yang terus merugi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar 1.041.098.840,30 atau 100% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 turun 10,95% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 sebesar Rp1.169.069.219,24. Penurunan ini disebabkan turunnya



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penerimaan bagian laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja dari Rp394.288.318,00 pada tahun 2019 menjadi Rp222.321.391,50 pada tahun 2020.

	Lain-lain	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	PAD	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.	PAD yang Sah	96.545.512.997,48	129.337.214.124,03	110.182.591.046,62

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp129.337.214.124,03 atau 133,97% dari anggaran sebesar Rp96.545.512.997,48. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 naik 17,38% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 sebesar 110.182.591.046,62. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

N o.	Uraian	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
A	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan							
1	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	DLH	0,00	73.230.000,00	0,00	0,00	58.390.000,00	0,00
2	Penjualan hasil penebangan pohon	DLH	11.130.000,00	11.200.000,00	100,63	14.840.000,00	(3.640.000,00)	(24,53)
3	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	BPKAD	0,00	0,00	0,00	132.550.999,00	(132.550.999,00)	(100,00)
4	Penjualan hasil pertanian	DKPP	6.000.000,00	3.480.000,00	58,00	8.047.700,00	(4.567.700,00)	(56,76)
5	Penjualan Hasil Peternakan	DKPP	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
6	Penjualan hasil perikanan	DKPP	24.900.000,00	25.590.000,00	102,77	25.423.500,00	166.500,00	0,65
Jumlah A			42.030.000,00	119.700.000,00	284,80	180.862.199,00	(61.162.199,00)	(33,82)
B	Jasa Giro (B)							
1	Jasa Giro Kas Daerah	BPKAD	896.629.024,00	1.925.315.399,53	214,73	3.475.131.030,07	(1.549.815.630,54)	(44,60)
2	Jasa Giro BOS	SD/SM P	0,00	0,00	0,00	3.138.646,35	(3.138.646,35)	(100,00)
Jumlah B			896.629.024,00	1.925.315.399,53	214,73	3.478.269.676,42	(1.552.954.276,89)	(44,65)
C	Bunga Deposito							
1	Bank Jatim	BPKAD	295.380.547,48	1.277.517.123,08	432,50	464.828.767,03	812.688.356,05	174,84
2	Bank BNI 46	BPKAD	100.000.000,00	528.836.306,00	528,84	399.467.120,00	129.369.186,00	32,39
3	Bank Mandiri	BPKAD	88.360.000,00	443.664.361,00	502,11	282.962.592,36	160.701.768,64	56,79
4	Bank BRI	BPKAD	0,00	584.817.791,00	0,00	352.603.056,00	232.214.735,00	65,86
5	Bank BTN	BPKAD	0,00	457.458.904,11	0,00	130.869.863,01	326.589.041,10	249,55
Jumlah C			483.740.547,48	3.292.294.485,19	680,59	1.630.731.398,40	1.661.563.086,79	101,89



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

N o.	Uraian	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
D	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai tukar Rupiah							
1	Lain – lain/(Pembulatan Gaji)	BPKAD	0,00	17.847,00	0,00	122.610,00	(104.763,00)	(85,44)
Jumlah D			0,00	17.847,00	0,00	122.610,00	(104.763,00)	(85,44)
E	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan							
1	Bidang Pendidikan	BPKAD	0,00	1.391.068,00	0,00	9.534.450,00	(8.143.382,00)	(85,41)
2	Bidang Kesehatan	BPKAD	0,00		0,00	84.403.657,71	(84.403.657,71)	(100,00)
3	Bidang Pekerjaan Umum	BPKAD	0,00	4.111.777,00	0,00	338.390.892,11	(334.279.115,11)	(98,78)
4	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian	BPKAD	0,00	9.031.700,00	0,00	0,00	9.031.700,00	0,00
5	Bidang Komunikasi dan Informatika	BPKAD	0,00	351.186.024,00	0,00	0,00	351.186.024,00	0,00
6	Bidang Lingkungan Hidup	BPKAD	0,00		0,00	5.819.924,64	(5.819.924,64)	(100,00)
7	Bidang Pariwisata	BPKAD	0,00	2.510.950,00	0,00	8.371.153,29	(5.860.203,29)	(70,00)
8	Bidang Pengawasan	BPKAD	0,00	4.536.000,00	0,00	0,00	4.536.000,00	0,00
Jumlah E			0,00	372.767.519,00	0,00	446.520.077,75	(73.752.558,75)	(16,52)
F	Pendapatan denda Pajak (F)							
1	PBB P2	BPKAD	0,00	45.405.243,76	0,00	28.698.031,00	16.707.212,76	58,22
Jumlah F			0,00	45.405.243,76	0,00	28.698.031,00	16.707.212,76	58,22
G	Pendapatan Denda Retribusi (G)							
1	Jasa Umum	Disparbud	88.713.000,00	72.531.500,00	81,76	109.700.000,00	(37.168.500,00)	(33,88)
2	Jasa Usaha	Disparbud	0,00	432.000,00	0,00	1.690.500,00	(1.258.500,00)	(74,45)
Jumlah G			88.713.000,00	72.963.500,00	82,25	111.390.500,00	(38.427.000,00)	(34,50)
H	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan							
1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	BPKAD	0,00	75.380.500,00	0,00	8.824.223,94	66.556.276,06	754,25
2	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	DPM PTSP	0,00	6.579.314,35	0,00	9.577.223,71	(2.997.909,36)	(31,30)
Jumlah H			0,00	81.959.814,35	0,00	18.401.447,65	63.558.366,70	345,40



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

N o.	Uraian	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
I	Pendapatan dari Pengembalian							
1	Pendapatan dari Pengembalian dari Kelebihan Belanja	BPKAD	0,00	1.756.015.496,68	0,00	1.030.626.208,50	725.389.288,18	70,38
Jumlah I			0,00	1.756.015.496,68	0,00	1.030.626.208,50	725.389.288,18	70,38
J	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum							
1	Fasilitas Sosial	Dispera	61.700.000,00	109.650.992,00	177,72	118.053.298,00	(8.402.306,00)	(7,12)
2	Fasilitas Umum	Dispera BPKA dan 3 Kecamatan	1.092.364.455,00	1.496.671.120,00	137,01	1.335.704.429,00	160.966.691,00	12,05
Jumlah J			1.154.064.455,00	1.606.322.112,00	139,19	1.453.757.727,00	152.564.385,00	10,49
K	Pendapatan dari BLUD		87.500.001.010,00	113.435.366.040,16	129,64	95.869.457.204,43	17.565.908.835,73	18,32
L	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir							
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi	Dinkop	25.340.661,00	3.390.834,46	13,38	9.928.209,47	(6.537.375,01)	(65,85)
2	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46	BPKAD	0,00	7.773.847,00	0,00	0,00	7.773.847,00	0,00
Jumlah L			25.340.661,00	11.164.681,46	44,06	9.928.209,47	1.236.471,99	12,45
M	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP							
1	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Kep. Kidul		1.947.484.800,00	1.984.641.300,00	101,91	1.637.209.200,00	347.432.100,00	21,22
2	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Sukorejo		1.849.392.000,00	1.900.054.800,00	102,74	1.628.120.400,00	271.934.400,00	16,70
3	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Sananwetan		2.138.400.000,00	2.261.812.500,00	105,77	2.090.498.700,00	171.313.800,00	8,19
Jumlah M			5.935.276.800,00	6.146.508.600,00	103,56	5.355.828.300,00	790.680.300,00	14,76
N	Pendapatan denda keterlambatan dan atau tidak adanya laporan bulanan PPAT/PPATS		0,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
O	BPJS Non Kapitasi		419.717.500,00	462.751.137,00	110,25	563.241.100,00	(100.489.963,00)	(17,84)
P	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA		0,00	8.500.489,70	0,00	267.200,00	8.233.289,70	3.081,32
Q	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak							
1	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	10.000,00	0,00	50.900,00	(40.900,00)	(80,35)
2	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah		0,00	88.000,00	0,00	3.899.000,00	(3.811.000,00)	(97,74)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

N o.	Uraian	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang Sah		0,00	63.758,20	0,00	289.257,00	(225.498,80)	(77,96)
Jumlah Q			0,00	161.758,20	0,00	4.239.157,00	(4.077.398,80)	(96,18)
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah (A s/d Q)			96.545.512.997,48	129.337.214.124,03	133,97	110.182.591.046,62	19.154.623.077,41	17,38

Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang terdiri dari :

- A. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terdiri dari penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan bekas bangunan, penjualan hasil pertanian, dan penjualan hasil perikanan.
- B. Realisasi Jasa Giro melebihi target yaitu sebesar 214,73% disebabkan banyaknya saldo UP/GU/TU Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum terpakai sebagai akibat transaksi non tunai, dan adanya rekening penampungan pendapatan yang disetor setiap akhir bulan ke RKUD, sehingga dana yang mengendap di Giro Kas Daerah juga meningkat.
- C. Realisasi Pendapatan Bunga Deposito sebesar 680,59% karena terdapat penambahan deposito pada Bank BRI senilai Rp584.817.791 dan pada Bank BTN senilai Rp457.458.904,11.
- D. Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah adalah pembulatan atas gaji.
- E. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp372.767.519,00 dengan rincian :
 1. Bidang Pendidikan sebesar 1.391.068,00 merupakan denda atas Denda keterlambatan pengiriman pengadaan perlengkapan UKS CV RAMA GEMILANG no kontrak 027/1779/410.110.1/2020 tanggal 11 November 2020 pada Dinas Pendidikan dan Denda keterlambatan pengiriman pengadaan sepatu siswa CV HAYU PERKASA no kontrak 027/1051/PPK-4/410.110.3/2020 tanggal 22 Oktober 2020 pada Dinas Pendidikan.
 2. Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp4.111.777,00 merupakan denda atas pekerjaan Denda keterlambatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di jalan mahakam lanjutan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan (DAK) CV SAPTA SARANA, dan Denda keterlambatan pekerjaan pengawasan pemeliharaan berkala jalan di Jl.Mahakam Lanjutan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) CV CREATIVE DESIGN STUDIO.
 3. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian sebesar Rp9.031.700,00 merupakan denda atas :
 - a. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Konstruksi Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp583.500,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Pengawasan Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp56.900,00.
- c. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Konstruksi Perbaikan/Pembangunan Paving Kelurahan Karangsari- Selatan Masjid Karangsari ke Selatan Jl.Belimbing RT 02 RW 05) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.705.100,00.
- d. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Konstruksi Perbaikan/Pembangunan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Rambutan Gg. VI RT 03 RW 04) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.708.800,00.
- e. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Konstruksi Perbaikan/Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Jeruk RT 03 RW 05) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.395.500,00.
- f. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Konstruksi Perbaikan/Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Kueni RT 01 RW 02) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.395.500,00.
- g. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Konstruksi Perbaikan/Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Mangga Gg V) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.705.800,00
- h. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Pengawasan Perbaikan/Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Mangga Gg V) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp104.200,00.
- i. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Pengawasan Perbaikan/Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Kueni RT 01 RW 02) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp85.400,00.
- j. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Pengawasan Perbaikan/Pembangunan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Rambutan Gg. VI RT 03 RW 04) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp104.400,00
- k. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Pengawasan Perbaikan/Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Jeruk RT 03 RW 05) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp85.300,00.
- l. Denda kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Pengawasan Perbaikan/Pembangunan Paving Kelurahan Karangsari Jl. Rambutan Gg. VI RT 03 RW 04) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp104.300,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-
4. Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp351.186.024,00 merupakan denda atas Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan FO tahun 2019 pada Dinas Komunikasi , Informatika, dan Statistik Kota Blitar.
 5. Bidang Pariwisata sebesar Rp2.510.950,00 merupakan denda atas Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana agrowisata belimbing karangsari, waterpark Sumberudel, dan Istana Gebang (Pembangunan Gazebo. Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki dan Menara Pandang) DAK Fisik Pariwisata Tahun 2020.
 6. Bidang Pengawasan sebesar Rp4.536.000,00 merupakan denda atas Denda keterlambatan pengadaan kendaraan dinas roda empat.
- F. Pendapatan Denda Pajak merupakan pendapatan dari pajak yang terlambat dibayarkan.
- G. Pendapatan Denda Retribusi merupakan pendapatan denda dari retribusi yang terlambat dibayar.
- H. Pendapatan dari Pengembalian dari Kelebihan Belanja sebesar Rp1.756.015.496,68 merupakan setoran kembali ke Kas Daerah atas kelebihan belanja dan temuan pemeriksaan.
- I. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan yang mengalami wan prestasi, dan atas pembongkaran reklame.
- J. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum
Pendapatan Fasilitas Sosial berasal dari pembayaran Tagihan Listrik dan Air Rusunawa.
Pendapatan Fasilitas Umum merupakan Sewa Tanah Pertanian eks Bengkok.
- K. Pendapatan dari BLUD merupakan pendapatan RSUD Mardi Waluyo.
- L. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan bunga atas dana bergulir.
- M. Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- N. Pendapatan Denda Keterlambatan dan atau tidak adanya Laporan Bulanan PPAT/PPATS merupakan denda bagi PPAT/PPATS yang terlambat atau tidak melaporkan realisasi akta.
- O. BPJS Non Kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- P. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan setoran tunai bendahara BOSNAS ke rekening BOSNAS.
- Q. Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak adalah pos untuk menampung kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar 688.978.396.667,00 atau 103,36% dari anggaran sebesar 666.601.928.353,00. Pendapatan Transfer Tahun 2020 turun 9,05% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp757.519.568.319,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat—Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	553.195.131.653,00	560.074.563.472,00	617.074.500.118,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp560.074.563.472,00 atau 101,24% dari anggaran sebesar Rp553.195.131.653,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2019 turun 9,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp617.074.500.118,00. Penurunan realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2020 dikarenakan penyesuaian alokasi dana transfer karena imbas dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan yang cukup signifikan pada Penerimaan Negara yang dibagihasilkan. Pemerintah telah menerbitkan **Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya Pemerintah Pusat dalam merevisi target penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19.**

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), DAU, dan DAK. Masing-masing dana tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
 - b. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

- c. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Penggunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 19 Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2020**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	36.362.372.650,00	36.012.047.175,00	99,04	38.722.150.634,00	(2.710.103.459,00)	(7,00)
1.	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	3.800.363.346,00	3.160.812.540,00	83,17	3.461.285.700,00	(300.473.160,00)	(8,68)
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21	14.770.558.500,00	16.445.653.467,00	111,34	9.465.476.244,00	6.980.177.223,00	73,74
3.	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	17.791.450.804,00	16.405.581.168,00	92,21	25.795.388.690,00	(9.389.807.522,00)	(36,40)

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum Alokasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terdiri atas 6 (enam) jenis yaitu:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan
- b. DBH dari Pungutan Hasil Perikanan
- c. DBH dari Pertambangan Minyak Bumi
- d. DBH dari Pertambangan Gas Bumi
- e. DBH dari Pertambangan Panas Bumi
- f. DBH dari Pertambangan Umum

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tidak sama dengan anggaran disebabkan adanya perubahan data prognosa realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibagikan ke daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2020.

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp45.222.695.790,00 atau 145,98% dari anggaran sebesar Rp30.979.488.653,00, turun 18,07% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp55.197.441.211,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
b.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	30.979.488.653,00	45.222.695.790,00	145,98	55.197.441.211,00	(9.974.745.421,00)	(18,07)
1.	Bagi Hasil dar Provisi Sumber Daya Hutan	301.826.561,00	187.866.211,00	62,24	140.982.000,00	46.884.211,00	33,26
2.	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	1.422.038.289,00	788.276.289,00	55,43	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
3.	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	26.744.723.061,00	37.803.687.552,00	141,35	47.885.480.122,00	(10.081.792.570,00)	(21,05)
4.	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	1.750.250.000,00	5.382.490.341,00	307,53	5.978.092.816,00	(595.602.475,00)	(9,96)
5	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	40.220.000,00	31.628.750,00	78,64	34.775.673,00	(3.146.923,00)	(9,05)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
6	Bagi Hasil Pertambangan Umum	720.430.742,00	1.028.746.647,00	142,8	567.954.800,00	460.791.847,00	81,13

3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU diukur dari total penerimaan transfer yang didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar 400.918.516.000,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp402.974.374.000,00, turun sebesar 8,42% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp437.776.459.000,00. Dasar hukum Transfer Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Tabel 21 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	402.974.374.000,00	400.918.516.000,00	99,49	437.776.459.000,00	(36.857.943.000,00)	(8,42)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	393.568.516.000,00	393.568.516.000,00	100	430.364.698.000,00	(36.796.182.000,00)	(8,55)
2.	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	9.405.858.000,00	7.350.000.000,00	78,14	7.411.761.000,00	(61.761.000,00)	(0,83)

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diukur dari jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat. DAK terbagi atas 2 jenis, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

mendana Kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Rincian DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
d.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	33.621.058.000,00	29.818.682.165,00	73,34	35.013.276.203,00	(5.194.594.038,00)	(14,84)
1.	DAK Bidang Pendidikan	8.562.598.000,00	8.126.417.903,00	94,91	4.841.763.342,00	3.284.654.561,00	67,84
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB	10.311.267.000,00	9.781.556.520,00	94,86	7.897.897.386,00	1.883.659.134,00	23,85
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan/Jembatan	7.851.188.000,00	5.508.759.640,00	70,16	9.013.132.350,00	(3.504.372.710,00)	(38,88)
4.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.107.876.970,00	(2.107.876.970,00)	(100,00)
5.	DAK Bidang Sanitasi (reguler)	1.799.347.000,00	1.799.347.000,00	100,00	1.028.239.000,00	771.108.000,00	74,99
6.	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.547.599.701,00	(2.547.599.701,00)	(100,00)
7.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	641.094.443,00	(641.094.443,00)	(100,00)
8.	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.166.803.000,00	2.142.803.000,00	98,89	3.209.644.000,00	(1.066.841.000,00)	(33,24)
9.	DAK Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	1.172.921.600,00	(1.172.921.600,00)	(100,00)
10.	DAK Bidang Pariwisata	1.374.088.000,00	988.920.850,00	71,97	1.099.104.511,00	(110.183.661,00)	(10,02)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
11.	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan)	1.281.467.000,00	1.196.577.252,00	93,38	1.008.802.900,00	187.774.352,00	18,61
12.	DAK Bidang Sanitasi (Penugasan)	274.300.000,00	274.300.000,00	100,00	445.200.000,00	(170.900.000,00)	(38,39)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp29.818.682.165,00 atau 88,69% dari anggaran sebesar Rp33.621.058.000,00, turun 14,84% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp35.013.276.203,00. Dasar hukum Transfer DAK Fisik adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Realisasi DAK Fisik kurang dari anggaran karena Transfer DAK Fisik berdasarkan atas kemajuan realisasi fisik.

Tabel 23 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
e.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	49.257.838.350,00	48.102.622.342,00	97,65	50.365.173.070,00	(2.262.550.728,00)	(4,49)
1.	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.416.400.000,00	2.838.638.132,00	83,09	3.524.945.350,00	(686.307.218,00)	(19,47)
2.	Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru	37.947.222.000,00	37.947.222.000,00	100,00	40.291.163.325,00	(2.343.941.325,00)	(5,82)
3.	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	4.823.782.350,00	4.785.769.160,00	99,21	2.935.551.276,00	1.850.217.884,00	63,03
4.	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.542.200.000,00	1.140.450.000,00	73,95	1.828.100.000,00	(687.650.000,00)	(37,62)
5.	Dana Alokasi Khusus Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	491.010.000,00	464.332.613,00	94,57	470.000.000,00	(5.667.387,00)	(1,21)
6.	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisata	255.870.000,00	156.100.800,00	61,01	521.736.000,00	(365.635.200,00)	(70,08)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.	Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru	12.825.000,00	12.825.000,00	100,00	0,00	12.825.000,00	0,00
8.	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan	768.529.000,00	757.284.637,00	98,54	793.677.119,00	(36.392.482,00)	(4,59)

Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp48.102.622.342,00 atau 97,65% dari anggaran sebesar Rp49.257.838.350,00, turun 4,49% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp50.365.173.070,00. Dasar hukum Transfer DAK Non Fisik adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

	Transfer Pemerintah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
2.	Pusat - Lainnya	56.837.217.000,00	56.837.217.000,00	51.430.800.000,00

Dana Insentif Daerah adalah bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp56.837.217.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Lainnya Tahun 2020 naik sebesar 10,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp51.430.800.000,00.

	Transfer Pemerintah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
3.	Provinsi	56.569.579.700,00	72.066.616.195,00	89.014.268.201,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebesar Rp72.066.616.195,00 atau 127,39% dari anggaran sebesar 56.569.579.700,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 turun 19,04% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp89.014.268.201,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 24 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2020**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.732.020.700,00	70.229.057.195,00	128,31	87.140.709.201,00	(16.911.652.006,00)	(19,41)
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.339.383.820,00	19.183.193.882,00	155,46	29.555.982.376,00	(10.372.788.494,00)	(35,10)
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.027.319.340,00	7.770.038.121,00	86,07	12.455.357.556,00	(4.685.319.435,00)	(37,62)
	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.410.063.945,00	14.375.621.045,00	125,99	21.766.236.519,00	(7.390.615.474,00)	(33,95)
	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	122.423.245,00	200.953.509,00	164,15	250.651.373,00	(49.697.864,00)	(19,83)
	Bagi Hasil Pajak Rokok	21.832.830.350,00	28.699.250.638,00	131,45	23.112.481.377,00	5.586.769.261,00	24,17
2	Bantuan Keuangan Provinsi	1.837.559.000,00	1.837.559.000,00	100	1.873.559.000,00	(36.000.000,00)	(1,92)
Jumlah		56.569.579.700,00	72.066.616.195,00	127,39	89.014.268.201,00	(16.947.652.006,00)	(19,04)

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp70.229.057.195,00 atau melampaui sebesar 128,31% dari anggaran sebesar Rp54.732.020.700,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

(dalam Rupiah)

No	Tanggal	Nomor STS	SK Gubernur Jawa Timur	Nominal	Keterangan
			Nomor		
1	07/02/2020	13/PPKD/II/2020	188/7/KPTS/013/2020	3.080.083.848,00	Triwulan IV Tahun 2019
Jumlah				3.080.083.848,00	
2	10/06/2020	14/PPKD/VI/2020	188/254/KPTS/013/2020	3.244.079.815,00	Triwulan I Tahun 2020
3	10/06/2020	15/PPKD/VI/2020	188/254/KPTS/013/2020	1.194.445.079,00	Triwulan I Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Tanggal	Nomor STS	SK Gubernur Jawa Timur	Nominal	Keterangan
4	10/06/2020	16/PPKD/VI/2020	188/254/KPTS/013/2020	2.996.914.827,00	Triwulan I Tahun 2020
5	10/06/2020	17/PPKD/VI/2020	188/254/KPTS/013/2020	39.473.684,00	Triwulan I Tahun 2020
Jumlah				7.474.913.405,00	
6	12/06/2020	20/PPKD/VI/2020	188/255/KPTS/013/2020	7.757.613.951,00	Bulan Desember Tahun 2019
Jumlah				7.757.613.951,00	
7	12/06/2020	21/PPKD/VI/2020	188/256/KPTS/013/2020	4.423.344.825,00	Triwulan I Tahun 2020
Jumlah				4.423.344.825,00	
8	30/07/2020	34/PPKD/VII/2020	188/317/KPTS/013/2020	4.055.099.769,00	Triwulan II Tahun 2020
9	30/07/2020	35/PPKD/VII/2020	188/317/KPTS/013/2020	1.493.056.348,00	Triwulan II Tahun 2020
10	07/08/2020	11/PPKD/VIII/2020	188/317/KPTS/013/2020	3.746.143.534,00	Triwulan II Tahun 2020
11	07/08/2020	12/PPKD/VIII/2020	188/317/KPTS/013/2020	49.342.105,00	Triwulan II Tahun 2020
12	02/09/2020	8/PPKD/IX/2020	188/379/KPTS/013/2020	7.289.042.414,00	Triwulan II Tahun 2020
13	11/11/2020	14/PPKD/XI/2020	188/481/KPTS/013/2020	4.055.099.769,00	Triwulan III Tahun 2020
14	11/11/2020	15/PPKD/XI/2020	188/481/KPTS/013/2020	1.493.056.348,00	Triwulan III Tahun 2020
15	11/11/2020	16/PPKD/XI/2020	188/481/KPTS/013/2020	49.342.105,00	Triwulan III Tahun 2020
16	12/11/2020	19/PPKD/XI/2020	188/481/KPTS/013/2020	3.746.143.534,00	Triwulan III Tahun 2020
17	17/11/2020	26/PPKD/XI/2020	188/495/KPTS/013/2020	6.083.265.729,00	Definitif 2019
18	17/11/2020	26/PPKD/XI/2020	188/495/KPTS/013/2020	2.648.993.050,00	Definitif 2019
19	17/11/2020	26/PPKD/XI/2020	188/495/KPTS/013/2020	48.126.815,00	Definitif 2019
20	17/11/2020	26/PPKD/XI/2020	188/495/KPTS/013/2020	2.981.948.746,00	Definitif 2019
21	30/11/2020	44/PPKD/XI/2020	188/522/KPTS/013/2020	6.149.165.600,00	Triwulan III Tahun 2020
Jumlah				6.149.165.600,00	
22	18/12/2020	34/PPKD/XII/2020	188/641/KPTS/013/2020	1.745.648.800,00	Triwulan IV Pada Bulan Oktober dan November Tahun 2020
23	21/12/2020	35/PPKD/XII/2020	188/641/KPTS/013/2020	607.531.600,00	Triwulan IV Pada Bulan Oktober dan November Tahun 2020
24	21/12/2020	40/PPKD/XII/2020	188/641/KPTS/013/2020	1.237.426.100,00	Triwulan IV Pada Bulan Oktober dan November Tahun 2020
25	21/12/2020	41/PPKD/XII/2020	188/641/KPTS/013/2020	14.668.800,00	Triwulan IV Pada Bulan Oktober dan November Tahun 2020
Jumlah				3.605.275.300,00	
Total				70.229.057.195,00	

b. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.873.559.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.873.559.000,00, akan tetapi dari dana yang cair 100% tersebut yang terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan hanya sebesar Rp1.623.292.200,00 sehingga dana bantuan tersebut tersisa sebesar Rp214.266.800,00. Rincian kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 26 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi**

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	Bantuan Keuangan Provinsi	1.311.930.000,00	1.148.850.000,00	163.080.000,00
2	Dinas Pendidikan	Biaya Operasional Madrasah	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	99.942.600,00	57.400,00
	Dinas Pendidikan	Bantuan Propinsi HAI	Bantuan Keuangan Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Dinas Pendidikan	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non Pegawai Negeri Sipil	Bantuan Keuangan Provinsi	189.600.000,00	172.000.000,00	17.600.000,00
3	Dinas Kesehatan	Pendampingan Poskestren	Bantuan Keuangan Provinsi	121.029.000,00	91.626.700,00	29.402.300,00
	Dinas Kesehatan	Taman Posyandu	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	51.124.100,00	3.875.900,00
4	Bagian Tata Pemerintahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	49.748.800,00	251.200,00
Total				1.873.559.000,00	1.623.292.200,00	214.266.800,00

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1. Pendapatan Hibah	17.927.459.000,00	17.307.870.000,00	17.063.120.000,00

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 Rp17.307.870.000,00 atau 96,54% dari target sebesar Rp17.927.459.000,00. Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp17.063.120.000,00. Nilai pendapatan hibah tersebut merupakan Dana BOS SD dan SMP.

Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD TA. 2020

Realisasi Pendapatan Daerah pada masing-masing SKPD se Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 27 Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD
Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	17.500.000,00	17.500.000,00	100	84.350.000,00	(66.850.000,00)	(79,25)
2	Dinas Kesehatan	1.184.082.136,00	1.161.099.141,00	98,06	1.992.520.572,00	(831.421.431,00)	(41,73)
3	UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1.947.484.800,00	1.984.641.300,00	101,91	1.637.209.200,00	347.432.100,00	21,22
4	UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	1.849.392.000,00	1.900.054.800,00	102,74	1.628.120.400,00	271.934.400,00	16,70
5	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	2.138.400.000,00	2.261.812.500,00	105,77	2.090.498.700,00	171.313.800,00	8,19
6	RSUD Mardi Waluyo	87.500.001.010,00	113.435.366.040,16	129,64	95.869.457.204,43	17.565.908.835,73	18,32
7	Dinas Perumahan Rakyat	329.000.000,00	327.298.331,00	99,48	363.265.855,00	(35.967.524,00)	(9,90)
8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	424.780.000,00	420.754.200,00	99,05	867.142.100,00	(446.387.900,00)	(51,48)
9	Dinas Perhubungan	1.702.202.800,00	1.888.579.900,00	110,95	2.497.384.901,00	(608.805.001,00)	(24,38)
10	Dinas Kominfo & Statistik	45.000.000,00	46.053.000,00	102,34	60.591.000,00	(14.538.000,00)	(23,99)
11	Dinas Lingkungan Hidup	130.100.000,00	147.740.000,00	113,56	213.901.000,00	(66.161.000,00)	(30,93)
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	88.713.000,00	72.531.500,00	81,76	109.700.000,00	(37.168.500,00)	(33,88)
13	Dinas Koperasi & UM	25.340.661,00	3.390.896,53	13,38	10.590.111,65	(7.199.215,12)	(67,98)
14	Kecamatan Kepanjenkidul	285.725.739,00	281.689.800,00	98,59	289.631.950,00	(7.942.150,00)	(2,74)
15	Kecamatan Sukorejo	410.191.215,00	409.891.215,00	99,93	403.124.810,00	6.766.405,00	1,68



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
16	Kecamatan Sananwetan	292.663.440,00	292.663.440,00	100	302.403.949,00	(9.740.509,00)	(3,22)
17	BPKAD	718.537.819.064,78	752.937.673.707,54	104,79	827.520.284.514,81	(74.582.610.807,27)	(9,01)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,	319.800.000,00	399.690.000,00	124,98	388.248.200,00	11.441.800,00	2,95
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	272.460.000,00	261.250.000,00	95,89	337.496.200,00	(76.246.200,00)	(22,59)
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	544.494.750,00	882.407.750,00	162,06	2.036.654.750,00	(1.154.247.000,00)	(56,67)
21	Dinas Perdagangan & Perindustrian	1.448.036.350,00	1.713.697.100,00	118,35	1.981.691.250,00	(267.994.150,00)	(13,52)
22	Bagian Umum Setda	7.000.000,00	7.000.000,00	100	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
23	Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	32.000.000,00	24.120.490,00	75,38	35.100.432,50	(10.979.942,50)	(31,28)
Jumlah		819.532.186.965,78	880.876.905.111,23	107,49	940.722.867.100,39	(59.845.961.989,16)	(6,36)

7.5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp868.055.395.687,07 atau 87,32% dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp994.082.778.213,99. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020 turun sebesar Rp106.670.893.129,10 atau 10,94% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp974.726.288.816,17 Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp724.635.646.540,39 atau 89,33% dari anggaran sebesar Rp811.198.583.541,54. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 turun sebesar Rp2.692.409.382,06 atau 0,37% dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp727.328.055.922,45. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1. Belanja Pegawai	339.314.765.474,00	293.925.147.874,69	309.909.180.300,40



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp293.925.147.874,69 atau 86,62% dari anggaran sebesar Rp339.314.765.474,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 turun Rp15.984.032.425,71 atau 5,16% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp309.909.180.300,40. Adapun rincian Belanja Pegawai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan / penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Gaji dan Tunjangan	245.400.812.523,00	235.726.562.022,00	96,06	241.468.852.059,00	(5.742.290.037,00)	(2,38)
2	Tambahan Penghasilan PNS	78.190.039.401,00	44.930.463.776,00	57,46	56.187.922.824,00	(11.257.459.048,00)	(20,04)
3	Belanja Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.147.418.366,00	4.274.738.000,00	83,05	3.934.224.100,00	340.513.900,00	8,66
4	Insentif pemungutan Pajak Daerah	1.573.748.165,00	1.188.969.782,00	75,55	1.677.039.989,00	(488.070.207,00)	(29,10)
5	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	318.957.372,00	321.063.778,69	100,66	231.677.878,40	89.385.900,29	38,58
Jumlah A		330.630.975.827,00	286.441.797.358,69	86,63	303.499.716.850,40	(17.057.919.491,71)	(5,62)
B	Belanja Langsung					-	
1	Uang Lembur	665.888.000,00	623.697.000,00	93,66	-	623.697.000,00	
2	Belanja Pegawai BLUD	7.307.747.647,00	6.830.345.516,00	93,47	6.080.866.950,00	749.478.566,00	12,33
3	Belanja Pegawai BOS	710.154.000,00	29.308.000,00	4,13	328.596.500,00	(299.288.500,00)	(91,08)
Jumlah B		8.683.789.647,00	7.483.350.516,00	86,18	6.409.463.450,00	1.073.887.066,00	16,75
Jumlah Total (A+B)		339.314.765.474,00	293.925.147.874,69	86,62	309.909.180.300,40	(15.984.032.425,71)	(5,16)

Nilai Belanja Pegawai sebesar Rp293.925.147.874,69 sudah termasuk Belanja Pegawai BLUD –yang didanai dari pendapatan BLUD RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp6.830.345.516,00. Belanja tidak langsung pegawai selain untuk gaji, ada belanja pegawai yang realisasinya tergantung beberapa syarat tertentu seperti kehadiran pegawai dan prestasi/kinerja untuk Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (TPP) serta insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Realisasi Belanja pegawai diatas termasuk juga untuk penanganan Covid-19 di Satuan Polisi Pamong Praja untuk uang lembur PNS dan non PNS dalam kegiatan penanggulangan Covid-19.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penurunan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp11.257.459.048,00 atau sekitar 20,04% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu disebabkan oleh tidak terlaksananya realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke 13 dan 14.

2. Belanja Barang	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
	413.695.207.192,54	377.654.652.692,70	366.755.582.835,05

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 sebesar Rp377.654.652.692,70 atau 91,29% dari anggaran sebesar Rp413.695.207.192,54. Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 naik sebesar Rp10.899.069.857,65 atau 2,97% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tahun 2019 sebesar Rp366.755.582.835,05. Belanja Barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan bahan pakai habis, bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas serta belanja pemeliharaan. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Honorarium PNS	3.722.056.000,00	2.934.836.000,00	78,85	2.849.243.000,00	85.593.000,00	3,00
2	Honorarium Non PNS	3.806.104.500,00	3.328.057.765,00	87,44	3.398.920.245,00	(70.862.480,00)	(2,08)
3	Belanja Bahan Pakai Habis	12.705.943.283,00	11.281.777.201,00	88,79	11.501.319.676,00	(219.542.475,00)	(1,91)
4	Belanja Bahan/Material	21.065.579.426,00	19.184.193.853,00	91,07	10.727.071.906,13	8.457.121.946,87	78,84
5	Belanja Jasa Kantor	99.042.675.607,92	87.881.712.193,16	88,73	75.418.726.326,79	12.462.985.866,37	16,53
6	Belanja Premi Asuransi	21.129.125.625,92	18.254.078.345,00	86,39	9.746.925.057,00	8.507.153.288,00	87,28
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.226.049.679,00	3.599.876.494,00	85,18	3.645.022.722,00	(45.146.228,00)	(1,24)
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.358.303.233,00	9.488.398.645,00	91,60	10.575.370.995,00	(1.086.972.350,00)	(10,28)
9	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	417.956.100,00	276.649.000,00	66,19	1.388.242.100,00	(1.111.593.100,00)	(80,07)
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	315.975.956,00	142.114.900,00	44,98	575.322.250,00	(433.207.350,00)	(75,30)
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.686.472.350,00	1.772.523.725,00	65,98	5.933.937.140,00	(4.161.413.415,00)	(70,13)
12	Belanja Makanan dan Minuman	24.042.828.269,00	20.634.820.311,00	85,83	25.678.281.614,00	(5.043.461.303,00)	(19,64)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	545.392.296,00	474.917.400,00	87,08	521.094.500,00	(46.177.100,00)	(8,86)
14	Belanja Pakaian Kerja	2.972.448.990,00	2.755.476.490,00	92,70	2.527.627.115,00	227.849.375,00	9,01
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.609.761.255,00	3.448.201.780,00	95,52	5.199.209.175,00	(1.751.007.395,00)	(33,68)
16	Belanja Perjalanan Dinas	17.436.357.312,60	15.152.486.272,00	86,90	30.064.509.111,00	(14.912.022.839,00)	(49,60)
17	Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan BinteK/Sosialisasi	3.177.835.196,00	2.625.453.622,00	82,62	9.857.864.903,00	(7.232.411.281,00)	(73,37)
18	Belanja Pemeliharaan	30.819.403.421,00	28.767.898.619,60	93,34	20.819.287.157,24	7.948.611.462,36	38,18
19	Belanja Jasa Konsultasi	6.805.969.400,00	6.180.326.190,00	90,81	7.340.514.908,40	(1.160.188.718,40)	(15,81)
20	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.125.023.237,00	3.703.628.114,00	89,78	0,00	3.703.628.114,00	0,00
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	17.019.182.550,00	16.807.617.500,00	98,76	0,00	16.807.617.500,00	0,00
22	Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.293.027.065,00	8.019.449.180,00	96,70	8.745.071.992,00	(725.622.812,00)	(8,30)
23	Belanja Materi Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah	10.480.679.280,00	6.597.510.755,00	62,95	7.289.809.251,00	(692.298.496,00)	(9,50)
24	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	471.200.000,00	417.200.000,00	88,54	1.126.458.800,00	(709.258.800,00)	(62,96)
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	77.765.728.408,76	85.760.371.889,79	110,28	91.713.898.680,70	(5.953.526.790,91)	(6,49)
26	Belanja Barang Non Kapitalisasi	1.647.008.882,00	1.328.611.460,00	80,67	0,00	1.328.611.460,00	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	7.172.766.884,00	5.274.520.416,00	73,54	7.570.069.918,00	(2.295.549.502,00)	(30,32)
28	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.769.352.985,34	9.496.944.572,15	60,22	12.541.784.291,79	(3.044.839.719,64)	(24,28)
29	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat	2.065.000.000,00	2.065.000.000,00	100,00	0,00	2.065.000.000,00	0,00
Jumlah		413.695.207.192,54	377.654.652.692,70	91,29	366.755.582.835,05	10.899.069.857,65	2,97

Pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa sebesar Rp3.703.628.114,00 tidak dikonversi menjadi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp16.807.617.500,00 tidak dikonversi menjadi Belanja Bantuan Sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 *tentang* Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja barang dan jasa diatas termasuk untuk belanja penanganan Covid-19 berupa bahan kesehatan, obat-obatan, makanan, jasa kerja untuk pemeriksaan laboratorium (survirm), insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19, pakaian kerja lapangan, publikasi dan jasa partisipasi masyarakat dalam rangka Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19, Sewa Zoom Cloud Meeting, bantuan untuk lansia terlanar dan masyarakat terdampak covid-19, bingkisan untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan makanan untuk warga terdampak COVID dll.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2020 secara total turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi ada belanja yang mengalami kenaikan dalam rangka penanganan Covid-19 seperti belanja bahan/material untuk pembelian bahan kesehatan dan obat-obatan, belanja jasa kantor untuk jasa kerja laboratorium (survim), belanja premi asuransi dan uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat.

3.	Belanja Hibah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
		41.520.121.300,00	38.493.073.000,00	26.739.219.800,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 sebesar Rp38.493.073.000,00 atau 92,71% dari anggaran sebesar Rp41.520.121.300,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 naik Rp11.753.853.200,00 atau 43,96% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp26.739.219.800,00. Adapun rincian Belanja Hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.455.000.000,00	21.455.000.000,00	100,00	4.045.000.000,00	17.410.000.000,00	430,41
2	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.353.000.000,00	7.038.600.000,00	84,26	9.645.910.000,00	(2.607.310.000,00)	(27,03)
3	Hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat	7.285.690.000,00	6.009.473.000,00	82,48	6.541.300.000,00	(531.827.000,00)	(8,13)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.884.231.300,00	2.654.400.000,00	92,03	3.129.900.000,00	(475.500.000,00)	(15,19)
5	Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	1.542.200.000,00	1.335.600.000,00	86,60	1.426.350.000,00	(90.750.000,00)	(6,36)
6	Belanja Hibah Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.950.759.800,00	(1.950.759.800,00)	(100,00)
Jumlah		41.520.121.300,00	38.493.073.000,00	92,71	26.739.219.800,00	11.753.853.200,00	43,96

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Kenaikan Belanja Hibah dari tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Hibah kepada KPU dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2020 di Pemerintah Kota Blitar.

Penurunan Belanja hibah barang/jasa sebesar 100% dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020, realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa sebesar Rp3.703.628.114,00 tidak dikonversi menjadi Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 *tentang* Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang* Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Rincian penerima hibah Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 1** catatan atas laporan keuangan.

4.	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
		16.121.600.000,00	14.015.883.398,00	23.408.640.162,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar Rp14.015.883.398,00 atau 86,94% dari anggaran sebesar Rp16.121.600.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 turun sebesar Rp9.392.756.764,00 atau 40,13% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp23.408.640.162,00. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 31 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.288.400.000,00	1.268.660.000,00	98,47	3.010.000.000,00	(1.741.340.000,00)	(57,85)
2	Belanja Bantuan Sosial Santunan kematian	1.500.000.000,00	1.301.800.000,00	86,79	1.456.600.000,00	(154.800.000,00)	(10,63)
3	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	12.631.600.000,00	10.779.923.398,00	85,34	84.347.500,00	10.695.575.898,00	12.680,37
4	Belanja Bantuan Sosial Santunan Anak yatim	701.600.000,00	665.500.000,00	94,85	311.000.000,00	354.500.000,00	113,99
5	Belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	18.546.692.662,00	(18.546.692.662,00)	(100,00)
Jumlah		16.121.600.000,00	14.015.883.398,00	86,94	23.408.640.162,00	(9.392.756.764,00)	(40,13)

Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012, menyatakan bahwa belanja bantuan sosial diberikan untuk mengurangi dan mengatasi masyarakat penyandang masalah sosial dan atau risiko sosial. Oleh karena itu bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana baik secara individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Bantuan Sosial pada Tahun 2020 antara lain berupa santunan kematian, santunan anak yatim/piatu, fakir miskin dan orang terlantar, bantuan korban bencana alam/kebakaran, bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk penanganan Covid-19.

Penurunan Belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar 100% dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020, realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat sebesar Rp16.807.617.500,00 tidak dikonversi menjadi Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 *tentang* Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp10.578.965.200,00 untuk penanganan jaring pengaman sosial berupa pemberian Bantuan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Risiko Sosial, Penerima Rastra, Korban PHK dll, dilaksanakan oleh 7 SKPD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 32 Rincian Realisasi Belanja Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk Covid-19 Per SKPD Pelaksana Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	176.400.000,00	117.600.000,00
2	Dinas Pendidikan	17.600.000,00	17.600.000,00
3	Dinas Sosial	3.572.800.000,00	2.942.565.200,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.639.800.000,00	1.639.800.000,00
5	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	484.400.000,00	348.000.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	660.600.000,00	477.800.000,00
7	Bagian Tata Pemerintahan	5.080.000.000,00	5.035.600.000,00
	Total	11.631.600.000,00	10.578.965.200,00

	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
5.		546.889.575,00	546.889.575,00	515.432.825,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 sebesar Rp546.889.575,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp546.889.575,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 naik sebesar Rp31.456.750,00 atau 6,10% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp515.432.825,00.

Tabel 33 Rincian Penerima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No.	Partai Politik	2020		%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi				
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	205.368.700,00	205.368.700,00	100,00	217.991.400,00	(12.622.700,00)	(5,79)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	60.568.475,00	60.568.475,00	100,00	70.968.350,00	(10.399.875,00)	(14,65)
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	77.061.450,00	77.061.450,00	100,00	57.548.715,00	19.512.735,00	33,91
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	58.968.650,00	58.968.650,00	100,00	46.559.400,00	12.409.250,00	26,65
5	Partai Demokrat (PD)	39.006.175,00	39.006.175,00	100,00	34.863.300,00	4.142.875,00	11,88
6	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	0,00	0,00	0,00	14.546.200,00	(14.546.200,00)	(100,00)
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	22.211.225,00	22.211.225,00	100,00	20.202.300,00	2.008.925,00	9,94
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	56.957.625,00	56.957.625,00	100,00	31.689.875,00	25.267.750,00	79,73
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	26.747.275,00	26.747.275,00	100,00	21.063.285,00	5.683.990,00	26,99
Jumlah		546.889.575,00	546.889.575,00	100,00	515.432.825,00	31.456.750,00	6,10

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp114.808.593.714,45 atau 90,23% dari anggaran sebesar Rp127.242.906.213,45. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 turun sebesar Rp132.577.296.199,27 atau 53,59% dibandingkan dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp247.385.889.913,72. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Belanja Modal TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020		%	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi				
1	Belanja Tanah	1.010.194.900,00	627.630.320,00	62,13	7.034.003.140,00	(6.406.372.820,00)	(91,08)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	56.262.384.925,09	51.660.497.640,20	91,82	81.508.948.849,00	(29.848.451.208,80)	(36,62)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	30.165.504.647,29	28.630.154.932,72	94,91	100.616.728.055,33	(71.986.573.122,61)	(71,55)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.846.625.294,84	26.271.196.590,72	85,17	51.090.096.065,39	(24.818.899.474,67)	(48,58)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.207.645.246,23	3.281.295.800,81	77,98	4.192.993.604,00	(911.697.803,19)	(21,74)
6	Belanja Aset Lainnya	4.750.551.200,00	4.337.818.430,00	91,31	2.943.120.200,00	1.394.698.230,00	47,39
Jumlah		127.242.906.213,45	114.808.593.714,45	90,23	247.385.889.913,72	(132.577.296.199,27)	(53,59)

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 termasuk di dalamnya Belanja Modal RSUD Mardi Waluyo Tahun 2020 sebesar Rp18.856.996.473,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Modal BLUD - dana APBD Rp 11.556.600.835,00

b. Belanja Modal BLUD – dana BLUD Rp 7.300.395.638,00

Jumlah Belanja Modal BLUD Rp 18.856.996.473,00

dan termasuk di dalamnya Belanja Modal BOS Tahun 2020 di Dinas Pendidikan sebesar Rp4.068.873.708,00 juga Belanja Modal Dana Kapitasi JKN Tahun 2020 di 3 UPT Puskesmas sebesar Rp673.779.045,00.

Selain itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 diatas termasuk juga untuk penanganan Covid-19 berupa pembelian alat kedokteran, Proyek Padat Karya melalui Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan), pembelian wastafel portabel, Fasilitas *Integrated System Center* untuk koordinasi penanganan covid-19 dll.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1. Belanja Tanah	1.010.194.900,00	627.630.320,00	7.034.003.140,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2020 sebesar Rp627.630.320,00 atau 62,13% dari anggaran sebesar Rp1.010.194.900,00. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

turun sebesar Rp6.406.372.820,00 atau 91,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2019 sebesar Rp7.034.003.140,00. Rincian Belanja Modal pengadaan tanah pada tabel berikut ini:

Tabel 35 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Tanah Untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	23.485.000,00	(23.485.000,00)	(100,00)
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan /Perusahaan	0,00	0,00	0,00	1.864.510.000,00	(1.864.510.000,00)	(100,00)
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja /Jasa	25.000.000,00	0,00	0,00	43.806.000,00	(43.806.000,00)	(100,00)
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong	297.000.000,00	56.878.320,00	19,15	0,00	56.878.320,00	0,00
5	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	922.500.000,00	(922.500.000,00)	(100,00)
6	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	688.194.900,00	570.752.000,00	82,93	4.179.702.140,00	(3.608.950.140,00)	(86,34)
Jumlah		1.010.194.900,00	627.630.320,00	62,13	7.034.003.140,00	(6.406.372.820,00)	(91,08)

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
2. Belanja Peralatan dan Mesin	56.262.384.925,09	51.660.497.640,20	81.508.948.849,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp51.660.497.640,20 atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp56.262.384.925,09. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2020 turun sebesar Rp29.848.451.208,80 atau 36,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp81.508.948.849,00. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Alat-alat Berat	100.000.000,00	98.900.000,00	98,90	2.494.160.000,00	(2.395.260.000,00)	(96,03)
2	Alat Bantu	519.286.700,00	507.014.465,00	97,64	500.746.980,88	6.267.484,12	1,25
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.224.909.000,00	1.927.314.700,00	86,62	9.165.686.179,00	(7.238.371.479,00)	(78,97)
4	Alat-alat angkutan Darat tidak bermotor	703.225.500,00	700.443.700,00	99,60	581.975.000,00	118.468.700,00	20,36
5	Alat-alat Bengkel/Mesin	43.688.500,00	38.838.966,00	88,90	471.182.800,00	(432.343.834,00)	(91,76)
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	72.138.081,00	68.401.112,00	94,82	103.570.000,00	(35.168.888,00)	(33,96)
7	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	176.772.500,00	176.677.500,00	99,95	423.663.050,00	(246.985.550,00)	(58,30)
8	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	262.057.300,00	259.875.798,00	99,17	540.697.743,00	(280.821.945,00)	(51,94)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/	%
9	Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.525.730.204,00	2.420.339.954,90	95,83	2.775.894.249,72	(355.554.294,82)	(12,81)
10	Komputer	15.669.448.519,00	13.882.992.562,30	88,60	27.228.270.759,00	(13.345.278.196,70)	(49,01)
11	Mebeulair (Meja Dan Kursi Kerja/Rapat)	351.047.000,00	328.907.400,00	93,69	190.008.774,00	138.898.626,00	73,10
12	Peralatan Dapur/Rumah Tangga	5.016.161.000,00	4.787.910.375,00	95,45	5.360.217.173,00	(572.306.798,00)	(10,68)
13	Alat-alat Studio	3.105.680.636,00	3.010.318.544,00	96,93	4.198.805.327,00	(1.188.486.783,00)	(28,31)
14	Alat-alat Komunikasi	500.287.450,00	489.230.258,00	97,79	628.686.250,00	(139.455.992,00)	(22,18)
15	Peralatan Pemancar	186.545.000,00	185.895.000,00	99,65	434.225.500,00	(248.330.500,00)	(57,19)
16	Alat-alat Ukur	452.333.700,00	449.960.000,00	99,48	640.885.150,00	(190.925.150,00)	(29,79)
17	Alat-alat Kedokteran	4.640.555.494,00	4.335.263.965,00	93,42	14.705.331.377,80	(10.370.067.412,80)	(70,52)
18	Alat Kesehatan	9.160.666.200,00	8.746.743.750,00	95,48	945.726.630,00	7.801.017.120,00	824,87
19	Alat-alat Laboratorium	157.041.800,00	142.725.136,00	90,88	634.835.346,00	(492.110.210,00)	(77,52)
21	Alat-alat Keamanan	2.326.267.994,00	2.166.684.020,00	93,14	2.664.339.400,00	(497.655.380,00)	(18,68)
23	Alat Peraga/Praktek Sekolah	295.030.000,00	288.399.802,00	97,75	113.936.666,00	174.463.136,00	153,12
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	450.000.000,00	387.600.000,00	86,13	0,00	387.600.000,00	0,00
27	Barang Extracomptable	0,00	0,00	0,00	1.271.866.577,00	(1.271.866.577,00)	(100,00)
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.439.440.150,00	2.984.024.464,00	86,76	3.902.649.417,60	(918.624.953,60)	(23,54)
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.884.072.197,09	3.276.036.168,00	84,35	1.531.588.499,00	1.744.447.669,00	113,90
Jumlah		56.262.384.925,09	51.660.497.640,20	91,82	81.508.948.849,00	(29.848.451.208,80)	(36,62)

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
3. Belanja Gedung dan Bangunan	30.165.504.647,29	28.630.154.932,72	100.616.728.055,33

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp28.630.154.932,72 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp30.165.504.647,29. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2020 turun sebesar Rp71.986.573.122,61 atau 71,55% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp100.616.728.055,33 Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	23.931.662.962,71	22.502.228.884,72	94,03	90.806.026.786,85	(68.303.797.902,13)	(75,22)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Konstruksi Pagar/Gapura/Taman Menara	1.216.680.100,00	1.206.651.000,00	99,18	3.006.732.469,05	(1.800.081.469,05)	(59,87)
3	Rambu-rambu Lalu Lintas	464.627.100,00	461.507.474,00	99,33	750.066.484,35	(288.559.010,35)	(38,47)
4	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	210.395.000,00	208.075.400,00	98,90	180.120.191,00	27.955.209,00	15,52
5	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	153.656.000,00	(143.656.000,00)	(93,49)
6	Konstruksi Gedung dan Bangunan BLUD	4.192.793.250,00	4.124.146.174,00	98,36	5.623.597.124,08	(1.499.450.950,08)	(26,66)
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	139.346.234,58	117.546.000,00	84,36	96.529.000,00	21.017.000,00	21,77
Jumlah		30.165.504.647,29	28.630.154.932,72	94,91	100.616.728.055,33	(71.986.573.122,61)	(71,55)

	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
4.		30.846.625.294,84	26.271.196.590,72	51.090.096.065,39

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp26.271.196.590,72 atau 85,17% dari anggaran sebesar Rp30.846.625.294,84. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 turun sebesar Rp24.818.899.474,67 atau 48,58% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp51.090.096.065,39. Adapun rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Jalan	16.920.412.339,84	12.669.645.077,11	74,88	31.129.262.006,46	(18.459.616.929,35)	(59,30)
2	Jembatan	436.975.500,00	426.702.651,00	97,65	1.012.945.600,00	(586.242.949,00)	(57,88)
3	Jaringan Air (Irigasi)	8.009.093.900,00	7.817.872.961,93	97,61	6.577.726.858,47	1.240.146.103,46	18,85
4	Instalasi Telepon	32.242.100,00	32.171.100,00	99,78	19.322.500,00	12.848.600,00	66,50
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.964.187.475,00	3.894.170.526,00	98,23	8.413.524.307,48	(4.519.353.781,48)	(53,72)
6	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	390.290.200,00	384.287.469,68	98,46	10.865.300,00	373.422.169,68	3.436,83
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	225.000.000,00	223.787.864,00	99,46	59.909.300,00	163.878.564,00	273,54
8	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	146.511.130,00	145.270.000,00	99,15	73.492.500,00	71.777.500,00	97,67



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	184.740.000,00	(184.740.000,00)	(100,00)
10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	123.348.650,00	123.298.641,00	99,96	554.939.477,98	(431.640.836,98)	(77,78)
11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	69.775.000,00	69.590.500,00	99,74	0,00	69.590.500,00	100,00
12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00	10.400.000,00	100,00
13	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan	472.189.000,00	463.299.800,00	98,12	3.040.596.215,00	(2.577.296.415,00)	(84,76)
14	Belanja Modal Jalan Instalasi Jaringan BOS	46.200.000,00	10.700.000,00	23,16	12.772.000,00	(2.072.000,00)	(16,22)
Jumlah		30.846.625.294,84	26.271.196.590,72	85,17	51.090.096.065,39	(24.818.899.474,67)	(48,58)

	<u>Anggaran 2020 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2020 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2019 (Rp)</u>
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	4.207.645.246,23	3.281.295.800,81	4.192.993.604,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp3.281.295.800,81 atau 77,98% dari anggaran sebesar Rp4.207.645.246,23. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 turun sebesar Rp911.697.803,19 atau 21,74% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp4.192.993.604,00. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Buku Perpustakaan	466.715.400,00	462.931.069,81	99,19	1.710.609.276,00	(1.247.678.206,19)	(72,94)
2	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	2.246.437.660,00	1.851.683.191,00	82,43	1.392.855.348,00	458.827.843,00	32,94
3	Tanaman Hias	305.932.700,00	303.590.000,00	99,23	276.620.000,00	26.970.000,00	9,75
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.188.559.486,23	663.091.540,00	55,79	812.908.980,00	(149.817.440,00)	(18,43)
Jumlah		4.207.645.246,23	3.281.295.800,81	77,98	4.192.993.604,00	(911.697.803,19)	(21,74)

	<u>Anggaran 2020 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2020 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2019 (Rp)</u>
6. Belanja Aset Lainnya	4.750.551.200,00	4.337.818.430,00	2.943.120.200,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp4.337.818.430,00 atau 91,31% dari anggaran sebesar Rp4.750.551.200,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2020 naik sebesar Rp1.394.698.230,00 atau 47,39% dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp2.943.120.200,00. Adapun rincian penerimaan Belanja Aset Lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Software, DED, Kajian	2.296.714.800,00	2.135.444.490,00	92,98	0,00	2.135.444.490,00	0,00
2	Kajian	2.201.896.400,00	2.008.648.940,00	91,22	304.733.000,00	1.703.915.940,00	559,15
3	Perangkat lunak/software komputer	0,00	0,00	0,00	2.361.142.200,00	(2.361.142.200,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	242.940.000,00	192.225.000,00	79,12	277.245.000,00	(85.020.000,00)	(30,67)
5	Belanja Modal Aset Lainnya BOS	9.000.000,00	1.500.000,00	16,67	0,00	1.500.000,00	0,00
Jumlah		4.750.551.200,00	4.337.818.430,00	91,31	2.943.120.200,00	1.394.698.230,00	47,39

7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1. Belanja Tidak Terduga	55.641.288.459,00	28.611.155.432,23	5.255.300,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 sebesar Rp28.611.155.432,23 atau 51,42% dari anggaran sebesar Rp55.641.288.459,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 naik sebesar Rp28.605.900.132,23 atau 544,324% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 sebesar Rp5.255.300,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp28.161.614.350,23.
- b. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa dana Bantuan Propinsi Jawa Timur TA 2019 sebesar Rp333.612.682,00.
- c. Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana Angin Kencang Kota Blitar sebesar Rp37.273.000,00
- d. Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tes CPNS Formasi Tahun 2019 sebesar Rp78.655.400,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp28.161.614.350,23 dengan rincian belanja penanganan bidang kesehatan sebesar Rp26.994.418.350,23 dan penanganan dampak ekonomi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp1.167.196,00, dilaksanakan oleh 12 SKPD dan 3 instansi vertikal (Kodim 008, Polresta Kota Blitar dan Yonif 511) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Realisasi Belanja Tak terduga untuk penanganan bidang kesehatan Per SKPD Pelaksana dan Instansi Vertikal Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah)

No.	Pelaksana	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	10.169.990.750,00	6.132.116.045,00
2	RSUD Mardi Waluyo	16.157.804.750,00	14.433.498.734,23
3	Satuan Polisi Pamong Praja	464.253.000,00	215.318.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	4.198.411.477,00	2.606.780.496,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.673.900,00	81.673.900,00
6	Dinas Sosial	1.962.399.900,00	1.859.067.300,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	80.000.000,00	42.891.000,00
8	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	0,00
9	Bagian Tata Pemerintahan	233.986.000,00	233.986.000,00
10	Kecamatan Kepanjenkidul	312.882.500,00	312.882.500,00
11	Kecamatan Sananwetan	342.540.000,00	335.140.000,00
12	Kecamatan Sukorejo	292.212.500,00	291.064.375,00
13	KODIM 0808	150.000.000,00	150.000.000,00
14	Kepolisian Resort Kota Blitar	200.000.000,00	200.000.000,00
15	YONIF 511	100.000.000,00	100.000.000,00
	Total	34.756.154.777,00	26.994.418.350,23

Realisasi Belanja Tak terduga dalam penanganan bidang kesehatan untuk sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, Fasilitas *Crisis Center* Penanggulangan COVID-19 (Bahan kesehatan, jasa kerja dan makanan), penanganan kasus Covid-19 (*tracing, testing dan treatment*), pengelolaan Rumah Isolasi dan dukungan *tracing* serta penjemputan ke masyarakat, pemantauan pengawasan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dan penanganan kesehatan lainnya.

Sedangkan belanja tidak terduga dalam penanganan dampak ekonomi berupa penguatan permodalan bagi pelaku usaha informal/bantuan tunai produktif.

7.5.1.2.4. Transfer

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	7.087.680,00

Realisasi Belanja Transfer merupakan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau 10% dari anggaran sebesar Rp Rp0,00. Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020 turun sebesar Rp7.087.680,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp7.087.680,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Per SKPD TA. 2020

Realisasi Belanja pada masing-masing SKPD di Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42 Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun Anggaran 2020		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	212.688.218.902,24	171.468.005.340,15	80,62
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	2.240.976.500,00	1.959.409.170,00	87,44
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1.565.558.150,00	1.484.592.787,00	94,83
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	1.295.073.650,00	1.219.645.454,00	94,18
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1.819.443.409,00	1.715.280.915,00	94,28
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.444.127.400,00	1.302.105.518,00	90,17
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1.343.442.820,00	1.263.430.934,00	94,04
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.833.862.300,00	1.609.730.855,00	87,78
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1.453.119.060,00	1.399.780.928,90	96,33
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1.932.398.680,00	1.767.205.558,00	91,45
11	Dinas Kesehatan	63.441.515.567,92	56.277.159.490,00	88,71
12	UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	4.977.834.728,00	4.829.939.273,00	97,03
13	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	6.484.746.966,00	5.462.553.652,11	84,24
14	UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	5.350.291.995,00	4.358.716.569,00	81,47
15	RSUD Mardi Waluyo	138.970.181.260,76	143.357.915.357,79	103,16
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.656.679.436,00	25.757.675.385,00	81,37
17	Dinas Perumahan Rakyat	12.232.190.400,00	11.427.184.094,15	93,42
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.368.061.527,00	6.579.215.132,00	89,29
19	Dinas Perhubungan	30.310.876.025,00	26.513.897.852,75	87,47
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	20.433.731.898,00	17.405.667.415,30	85,18
21	Dinas Lingkungan Hidup	27.479.178.958,03	25.964.330.533,63	94,49
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.943.658.188,00	6.580.510.467,00	94,77
23	Dinas Sosial	24.434.942.859,00	23.649.863.133,00	96,79
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.232.787.196,00	3.778.512.118,00	89,27
25	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	9.479.091.616,00	8.105.464.642,00	85,51
26	Satuan Polisi Pamong Praja	16.881.944.025,00	15.118.083.400,37	89,55
27	Bagian Umum	20.512.855.388,00	17.888.740.805,00	87,21
28	Bagian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan	1.204.825.750,00	830.261.488,00	68,91
29	Bagian Hukum Dan Organisasi	1.385.844.254,00	1.300.193.905,00	93,82
30	Bagian Humas Dan Protokol	3.843.258.490,00	2.911.352.326,00	75,75
31	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat	6.797.298.561,00	6.464.301.490,00	95,10
32	Bagian Tata Pemerintahan	1.240.230.482,00	1.223.171.089,00	98,62



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Tahun Anggaran 2020		%
		Anggaran	Realisasi	
33	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	658.479.364,00	462.367.665,00	70,22
34	Sekretariat DPRD	30.379.428.081,00	25.565.534.936,00	84,15
35	Inspektorat Daerah	10.512.486.582,00	9.431.623.644,20	89,72
36	Kecamatan Kepanjenkidul	12.116.218.777,00	11.241.227.582,08	92,78
37	Kecamatan Sukorejo	12.596.870.461,04	11.768.289.768,20	93,42
38	Kecamatan Sananwetan	11.346.259.750,00	10.364.241.147,14	91,35
39	Kelurahan Kepanjenkidul	1.506.170.500,00	1.367.281.463,25	90,78
40	Kelurahan Ngadirejo	1.148.454.660,00	1.127.836.437,00	98,20
41	Kelurahan Sentul	1.155.694.600,00	1.137.480.102,00	98,42
42	Kelurahan Kauman	1.249.448.635,00	1.169.132.083,00	93,57
43	Kelurahan Tanggung	1.170.472.350,00	1.144.246.598,00	97,76
44	Kelurahan Bendo	1.148.861.531,00	1.132.329.694,00	98,56
45	Kelurahan Kepanjenlor	1.165.052.350,00	1.155.385.790,00	99,17
46	Kelurahan Pakunden	1.358.174.300,00	1.293.549.551,00	95,24
47	Kelurahan Blitar	1.032.821.600,00	994.223.372,00	96,26
48	Kelurahan Tlumpu	1.039.114.932,00	1.000.335.677,00	96,27
49	Kelurahan Turi	1.018.472.745,00	980.910.146,00	96,31
50	Kelurahan Karang Sari	1.142.133.180,00	1.130.845.140,00	99,01
51	Kelurahan Sukorejo	1.548.864.800,00	1.498.671.806,00	96,76
52	Kelurahan Tanjungsari	1.563.537.383,00	1.457.800.426,00	93,24
53	Kelurahan Gedog	1.395.798.207,00	1.357.052.640,00	97,22
54	Kelurahan Plosokerep	1.345.553.315,00	1.318.783.778,00	98,01
55	Kelurahan Klampok	1.148.220.004,00	1.128.956.534,00	98,32
56	Kelurahan Sananwetan	1.753.916.755,00	1.743.613.975,00	99,41
57	Kelurahan Rembang	1.203.607.885,00	1.161.291.898,00	96,48
58	Kelurahan Karangtengah	1.255.372.545,00	1.203.181.534,00	95,84
59	Kelurahan Bendogerit	1.414.125.066,00	1.358.295.013,00	96,05
60	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.520.230.798,00	5.693.099.742,00	87,31
61	Badan Kepegawaian Daerah	11.781.954.729,00	9.593.538.311,00	81,43
62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	133.973.731.200,00	99.378.221.453,23	74,18
63	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPdan KB	8.679.491.496,00	8.055.781.089,66	92,81
64	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.283.076.620,00	4.607.907.012,81	87,22
65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.099.151.634,00	10.281.294.432,93	92,63
66	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.584.675.222,00	12.710.447.758,00	87,15
67	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	9.361.009.392,00	8.667.322.370,00	92,59
68	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15.147.600.323,00	13.399.398.039,42	88,46
Jumlah		994.082.778.213,99	868.055.395.687,07	87,32



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	174.672.386.198,21	174.684.769.000,75	211.167.078.000,99

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp174.684.769.000,75 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp174.672.386.198,21. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 turun Rp36.482.309.000,24 atau 17,26% dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp211.167.078.000,99. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	174.663.656.285,21	174.663.656.285,21	100,00	211.104.495.278,46	(36.440.838.993,25)	(17,26)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.729.913,00	21.112.715,54	241,84	62.582.722,53	(41.470.006,99)	(66,26)
Jumlah		174.672.386.198,21	174.684.769.000,75	100,01	211.167.078.000,99	(36.482.309.000,24)	(17,28)

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp21.112.715,54 adalah pembayaran pokok pengembalian Dana Bergulir.

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
2. Pengeluaran Pembiayaan	121.794.950,00	121.794.950,00	2.500.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp121.794.950,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp121.794.950,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 turun sebesar Rp2.378.205.050,00 atau 95,13% dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 44 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020			Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)
2	Pembayaran Pokok Utang	121.794.950,00	121.794.950,00	100,00	0,00	121.794.950,00	0,00
Jumlah		121.794.950,00	121.794.950,00	100,00	2.500.000.000,00	(2.378.205.050,00)	(95,13)

Pembayaran pokok utang sebesar Rp121.794.950,00 adalah pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga TA 2019 di Dinas Pendidikan atas paket pekerjaan pemeliharaan Gedung TKN (TKN Sukorejo 1, TKN Karangsari 1, TKN Pakunden 1, TKN Tanggung 1, TKN Ngadirejo 1).

7.5.1. 4. SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp187.384.483.474,91 atau naik sebesar Rp12.720.827.189,7 atau 7,28% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp174.663.656.285,21 Perhitungan SiLPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Total Pendapatan Tahun 2020	Rp	880.876.905.111,23
b. Total Belanja Tahun 2020	Rp	868.055.395.687,07
c. Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	12.821.509.424,16
d. Pembiayaan Neto	Rp	174.562.974.050,75
SiLPA (c+d)	Rp	187.384.483.474,91

Jumlah SiLPA sebesar Rp187.384.483.474,91 terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	160.334.899.018,80
b. Kas di BLUD – RSD Mardi Waluyo	Rp	18.992.901.442,13
c. Kas di Kapitasi JKN		
• UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	96.910.492,00
• UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	Rp	263.655.882,00
• UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	Rp	164.147.016,89
d. Kas di Kas BOSNAS	Rp	7.531.969.623,09
Jumlah SiLPA 2020	Rp	187.384.483.474,91



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) periode tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan komponen laporan keuangan yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, selain Laporan Arus Kas, Pos-pos LPSAL yang mencakup:

7.5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	174.663.656.285,21	211.104.495.278,46

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp174.663.656.285,21 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019.

7.5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penggunaan SAL	174.663.656.285,21	211.104.495.278,46

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp174.663.656.285,21 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yang dipergunakan untuk pos-pos Pembiayaan tahun berjalan.

7.5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
SILPA	187.384.483.474,91	174.663.656.285,21

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp187.384.483.474,91 merupakan penjumlahan dari nominal Pembiayaan Neto sebesar Rp174.562.974.050,75 dengan Surplus Anggaran sebesar Rp12.821.509.424,16.

7.5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.2.5. Lain – lain

Pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	187.384.483.474,91	174.663.656.285,21

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp187.384.483.474,91 merupakan hasil dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, ditambahkan dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan kemudian disesuaikan dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Pos Lain-lain.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

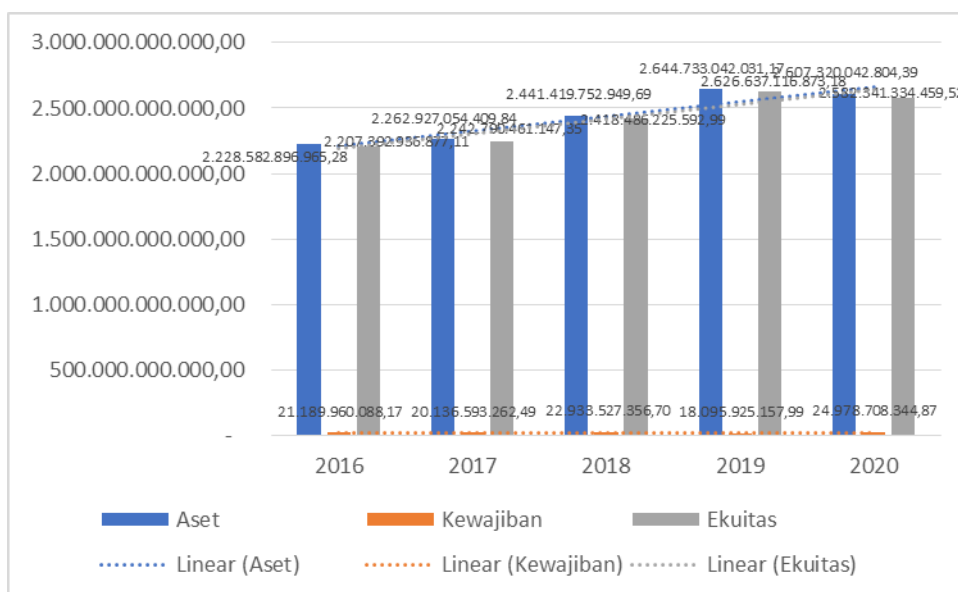
7.5. 3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Tabel 45 Perkembangan Neraca 5 Tahun Terakhir
(dalam Rupiah)

Tahun	Aset	Ekuitas	Kewajiban
2016	2.228.582.896.965,28	2.207.392.936.877,11	21.189.960.088,17
2017	2.262.927.054.409,84	2.242.790.461.147,35	20.136.593.262,49
2018	2.441.419.752.949,69	2.418.486.225.592,99	22.933.527.356,70
2019	2.644.733.042.031,17	2.626.637.116.873,18	18.095.925.157,99
2020	2.595.047.554.204,28	2.565.469.218.822,12	29.578.335.382,16

Gambar 9 Perkembangan Neraca 5 Tahun Terakhir



Tabel 46 Rincian Neraca Tahun 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
Aset Lancar	255.432.695.030,48	264.164.649.848,23
Investasi Jangka Panjang	25.317.569.753,02	26.777.811.805,44
Aset Tetap	2.301.260.267.656,95	2.343.271.736.653,45
Aset Lainnya	13.037.021.763,83	10.518.843.724,05
Kewajiban Jangka Pendek	29.578.335.382,16	18.095.925.157,99
Ekuitas Dana	2.565.469.218.822,12	2.626.637.116.873,18



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar (Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya).

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Tabel 47 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
Kas di Kas Daerah	160.334.899.018,80	164.626.861.717,21
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	20.080,00
Kas BOSNAS	0,00	3.819.225.903,24
Kas di Bendahara Penerimaan	11.143.434,52	29.575.551,66
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	18.992.901.442,13	5.448.648.445,76
Kas di Kapitasi JKN	524.713.390,89	768.900.139,00
Kas di Bendahara Lainnya	7.640.690.048,09	75.085.094,00
Piutang Pajak	8.882.141.610,00	8.566.328.579,00
Piutang Retribusi	7.156.884.515,00	7.035.399.765,00
Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	5.599.795.008,00	24.904.844.346,00
Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	5.563.388.916,00	3.080.083.848,00
Bagian Lancar pinjaman kepada perusahaan daerah	0,00	82.087.000,00
Bagian Lancar pinjaman kepada pemerintah pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan perbendaharaan	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	239.418.750,00	687.960.000,00
Piutang Bunga	155.183.520,00	142.272.930,00
Piutang Lainnya	25.020.531.100,81	45.795.702.333,87



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	2020	2019
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(13.386.667.143,58)	(15.240.363.242,32)
Belanja Dibayar Dimuka	10.218.791,67	10.454.166,67
Persediaan	28.687.452.628,15	14.331.563.191,14
Jumlah	255.432.695.030,48	264.164.649.848,23

Penjelasan Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Kas di Kas Daerah	160.334.899.018,80	164.626.861.717,21

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah berupa kas yang tersimpan di RKUD (Rekening Umum Kas Daerah). Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp160.334.899.018,80 atau turun 2,61% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp164.626.861.717,21. Rincian Kas di Kas Daerah sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019
A. Giro:				
1	Bank Jatim (BPD)	141015672	160.334.899.018,80	104.626.861.717,21
2	Bank Jatim (BPD) DAK	141015681	0,00	0,00
Jumlah A			160.334.899.018,80	104.626.861.717,21
B. Deposito:				
1	Bank Jatim	BB.205.01.00	0,00	22.500.000.000,00
2	Bank BNI	0372831044	0,00	2.000.000.000,00
3	Bank BNI	0372825542	0,00	1.000.000.000,00
4	Bank BNI	0850905909	0,00	5.500.000.000,00
5	Bank BNI	0806162376	0,00	2.000.000.000,00
6	Bank Mandiri	100-01-0002047678-4	0,00	1.000.000.000,00
7	Bank Mandiri	900-01-0002047669-5	0,00	1.000.000.000,00
8	Bank Mandiri	100-01-0002047644-9	0,00	1.000.000.000,00
9	Bank Mandiri	800-05-5002052492-0	0,00	5.500.000.000,00
10	Bank BRI	0009-01-009389-40-3	0,00	2.000.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019
11	Bank BRI	0009-01-010320-40-0	0,00	7.000.000.000,00
12	Bank BRI	0009-01-010036-40-9	0,00	2.000.000.000,00
13	Bank BTN	000388-01-40-000538-9	0,00	7.500.000.000,00
Jumlah B			0,00	60.000.000.000,00
Jumlah Total (A+B)			160.334.899.018,80	164.626.861.717,21

2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>20.080,00</u>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran berupa Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU, potongan pajak dan kas transitoris sampai dengan tanggal Neraca dan tidak termasuk komponen SILPA. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.080,00. Penurunan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 disebabkan adanya reklasifikasi pengembalian kelebihan belanja yang belum disetorkan ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah) ke Kas di Bendahara Lainnya. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Keterangan
1	Kelurahan Tanjungsari	0,00	20.000,00	Sisa TU TA 2019, disetor tgl 3/01/2020, Nomor STS 900/01/410.206.4/2020
2	Kelurahan Turi	0,00	80,00	Sisa TU TA 2019, disetor tgl 8/01/2020, Nomor STS 900/02/410.207.2/2020
Jumlah		0,00	20.080,00	

3. Kas BOSNAS	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>3.819.225.903,24</u>



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas BOSNAS adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara BOSNAS. Saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.819.225.903,24 karena adanya reklasifikasi ke Kas Bendahara Lainnya. Kas BOSNAS merupakan penerimaan saldo akhir per 31 Desember 2020 yang berupa saldo di rekening bank sekolah yang diterima melalui rekening BOS sekolah. Rincian Kas BOSNAS pada UPT Satuan Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian Saldo Kas
pada Bendahara Bosnas per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam

Rupiah)

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2020	2019
1	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1	0141040936	0,00	397.868.599,83
2	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2	0141040685	0,00	164.149.658,08
3	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	0141041002	0,00	661.180.255,42
4	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4	0141041134	0,00	994.012.633,89
5	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	0141040693	0,00	239.421.141,40
6	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	0141040553	0,00	393.881.353,45
7	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	0141040545	0,00	285.693.571,67
8	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8	0141040537	0,00	321.867.546,60
9	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	0141040626	0,00	10.190.057,66
10	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tlumpu	0141040740	0,00	37.883,26
11	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 1	0141040561	0,00	63.216.515,62
12	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 2	0141040570	0,00	499.558,32
13	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 3	0141040707	0,00	7.505.914,95
14	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 1	0141040839	0,00	3.604.626,44
15	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 2	0141040774	0,00	2.461.882,77
16	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Blitar	0141040588	0,00	253.546,49
17	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 1	0141040821	0,00	2.315.882,20
18	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 2	0141040812	0,00	28.666.932,45
19	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 3	0141040791	0,00	7.257.267,37
20	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanjungsari 1	0141040618	0,00	4.201.112,23
21	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanjungsari 2	0141040782	0,00	41.848,58
22	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 1	0141040596	0,00	101.101.023,22



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2020	2019
23	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 2	0141040600	0,00	9.945.531,89
24	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 1	0141041096	0,00	10.514.101,30
25	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 2	0141040944	0,00	10.108.271,56
26	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 3	0141040928	0,00	2.386.730,62
27	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 4	0141040731	0,00	13.329.044,37
28	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanggung 1	0141040715	0,00	1.055.690,51
29	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanggung 2	0141041088	0,00	15.228,89
30	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 1	0141040863	0,00	90.544,29
31	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 2	0141041118	0,00	901.335,80
32	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngadirejo 1	0141040880	0,00	1.571.063,91
33	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngadirejo 2	0141040898	0,00	383.207,56
34	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 1	0141040804	0,00	3.239.753,23
35	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 2	0141040723	0,00	1.961.837,69
36	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 3	0141041070	0,00	40.727,15
37	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 1	0141040758	0,00	422.781,89
38	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 2	0141041061	0,00	23.034.803,36
39	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 1	0141041126	0,00	505.724,17
40	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 2	0141040642	0,00	8.036.131,08
41	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 1	0141041223	0,00	7.518.257,46
42	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 2	0141040677	0,00	128.116,13
43	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 3	0141040766	0,00	1.604.246,13
44	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 1	0141040961	0,00	1.276.414,26
45	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 2	0141040995	0,00	372.402,22
46	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 1	0141040910	0,00	65.773,98
47	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 2	0141040901	0,00	128.917,24
48	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Klampok	0141040871	0,00	598.661,09
49	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Plosokerep 1	0141040855	0,00	4.516.442,16
50	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Plosokerep 2	0141040847	0,00	173.190,54
51	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 1	0141041029	0,00	4.254.594,12
52	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 2	0141041053	0,00	10.364.446,36



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2020	2019
53	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 3	0141040979	0,00	1.474.914,82
54	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 1	0141041169	0,00	9.140.148,12
55	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 2	0141041258	0,00	533.632,19
56	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 3	0141041142	0,00	29.135,97
57	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 4	0141041193	0,00	75.289,28
Jumlah			0,00	3.819.225.903,24

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4. Kas di Bendahara Penerimaan	11.143.434,52	29.575.551,66

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2020. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.143.434,52 atau turun 62,32% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.575.551,66. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 51 Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)			
No	SKPD	2020	2019
1	BPKAD	2.906.691,00	18.807.520,00
2	Dinas Perumahan Rakyat	0,00	5.104.069,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.480.000,00	3.813.000,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00
5	RSUD Mardi Waluyo	0,00	0,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	38.743,52	1.640.962,66
7	Dinas Lingkungan Hidup	268.000,00	210.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	450.000,00	0,00
Jumlah		11.143.434,52	29.575.551,66



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. BPKAD

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jasa giro pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0055308986 Rp145.028,00 disetor tanggal 22 Februari 2021;
- b. Jasa giro pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0053545590 Rp3.859,00 disetor tanggal 22 Februari 2021;
- c. Hasil pengelolaan dana bergulir pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0053545590 Rp2.457.804 disetor tanggal 22 Februari 2021; dan
- d. Pajak Restoran PK-5 Rp300.000,00 disetor tanggal 26 Januari 2021.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Terdapat penerimaan secara tunai yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.360.000,00;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp550.000,00;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan Rp529.000,00; dan
- d. Retribusi Tempat khusus parkir Rp2.041.000,00.

Pada tanggal 4 Januari 2021 telah disetorkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Kas Daerah sebesar Rp7.480.000,00 dengan STS Nomor 900/01/410.108/2021.

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2020 yaitu Jasa Giro pada rekening penampungan dana bergulir pada:

- 1) PT BPD Jatim Tbk., yaitu:
 - nomor rekening 0143003728 sebesar Rp73,16;
 - nomor rekening 0142038773 sebesar Rp899,43;
 - nomor rekening 0142132711 sebesar Rp2.165,34;
 - nomor rekening 0142136341 sebesar Rp3.000,43;
 - nomor rekening 0142136325 sebesar Rp3.597,23;
 - nomor rekening 0142136520 sebesar Rp2.949,17;
 - nomor rekening 0142137484 sebesar Rp2.580,05;
 - nomor rekening 0142132470 sebesar Rp2.165,34;
 - nomor rekening 0142136217 sebesar Rp4.304,75; dan
 - nomor rekening 0142136333 sebesar Rp2.165,34.
- 2) PD BPR Artha Praja nomor rekening 0011001000729 Rp14.843,28.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 9 Februari 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp23.900,24 dengan Nomor STS 900/15/410.207.2/2021 dan Rp14.843,28 dengan Nomor STS 900/16/410.207.2/2020.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat penerimaan tunai atas Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp118.000,00 dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp150.000,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2020. Penyetoran dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp258.000,00 dengan Nomor STS 900/07/410.115/2021.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Terdapat penerimaan tunai atas Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp450.000,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2020. Penyetoran dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor STS 900/229/XII/410.207.2/2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	18.992.901.442,13	5.448.648.445,76

Kas di BLUD adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BLUD yang tersimpan di Bank Jatim dengan nomor rekening 0141007288 a.n. RSD Mardi Waluyo Kota Blitar. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Mardi Waluyo per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.992.901.442,13 atau naik sebesar 248,58% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.448.648.445,76. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 turun disebabkan oleh adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS dan sampai dengan akhir Tahun klaim yang terbayar masih sampai dengan Bulan Juni 2019.

Tabel 52 Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD TA 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan	Belanja
Triwulan I	32.884.650.020,66	14.972.631.866,50
Triwulan II	31.934.062.701,64	25.083.883.783,87
Triwulan III	23.976.187.009,15	19.713.940.243,02
Triwulan IV	24.640.466.308,71	40.120.657.150,40
Jumlah	113.435.366.040,16	99.891.113.043,79



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 53 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2020 dan 2019

(dalam
Rupiah)

Uraian	2020	2019
Saldo awal	5.448.648.445,76	17.177.448.413,71
Pendapatan BLUD 2020	113.435.366.040,16	95.869.457.204,43
Jumlah	118.884.014.485,92	113.046.905.618,14
Belanja BLUD (diluar APBD) 2020	(99.891.113.043,79)	(107.598.257.172,38)
Penyetoran SiLPA Ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Kas di BLUD	18.992.901.442,13	5.448.648.445,76

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6. Kas di Kapitasi JKN	524.713.390,89	768.900.139,00

Kas di Bendahara Kapitasi JKN adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada masing-masing UPT Puskesmas dan merupakan nilai keseluruhan dari Kas Tunai dan Kas Bank.

Saldo Kas di Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp524.713.390,89. Saldo Kas di Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 turun 31,76% dibandingkan dengan saldo Kas di Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp768.900.139,00. Saldo kas di Kapitasi JKN merupakan sisa dana JKN pada tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal JKN (31/12/2019)	Rp 768.900.139,00
Pendapatan Kapitasi JKN	Rp 6.146.508.600,00
Belanja	(Rp 6.390.695.348,11)
Sisa Dana JKN (31/12/2020)	Rp 524.713.390,89

Tabel 54 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per 31 Des 2019	Pendapatan	Belanja	Saldo per 31 Des 2020
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	UPT Puskesmas Sananwetan	0141031601	386.476.766,00	1.900.054.800,00	1.982.512.063,00	164.147.016,89
2	UPT Puskesmas	0141031635	346.113.145,00	2.261.812.500,00	2.484.142.249,11	263.655.882,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Sukorejo					
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	0141031571	36.310.228,00	1.984.641.300,00	1.924.041.036,00	96.910.492,00
Jumlah			768.900.139,00	6.146.508.600,00	6.390.695.348,11	524.713.390,89

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7. Kas di Bendahara Lainnya	7.640.690.048,09	75.085.094,00

Kas di Bendahara Lainnya adalah saldo kas yang tidak bisa diklasifikasikan ke akun Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Kapitasi JKN. Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp108.720.425,00. Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2020 naik 10.076,04% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp75.085.094,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 55 Rincian Kas di Bendahara Lainnya Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Nama	No Rekening	Saldo 31/12/ 2019	Saldo 31/12/ 2020
1	2	3	4	4
1.	Dinas Pendidikan			
	a. Dana PKB melalui PKP berbasis zonasi	0009-01-029493-53-3	0,00	3.351.939,00
	b. Bantuan Dana UN SMP	0141016563	0,00	18.465,47
	c. Dana SPMI, PKL, Pembinaan Kurikulum dan Sekolah Rujukan			
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 3	0142949253	0,00	16.562,26
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 2	0142383616	0,00	119.036,34
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 2	0142883635	0,00	82.692,81
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 1	0142383586	0,00	148.574,84
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 2	0009-01-014320-53-3	0,00	85.140,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 1	0009-01-029166-53-4	33.841,00	69.841,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 1	0009-01-026229-53-7	0,00	175.812,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 2	0009-01-003202-30-2	0,00	8.642,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 3	0142383578	0,00	77.812,98



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama	No Rekening	Saldo 31/12/ 2019	Saldo 31/12/ 2020
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 2	0142383535	0,00	60.420,59
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 1	0142379996	0,00	75.155,46
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 1	0142883481	0,00	262.739,94
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 2	0142882141	0,00	42.595,30
	d. Dana Tunjangan Profesi Guru	1440014060260	0,00	11.323,57
2.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1			
	Dana UKS	0009-01-003163-30-4	0,00	0,00
3.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6			
	DANA SPMI	0142399032	0,00	75.124,62
4.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7			
	DANA SPMI	0142399041	0,00	76.446,00
5.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8			
	DANA SPMI	0142399024	0,00	61.247,82
6.	BPKAD			
	Pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Tidak Terduga Covid-19, disetor tanggal 17/01/2021, STS Nomor 900/9/410.206.4/2021		10.575.000,00	0,00
7.	BPKAD			
	Pengembalian kelebihan Dana Hibah Kesekolah Swasta dan Akademi Komunitas TA 2019 , disetor tgl: - Rp5.850.000,00, pada 9/01/20, STS Nomor 900/3/410.206.4/2020 - Rp3.600.000,00, pada 9 /01/ 20, STS Nomor 900/4/410.206.4/2020 Rp400.000,00, Tanggal 27/01/20, STS Nomor 900/17/410.206.4/2020		0,00	9.850.000,00
7.	BPKAD			
	Pengembalian kelebihan pembayaran Hibah Bosda Sekolah Swasta TK Pancasila, disetor tanggal 26/01/2021, STS Nomor 900/7/410.206.4/2021		5.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama	No Rekening	Saldo 31/12/ 2019	Saldo 31/12/ 2020
8.	Dinas Lingkungan Hidup			
	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran DLH Kota Blitar dalam bentuk tunai, disetor tanggal 27/01/2021, STS Nomor 900/10/410.115/2021		930.000,00	930.000,00
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	Pengembalian kelebihan pembayaran insentif retribusi tribulan III tahun 2020, disetor tanggal 19 Maret 2021, STS Nomor 900/21/410.108/2021		52.502.000,00	0,00
10.	RSUD Mardi Waluyo			
	Penerimaan 31/12/2020 yang belum disetor ke Kas Bank BLUD		44.674.584,00	59.485.522,00
11.	Dinas Pendidikan			
	Kas di Bendahara BOSNAS		7.531.969.623,09	0,00
Jumlah			7.640.690.048,09	75.085.094,00

Saldo Kas Bendahara Lainnya sebesar Rp33.841,00 telah disetor pada tanggal 16 Maret 2021 dengan STS Nomor 900/20/410.206.3/2021.

Selanjutnya informasi terkait perhitungan saldo akhir Kas di Bendahara Lainnya di Dinas Pendidikan, UPT Satuan Pendidikan SMP 6,7 & 8 Kota Blitar disajikan pada **Lampiran 2 dan 3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8. Piutang Pajak	8.882.141.610,00	8.566.328.579,00
Piutang pajak pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan pajak daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2020. Piutang Pajak dikelola oleh BPKAD dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.846.216.177,00 atau naik 3,69% dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.566.328.579,00. Piutang Pajak dicatat berdasarkan nilai nominal ketetapan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 56 Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
		2019			2020
1	Pajak Hotel	134.430.264,00	85.201.007,00	131.822.999,00	87.808.272,00
2	Pajak Reklame	33.998.020,00	3.600.000,00	18.131.340,00	19.466.680,00
3	Pajak Rumah Makan	313.379.765,00	120.772.228,00	233.558.397,00	200.593.596,00
4	Pajak Katering	8.248.867,00	24.213.662,00	8.248.867,00	24.213.662,00
5	Pajak Hiburan	222.589.083,00	3.800.000,00	209.736.083,00	16.653.000,00
6	Pajak Air Tanah	10.070.385,00	10.333.970,00	5.788.803,00	14.615.552,00
7	Pajak Parkir	45.870.118,00	15.767.198,00	29.383.418,00	32.253.898,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	6.857.657.688,00	893.960.775,00	142.768.673,00	7.608.849.790,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	940.084.389,00	877.687.160,00	940.084.389,00	877.687.160,00
Jumlah		8.566.328.579,00	2.035.336.000,00	1.719.522.969,00	8.882.141.610,00

Pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Pajak Hotel	87.808.272,00	85.195.772,00	0,00	1.974.500,00	638.000,00
2	Pajak Reklame	19.466.680,00	3.600.000,00	0,00	0,00	15.866.680,00
3	Pajak Rumah Makan	200.593.596,00	120.772.227,00	13.571.150,00	17.392.200,00	48.858.019,00
4	Pajak Katering	24.213.662,00	24.213.662,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Hiburan	16.653.000,00	3.800.000,00	0,00	6.684.000,00	6.169.000,00
6	Pajak Air Tanah	14.615.552,00	10.333.970,00	91.080,00	228.000,00	3.962.502,00
7	Pajak Parkir	32.253.898,00	15.707.198,00	1.437.000,00	780.000,00	14.329.700,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	7.608.849.790,00	891.642.051,00	573.931.091,00	1.499.323.280,00	4.643.953.368,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	877.687.160,00	877.687.160,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.882.141.610,00	2.032.952.040,00	589.030.321,00	1.526.381.980,00	4.733.777.269,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
9. Piutang Retribusi	7.156.884.515,00	7.035.399.765,00

Piutang Retribusi pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan retribusi daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi per 31 Desember 2020. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.156.884.515,00 atau naik 1,72% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.035.399.765,00. Piutang Retribusi dicatat berdasarkan nilai nominal tagihan retribusi yang belum terealisasi per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Mutasi Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
		2019			2020
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Sewa Toko Stadion Suprijadi – Dinas Kepemudaan dan Olahraga	131.851.000,00	55.500.000,00	28.144.000,00	159.207.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.956.000,00	696.000,00	2.617.000,00	10.035.000,00
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.075.000,00	3.240.000,00	4.455.000,00	4.860.000,00
	Sewa Kios Shopping Center – Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.851.000,00	0,00	0,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	226.207.600,00	10.271.950,00	2.431.000,00	234.048.550,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.710.000,00	4.320.000,00	2.160.000,00	17.870.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.000.000,00	2.400.000,00	0,00	24.400.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.620.000,00	5.460.000,00	1.440.000,00	27.640.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi - BPKAD	10.285.000,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.008.000,00	0,00	0,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.848.000,00	0,00	0,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
		2019			2020
	Sewa Kios Terminal – Dinas Perhubungan	274.555.000,00	0,00	0,00	274.555.000,00
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit pertanian –Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.922.700,00	0,00	381.000,00	19.541.700,00
	Sewa Hunian Rusunawa – Dinas Perumahan Rakyat	286.400.000,00	73.700.000,00	26.100.000,00	334.000.000,00
	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal,TK,&PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flying Fox – Dinas Lingkungan Hidup	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.651.537.445,00	0,00	0,00	5.651.537.445,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR	6.485.000,00	29.745.000,00	17.195.000,00	19.035.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – Dinas Pekerjaan Umum	180.290.250,00	69.793.000,00	48.242.200,00	201.841.050,00
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian – Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00	0,00	0,00	2.477.770,00
6	Retribusi Ijin Trayek - Dinas Perhubungan	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Jumlah		7.035.399.765,00	255.149.950,00	133.665.200,00	7.156.884.515,00

Pengelompokan umur piutang retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Sewa Toko Stadion Suprijadi	159.207.000,00	55.500.000,00	21.956.000,00	4.800.000,00	76.951.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.035.000,00	696.000,00	7.061.000,00	2.278.000,00	0,00
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.860.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	Sewa Kios Shopping Center	44.851.000,00	0,00	0,00	0,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin	234.048.550,00	10.271.950,00	2.248.000,00	0,00	221.528.600,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang	17.870.000,00	4.320.000,00	3.240.000,00	2.700.000,00	7.610.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip	24.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud	27.640.000,00	5.460.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	19.180.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi	10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK	77.008.000,00	0,00	0,00	0,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK	41.848.000,00	0,00	0,00	0,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Sewa Kios Terminal	274.555.000,00	0,00	0,00	0,00	274.555.000,00
	Sewa Hunian Rusunawa	334.000.000,00	73.700.000,00	88.775.000,00	154.425.000,00	17.100.000,00
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit Pertanian	19.541.700,00	0,00	0,00	0,00	19.541.700,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	5.651.537.445,00	0,00	0,00	0,00	5.651.537.445,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR	19.035.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	201.841.050,00	69.793.000,00	35.279.000,00	59.594.100,00	37.174.950,00
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	2.477.770,00	0,00	0,00	0,00	2.477.770,00
6	Retribusi Ijin Trayek - Dinas Perhubungan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.156.884.515,00	244.334.950,00	160.359.000,00	224.997.100,00	6.527.193.465,00

10. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	5.599.795.008,00	24.904.844.346,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas dana bagi hasil pemerintah pusat yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.599.795.008,00 atau turun 77,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.904.844.346,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. PBB Bagian Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2019 Rp53.318.022,00;
2. PBB Bagian Daerah Sektor Kehutanan Tahun 2019 Rp2.707.800,00;
3. PBB Biaya Pemungutan Sektor Kehutanan Tahun 2019 Rp1.587.400,00;
4. PBB Bagian Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 Rp45.659.000,00;
5. PBB Biaya Pemungutan Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 Rp298.800,00;
6. PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya Tahun 2020 Rp8.604.300,00;
7. PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya Tahun 2020 Rp112.800,00;
8. PBB Bagi Rata Tahun 2020 Rp265.689.700,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9. PSDH Tahun 2020 Rp56.980.175,00;
10. Pertambangan Umum/Royalty Tahun 2020 Rp24.048.150,00;
11. DBHCHT Tahun 2020 Rp1.385.869.636,00;
12. Panas Bumi/Iuran Tetap Tahun 2020 Rp4.295.625,00;
13. Minyak Bumi Tahun 2020 Rp572.689.700,00;
14. Gas Bumi Tahun 2020 Rp9.831.900,00;
15. Perikanan Tahun 2020 Rp316.881.000,00; dan
16. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Tahun 2020 Rp2.851.221.000,00.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
11. Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	5.563.388.916,00	3.080.083.848,00

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas dana bagi hasil provinsi yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 sebesar turun sebesar 80,62% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.080.083.848,00.

Nilai Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp3.080.083.848,00 merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/646/KPTS/013/2020 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 Tanggal 29 Desember 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
12. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	82.087.000,00

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah bagian pinjaman yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00, dikarenakan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah pada PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00 telah jatuh tempo pada Tahun 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
13. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	239.418.750,00	687.960.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.418.750,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.418.750,00 turun sebesar 65,20% dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp687.960.000,00. Nilai tersebut merupakan bagian lancar dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 25 anggota DPRD Pemerintah Kota Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dengan nilai total sebesar Rp1.429.470.000,00. Nilai tersebut telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp803.393.750,00 sampai dengan TA 2020, sehingga pada 31 Desember 2020 terdapat saldo TGR sebesar Rp626.076.250,00 terdiri dari Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.418.750,00, sedangkan sisanya sebesar Rp386.657.500,00 disajikan pada Aset Lainnya. Perhitungan saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2020 disajikan pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
14. Piutang Bunga	(Rp)	(Rp)
	155.183.520,00	142.272.930,00

Saldo Piutang Bunga per 31 Desember 2020 sebesar. Saldo ini merupakan Piutang Bunga PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 dan Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002, terdiri dari Piutang Bunga yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Adapun rincian mutasi piutang bunga dan pengelompokan umur piutang sebagai berikut.

Tabel 60 Rincian Mutasi Piutang Bunga Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2020
1	2	3	4	5 (2+3-4)
Piutang Bunga PDAM	142.272.930,00	12.910.590,00	0,00	155.183.520,00
Jumlah	142.272.930,00	12.910.590,00	0,00	155.183.520,00

Tabel 61 Pengelompokan Umur Piutang Bunga per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
Piutang Bunga PDAM	155.183.520,00	12.313.050,00	12.313.050,00	36.939.150,00	93.618.270,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15. Piutang Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	25.020.531.100,81	45.795.702.333,87

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.020.531.100,81 atau turun 45,36% dibandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.795.702.333,87. Jenis piutang lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 62 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
		2019			2020
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Piutang BPJS Kesehatan Non Kapitasi	43.675.000,00	41.076.700,00	43.675.000,00	41.076.700,00
2	Piutang BLUD	40.633.125.360,00	23.064.396.507,90	40.411.203.345,00	23.286.318.522,90
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	962.253.475,93	0,00	4.917.668,29	957.335.807,64
4	Piutang Denda	3.023.918.882,00	0,00	2.919.897.528,00	104.021.354,00
5	Piutang Jasa Giro	214.203.504,14	159.294.135,25	214.203.504,14	159.294.135,25
6	Piutang Bunga Deposito	319.236.294,30	0,00	319.236.294,30	0,00
7	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	334.401.826,00	218.154.290,00	184.772.432,00	367.783.684,00
8	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD PD BPR Artha Praja	222.321.391,50	0,00	222.321.391,50	0,00
9	Piutang Persediaan	42.566.600,00	0,00	42.566.600,00	0,00
10	Piutang Pengembalian	0,00	104.700.897,02	0,00	104.700.897,02
Jumlah		45.795.702.333,87	23.587.622.530,17	44.362.793.763,23	25.020.531.100,81

Penjelasan atas piutang lainnya pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Piutang BPJS

- BPJS Kesehatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan dengan nilai piutang berdasarkan surat BPJS Kesehatan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 47/VII – 04/0121 perihal surat konfirmasi utang sebesar Rp21.397.500,00.
- BPJS Kesehatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan bulan Desember 2020 Rp19.679.200,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Piutang BLUD dikelola oleh RSUD Mardi Waluyo dengan nilai piutang berdasarkan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.393.413.522,90 terdiri dari :
 - Piutang BPJS sebesar Rp14.562.749.551,00;
 - Piutang Pasien Umum sebesar Rp235.722.746,00;
 - Piutang Bakordik (Badan Koordinasi Pendidikan) sebesar Rp110.208.000,00;
 - Piutang Jasa Raharja sebesar Rp58.145.225,90;
 - Piutang Sewa IKS pada RSUD Ngudi Waluyo sebesar Rp1.440.000,00; dan
 - Piutang Kementerian Kesehatan terkait penanganan Covid-19 sebesar Rp8.318.053.000,00 merupakan nilai perhitungan dari RSUD Mardi Waluyo yang telah mendapatkan konfirmasi dari BPJS.
3. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46 adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh BPKAD dengan nilai piutang berdasarkan Surat dari PT Bank BNI (Persero) Tbk. tanggal 7 Januari 2021 nomor BLT/7/033 perihal Data KPUK.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Bank BPR Jatim adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar dengan nilai piutang berdasarkan Laporan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar atas Nominatif Kredit KPUK Tanggal 31 Desember 2020.
4. Piutang Denda
 - Piutang denda sewa kios bedak Jl. Mayang, piutang denda sewa kios bedak Jl. Kelud, piutang denda sewa kios bedak Jl. A.Yani dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - Piutang denda sewa kios Kebonrojo dan piutang denda sewa kios stadion dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
 - Piutang denda sewa Waterpark Sumberudel dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan nilai piutang berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Agustus 2019 nomor 900/3323/410.107.3/2019 perihal Pemutusan Perjanjian Sewa Waterpark Sumber Udel Kota Blitar.
5. Piutang Jasa Giro
 - Piutang atas jasa giro pada PT BPD Jawa Timur Tbk. dengan nilai sebesar Rp159.294.135,25 dikelola oleh BPKAD. Piutang ini telah disetorkan pada rekening kas umum daerah Kota Blitar berdasarkan nota kredit Bank Jatim Cabang Blitar nomor /PB/I/2020 tanggal 4 Januari 2021 dengan nilai rincian piutang disajikan pada **Lampiran 5**.
6. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Piutang fasilitas umum berdasarkan Surat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tanggal 20 Oktober 2020 nomor 032/3829/410.206.6/2020 perihal Tagihan ke-2 Kontribusi Tahunan Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS). Surat Tagihan dibuat berdasarkan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Linggajati Al Mushowa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.
 - Piutang fasilitas rusunawa dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dengan nilai piutang berdasarkan data tunggakan listrik dan air yang belum dibayar oleh penyewa rusunawa.
7. Piutang Pengembalian merupakan piutang pengembalian atas kurang volume pekerjaan konstruksi pada :
- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - paket pengerjaan peningkatan sarana prasarana agrowisata belimbing karangsari, waterpark sumberudel, dan istana gebang tahun 2020 sebesar Rp6.313.949,27.
 - b. Dinas Perumahan Rakyat
 - paket pengerjaan pembangunan hotmix jalan semeru barat tahun 2020 sebesar Rp6.624.349,76;
 - paket pengerjaan pembangunan hotmix jalan kangean tahun 2020 sebesar Rp7.072.266,93.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - paket pengerjaan pelebaran jalan sigaran-wagir tahun 2020 sebesar Rp1.532.470,13;
 - paket pengerjaan pembuatan jalan bengawan solo-jl tanjung tahun 2020 sebesar Rp823.568,08;
 - paket pengerjaan pelebaran jalan akasia tahun 2020 sebesar Rp1.402.799,52;
 - paket pengerjaan pembuatan jalan ciliwung - jl serayu tahun 2020 sebesar Rp3.333.092,29;
 - paket pengerjaan jl teratai tahun 2020 sebesar Rp5.065.899,00;
 - paket pengerjaan pelebaran jl buru tahun 2020 Rp8.652.599,16;
 - paket pengerjaan pemeliharaan berkala jl melati tahun 2020 Rp48.205.185,55;
 - paket pengerjaan pemeliharaan berkala jl mahakam tahun 2020 Rp15.674.717,47.

Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2020 secara detail dan pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar disajikan pada **Lampiran 6 dan Lampiran 7**.

Piutang Lainnya pada RSUD Mardiwaluyo berupa Piutang Jamkesda dan Piutang Penanganan Covid-19 pada Laporan Keuangan BLUD RSUD Mardi Waluyo per 31 Desember 2020 sebesar Rp372.930.766,00 tidak dimunculkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi karena merupakan piutang antar SKPD.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2020 (Rp) (13.386.667.143,58)	31 Desember 2019 (Rp) (15.240.363.242,32)
-------------------------------------	---	---

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pengelompokan umur Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat, Piutang Bagi Hasil Pemerintah Provinsi, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya, dan Piutang Bunga PDAM per 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp(13.386.667.143,58) atau naik 12,16% dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp(15.240.363.242,32). Hal ini dikarenakan banyaknya piutang yang umurnya lebih dari 3 dan 5 Tahun belum dilunasi sehingga mengakibatkan besarnya kenaikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih di Tahun 2020. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana tabel berikut:

Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Umur Piutang			
		2020	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
A.	Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 3 Tahun		0 s.d 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
1	Piutang Retribusi	7.156.884.515,00	244.334.950,00	160.359.000,00	224.997.100,00	6.527.193.465,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.655.727.915,00	0,00	16.035.900,00	112.498.550,00	6.527.193.465,00
B.	Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 5 Tahun		0 s.d 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
2	Piutang Pajak	8.882.141.610,00	2.032.952.040,00	589.030.321,00	1.526.493.980,00	4.733.665.269,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.555.815.291,10	0,00	58.903.032,10	763.246.990,00	4.733.665.269,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	5.599.795.008,00	5.599.795.008,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	5.563.388.916,00	5.563.388.916,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo	Umur Piutang			
		2020	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	239.418.750,00	239.418.750,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Lainnya	25.020.531.100,81	23.737.795.288,43	139.482.106,00	190.794.259,00	952.459.447,38
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.061.804.787,48	0,00	13.948.210,60	95.397.129,50	952.459.447,38
7	Piutang Bunga PDAM	155.183.520,00	12.313.050,00	12.313.050,00	36.939.150,00	93.618.270,00
	% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	113.319.150,00	0,00	1.231.305,00	18.469.575,00	93.618.270,00
Jumlah Piutang		52.617.343.419,81	37.429.998.002,43	901.184.477,00	1.979.224.489,00	12.306.936.451,38
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		13.386.667.143,58	0,00	90.118.447,70	989.612.244,50	12.306.936.451,38
Net Realizable Value (NRV)		39.230.676.276,23	37.429.998.002,43	811.066.029,30	989.612.244,50	0,00

Penyajian umur piutang yang perlu diketahui nilai detail per Tahun khususnya Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya disajikan pada Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.

17.	Belanja Dibayar di Muka	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		10.218.791,67	10.454.166,67

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.218.791,67 atau turun 2,25% dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.454.166,67, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	187.500,00	187.500,00
2	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika	7.366.666,67	5.600.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.164.625,00	4.666.666,67
4	Dinas Ketahanan Pangan	1.500.000,00	0,00
	Jumlah	10.218.791,67	10.454.166,67

Tabel 65 Perhitungan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2020
(dalam

Rupiah)

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Belanja Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
1.	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Surat perjanjian Nomor 032/C-03/ATN/IV/2020	750.000,00	187.500,00	562.500,00	24 Maret 2019 s/d 24 Maret 2021
		Pembayaran belanja domain/hosting alamat web smpn1blitar.sch.id sesuai SP2D Nomor 02759/LS BL tanggal 8 April 2020				
2.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika	BAST Nomor 027.2/3.2.16.2/410.105.2/2020	11.200.000,00	4.666.666,67	6.533.333,33	2 Juni 2020 s/d 8 Juni 2021
		Pembayaran Belanja Sewa Layanan Google Playstore dan Google Routes sesuai SP2D Nomor 222/LS/DAU tanggal 6 Oktober 2020				
		BAST Nomor 3.1.2/3.1.26.2/410.105.2/020	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	Juni 2020 s/d Pebruari 2021
		Pembayaran belanja sewa C-Panel sesuai SP2D Nomor 276/LS/DBHPBP tanggal 6 Juli 2020				
		BAST Nomor 3.1.2/3.1.25.2/410.105.2/020	8.450.000,00	700.000,00	7.750.000,00	Juni 2020 s/d Pebruari 2021
		Pembayaran belanja Sewa Zoom Cloud Meeting sesuai SP2D Nomor 278/LS/DBHPBP				



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Belanja Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
		tanggal 7 Juli 2020				
3.	Dinas Pariwisata	BAST Nomor 027/14/PPKom/410.107.3/ 2020	1.996.500,00	1.164.625,00	831.875,00	30 Juli 2020 s/d 30 Juli 2021
		Pembayaran belanja sewa domain/hosting website sesuai SP2D Nomor 08667/LSBL tanggal 15 September 2020				
4.	Dinas Ketahanan Pangan	Nota Pengiriman No. 20121/X/2020	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Oktober 2020 s/d September 2021
		Sewa hosting dan domain http://simastahanpenak.co m sesuai SP2D Nomor 09822/LSBL tanggal 8 Oktober 2020				
Jumlah			33.396.500,00	10.218.791,67	23.177.708,33	

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
18. Persediaan	<u>28.687.452.628,15</u>	<u>14.331.563.191,14</u>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.687.452.628,15 tersebut terdiri dari:

Tabel 66 Daftar Persediaan per 31 Desember 2020
(dalam

Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	2020	2019	Naik / Turun (Rp)	Naik /Turun (%)
-----	------------------	------	------	-------------------	-----------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Persediaan	2020	2019	Naik / Turun (Rp)	Naik / Turun (%)
1	Persediaan Alat Tulis kantor	686.911.599,00	504.278.652,00	182.632.947,00	36,22
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering, stop kontak/plugs/soket, kabel)	184.024.750,00	386.480.137,00	(202.455.387,00)	(52,38)
3	Persediaan Perangko, Materai, dan benda Pos Lainnya	150.000,00	233.500,00	(83.500,00)	(35,76)
4	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih/Alat RT	202.835.751,00	264.033.255,00	(61.197.504,00)	(23,18)
5	Persediaan bahan bakar minyak/gas/ pelumas	13.383.000,00	0,00	13.383.000,00	0,00
6	Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	0,00
7	Persediaan Pengisian Tabung Gas	800.000,00	1.705.000,00	(905.000,00)	(53,08)
8	Persediaan Bahan Pengharum Ruangan	674.000,00	435.000,00	239.000,00	54,94
9	Persediaan perlengkapan upacara (bunga tabur,ronce,karangan bunga pita,lilin)	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
10	Persediaan Penghargaan	5.403.000,00	12.440.000,00	(7.037.000,00)	(56,57)
11	Persediaan Dokumentasi	0,00	67.455.000,00	(67.455.000,00)	(100,00)
12	Persediaan Publikasi	88.875.500,00	70.148.900,00	18.726.600,00	26,70
13	Persediaan Peralatan rumah tangga pakai habis	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00
14	Persediaan Bahan Baku Bangunan	234.027.050,00	94.664.160,00	139.362.890,00	147,22
15	Persediaan Bahan/bibit Tanaman	111.059.500,00	221.510.800,00	(110.451.300,00)	(49,86)
16	Persediaan Bibit Ternak	27.120.000,00	23.268.750,00	3.851.250,00	16,55
17	Persediaan Bahan Obat-obatan	8.941.586.444,40	6.467.352.825,23	2.474.233.619,17	38,26
18	Persediaan Bahan Kimia	6.326.299.313,81	1.053.223.658,20	5.273.075.655,61	500,66
19	Persediaan Bahan Praktek dan Percontohan	4.347.000,00	100.000,00	4.247.000,00	4247,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Persediaan	2020	2019	Naik / Turun (Rp)	Naik / Turun (%)
20	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman	182.003.087,50	83.647.355,50	98.355.732,00	117,58
21	Persediaan Bahan Kesehatan	9.767.792.653,69	2.801.434.875,12	6.966.357.778,57	248,67
22	Persediaan Makanan dan Minuman Ternak/Hewan	331.400,00	18.000,00	313.400,00	1741,11
23	Persediaan Pembungkus (Plastik/Kertas/Dus/Kaleng)	5.983.500,00	2.798.890,00	3.184.610,00	113,78
24	Persediaan Pembungkus Obat/Farmasi/Bahan Kimia	548.200,00	8.259.000,00	(7.710.800,00)	(93,36)
25	Persediaan Cetak	927.470.728,75	909.618.993,75	17.851.735,00	1,96
26	Persediaan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.651.020,00	11.651.020,00	0,00	0,00
28	Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
29	Persediaan Atribut Pakaian Dinas	25.043.480,00	15.208.480,00	9.835.000,00	64,67
30	Persediaan pakaian kerja lapangan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00
31	Persediaan Perlengkapan dan atribut pakaian kerja lapangan	0,00	214.000,00	(214.000,00)	(100,00)
32	Persediaan pakaian batik tradisional/bercorak kesenian	1.943.700,00	1.943.700,00	0,00	0,00
33	Persediaan pakaian olahraga	11.881.600,00	11.881.600,00	0,00	0,00
34	Persediaan pakaian pasien	0,00	14.790.000,00	(14.790.000,00)	(100,00)
35	Persediaan perlengkapan dan atribut pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
36	Persediaan Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	365.239.000,00	365.239.000,00	0,00	0,00
37	Persediaan Barang/Jasa Selain Hibah dan Bansos Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	537.884.350,00	642.365.239,34	(104.480.889,34)	(16,27)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Persediaan	2020	2019	Naik / Turun (Rp)	Naik / Turun (%)
38	Persediaan Materi Pendidikan Siswa	0,00	46.785.750,00	(46.785.750,00)	(100,00)
39	Persediaan pakaian seragam siswa	0,00	201.047.000,00	(201.047.000,00)	(100,00)
40	Persediaan sepatu siswa	0,00	696.850,00	(696.850,00)	(100,00)
41	Persediaan pakaian olah raga/training/kaos siswa	0,00	39.068.800,00	(39.068.800,00)	(100,00)
42	Persediaan ikat pinggang/sabuk siswa	0,00	595.000,00	(595.000,00)	(100,00)
43	Persediaan kaos kaki siswa	0,00	1.120.000,00	(1.120.000,00)	(100,00)
44	Persediaan tas siswa	0,00	495.000,00	(495.000,00)	(100,00)
Jumlah		28.687.452.628,15	14.331.563.191,14	14.355.889.437,01	100,17

Untuk Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 terlampir pada **Lampiran 11 s/d Lampiran 17** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Blitar menerima Hibah Persediaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp6.801.556.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Persediaan Cetak (blanko KTP elektronik) senilai Rp232.562,00
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai total Rp82.915.200,00 berupa Persediaan Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp82.424.000,00 terdiri dari :
 - Obat-obatan Rp1.321.600,00
 - Bahan Kesehatan Rp77.882.400,00
 - Pakaian Kerja Lapangan Rp1.120.000,00
 - Perlengkapan dan Atribut Pakaian Kerja Lapangan Rp2.100.000,00
- d. Dinas Kesehatan senilai Rp6.204.271.206,00 berupa:
 - Obat-obatan Rp1.494.787.860,00
 - Bahan Kesehatan Rp4.709.483.346,00
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp186.088.500,00 berupa bahan kesehatan
- f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp7.045.600,00 berupa bahan kesehatan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp6.250.000,00 berupa bahan Kesehatan.

Pemerintah Kota Blitar juga menerima bantuan hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMN senilai Rp1.758.295.460,00 dengan rincian :

1. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Rp30.745.000,00 berupa 25 buah *Hand Sprayer* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo Rp21.780.000,00 berupa bahan kesehatan dari PT Petrokimia Gresik.
3. RSUD Mardi Waluyo Rp1.705.770.460,00.

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Investasi Non Permanen				
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	860.706.000,00	778.619.000,00	82.087.000,00	10,54
	Investasi Dana Bergulir	5.750.891.355,58	5.770.710.967,67	(19.819.612,09)	(0,34)
	Penyisihan Piutang (Investasi Non Permanen) Tak Tertagih	(4.581.968.921,81)	(4.517.718.707,27)	(64.250.214,54)	1,42
	Jumlah Investasi Nonpermanen	2.029.628.433,77	2.031.611.260,40	(1.982.826,63)	(0,10)
2	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.287.941.319,25	24.746.200.545,04	(1.458.259.225,79)	(5,89)
	Jumlah Investasi	23.287.941.319,25	24.746.200.545,04	(1.458.259.225,79)	(5,89)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian Permanen	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah Total	25.317.569.753,02	26.777.811.805,44	(1.460.242.052,42)	(5,45)

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.317.569.753,02 mengalami penurunan sebesar Rp1.460.242.052,42 atau 5,45% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.777.811.805,44. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana tabel diatas dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Investasi Non Permanen	2.029.628.433,77	2.031.611.260,40

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.029.628.433,77 mengalami penurunan sebesar Rp1.982.826,63 atau turun 0,10% dibandingkan dengan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.031.611.260,40 . Investasi Non Permanen Tahun 2020 berupa Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp860.706.000,00 dan Investasi pada Dana Bergulir dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.750.891.355,58. *Net Realizable Value (NRV)* Investasi Non Permanen disajikan sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	860.706.000,00	778.619.000,00	82.087.000,00	10,54
Investasi Dana Bergulir	5.750.891.355,58	5.770.710.967,67	(19.819.612,09)	(0,34)
Jumlah Investasi (Harga Perolehan)	6.611.597.355,58	6.549.329.967,67	62.267.387,91	0,95
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(582.431.070,00)	(500.344.070,00)	(82.087.000,00)	16,41
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(3.999.537.851,81)	(4.017.374.637,27)	17.836.785,46	(0,44)
Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih	(4.581.968.921,81)	(4.517.718.707,27)	(64.250.214,54)	1,42
Net Realizable Value (NRV)	2.029.628.433,77	2.031.611.260,40	(1.982.826,63)	(0,10)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan rinci atas Investasi Non Permanen adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	(Rp)	(Rp)
	860.706.000,00	778.619.000,00

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah merupakan Pinjaman kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 dengan nilai pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 yang telah dilunasi sebesar Rp492.164.000,00 sehingga nilai pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.836.000,00.
2. Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00 yang mana belum ada pelunasan sampai dengan 31 Desember 2020.

Nilai Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2020 Rp860.706.000,00 mengalami kenaikan dari 31 Desember 2019 sebesar Rp778.619.000,00 yaitu sebesar 10,54% dikarenakan Reklasifikasi Bagian Lancar Pinjaman Daerah per 31 Desember 2019 yang jatuh tempo pada Tahun 2020 ke Investasi Non Permanen. Rincian mutasi pinjaman kepada perusahaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2020	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2020
I. PERJANJIAN NO 23/2002					
1	31/12/2011	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
2	31/12/2012	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
3	31/12/2013	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
4	31/12/2014	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
5	31/12/2015	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
6	31/12/2016	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
7	31/12/2017	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
8	31/12/2018	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
9	31/12/2019	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
10	31/12/2020	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2020	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2020
	Jumlah	820.870.000,00	0,00	820.870.000,00	0,00
II. PERJANJIAN NO 6/2001					
1	31/12/2006	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
2	31/12/2007	106.400.000,00	15.000.000,00	91.400.000,00	0,00
3	31/12/2008	106.400.000,00	212.164.000,00	(105.764.000,00)	0,00
4	31/12/2009	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
5	31/12/2010	106.400.000,00	225.000.000,00	(118.600.000,00)	0,00
6	31/12/2011	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00
7	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	532.000.000,00	492.164.000,00	39.836.000,00	0,00
	Total	1.352.870.000,00	492.164.000,00	860.706.000,00	0,00

Pada Tanggal 8 Juni 2020 telah diajukan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor 903/192/410.400.01/2020 perihal permohonan penyelesaian pinjaman PDAM kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar. Surat tersebut menyatakan bahwa rencana pelunasan sisa pinjaman Tahap I berdasarkan perjanjian Nomor 6 Tahun 2001 sebesar Rp39.836.000,00 dan permohonan penyesuaian pinjaman Tahap II berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 sebesar Rp820.870.000,00 menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar kepada PDAM mengingat kondisi keuangan PDAM Kota Blitar masih mengalami kerugian.

2. Investasi Dana Bergulir	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	<u>5.750.891.355,58</u>	<u>5.770.710.967,67</u>



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Nilai Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.750.891.355,58 atau turun 0,34% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.770.710.967,67. Rincian Investasi Dana bergulir pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp95.030.000,00

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.030.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 dengan kategori macet dikarenakan peminjam sebagian besar tidak berdagang lagi pada kios pasar sehingga sulit ditelusuri keberadaannya, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar

yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar sebesar Rp40.071.250,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/1245/410.010.3/2020 atau Nomor : 251/ KRD/BPR/BLT/2020 tentang Pengelolaan Kredit Modal Kerja Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil yang merupakan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 7 Tahun 2006 atau Nomor : 601/KRD/BLT/2006 yang telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 100 Tahun 2007 atau Nomor : 061/KRD/BLT/2007 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 3 Tahun 2013 atau Nomor : 0486/KRD/BPR/BLT/2013 dan telah diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 08 Tahun 2017 atau Nomor : 91/KRD/BPR/BLT/2017. Nilai Investasi dana bergulir pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.071.250,00 yang merupakan nilai pokok pinjaman yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.071.250,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 dengan kategori macet dikarenakan peminjam telah berusia lanjut dan tidak berdagang lagi, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) melalui Bank BNI yang dikelola oleh BPKAD sebesar Rp550.000.000,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan Bank BNI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Terakhir Nomor 1097 Tahun 2020 tanggal 20



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Maret 2020 tentang Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dan pembaruan Perjanjian Penyaluran dan Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 1 A Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan sekaligus menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 19 Maret 2020 serta pelaksanaan selanjutnya. Pengelolaan pinjaman KPUK dilaksanakan melalui dua rekening BNI, yakni rekening Nomor 0055308986 yang digunakan untuk menampung dana pokok dan pengembalian pokok pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.410.881,00 serta rekening nomor 0053545590 yang digunakan untuk menampung pendapatan bunga pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.461.663,00.

Sisa saldo pokok pinjaman KPUK – Bank BNI pada 31 Desember 2020 sama dengan saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp550.000.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 70 Investasi Dana Bergulir pada BPKAD

(dalam

Rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo di rekening 0055308986	37.410.881,00	31.696.833,00	5.714.048,00	18,03
Tunggakan pokok (baki debet)	512.734.147,00	518.395.657,00	(5.661.510,00)	(1,09)
Jasa Giro di rekening 0055308986	(145.028,00)	(92.490,00)	(52.538,00)	56,80
Jumlah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00

4. Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM sebesar Rp5.065.790.105,58.

Saldo per 31 Desember 2020 adalah Rp5.065.790.105,58 atau turun 0,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.085.609.717,67 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 71 Daftar Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

(dalam Rupiah)

No	Jenis Perguliran	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	UM	3.896.727.463,98	3.914.877.076,06	(18.149.612,08)	(0,46)
2	Koperasi	1.169.062.641,60	1.170.732.641,61	(1.670.000,01)	(0,14)
	Jumlah	5.065.790.105,58	5.085.609.717,67	(19.819.612,09)	(0,39)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp4.489.104,98. Nilai tersebut terdiri dari:

- Rp 38.743,52 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi dan UM Tahun 2020 yang belum disetorkan sebagai Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penyetoran dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp11.282.719,00 dengan Nomor STS 02/01/2021 dan Rp33.391.865,00 dengan Nomor STS 01/1/2021; dan
- Rp 4.450.361,46 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
3. Penyisihan Investasi	(Rp)	(Rp)
Non Permanen Tak Tertagih	(4.581.968.921,81)	(4.517.718.707,27)

Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih terdiri dari penyisihan investasi tak tertagih atas pinjaman kepada perusahaan daerah dan penyisihan investasi tak tertagih atas investasi dana bergulir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 72 Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(582.431.070,00)	(500.344.070,00)
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(3.999.537.851,81)	(4.017.374.637,27)
Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih	(4.581.968.921,81)	(4.517.718.707,27)

Perhitungan atas penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2020 atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Klasifikasi Penyisihan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (PDAM)

(dalam Rupiah)

Uraian	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	Jatuh tempo pada periode > 2 s.d 3 Tahun	Jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	Jumlah
Pinjaman	164.174.000,00	82.087.000,00	82.087.000,00	532.358.000,00	860.706.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	Jatuh tempo pada periode > 2 s.d 3 Tahun	Jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	Jumlah
kepada Perusahaan Daerah (PDAM)					
% penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	820.870,00	8.208.700,00	41.043.500,00	532.358.000,00	582.431.070,00
Net Realizable Value (NRV)	163.353.130,00	73.878.300,00	41.043.500,00	0,00	278.274.930,00

Perhitungan atas nilai bersih Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dengan mengelompokkan investasi yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*) yaitu jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun sebesar Rp164.174.000,00, jatuh tempo pada periode >2 s.d 3 Tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun sebesar Rp532.358.000,00.

Perhitungan atas penyisihan Investasi Dana Bergulir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Klasifikasi Penyisihan Investasi Non Permanen
(Investasi Dana Bergulir Tahun 2020)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
A.	Investasi Dana Bergulir						
1	Pemberdayaan Masyarakat Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	95.030.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2	Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071.250,00	40.071.250,00
3	Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil melalui BNI 46	37.265.853,00	0,00	0,00	0,00	512.734.147,00	550.000.000,00
4	Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.790.105,58	5.065.790.105,58
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	37.265.853,00	0,00	0,00	0,00	5.713.625.502,58	5.750.891.355,58
	% penyisihan	0%	5%	15%	40%	70%	
	Penyisihan investasi dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.537.851,81	3.999.537.851,81
	Net Realizable Value (NRV)	37.265.853,00	0,00	0,00	0,00	1.714.087.650,77	1.751.353.503,77

Berdasarkan tabel di atas, penyajian Investasi Dana Bergulir dalam kategori lancar sebesar Rp37.265.853,00 kategori dalam perhatian khusus Rp0,00, kategori kurang lancar sebesar Rp0,00, kategori diragukan sebesar Rp0,00 dan kategori macet sebesar Rp5.713.625.502,58. Rincian atas Investasi Dana Bergulir terlampir pada **Lampiran 18** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2. Investasi Permanen	23.287.941.319,25	24.746.200.545,04

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen ini dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan Modal pada



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PDAM dan PD BPR Artha Praja. Sedangkan Penyertaan modal pada PT Bank Jatim masih menggunakan metode biaya (*Cost Method*).

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.287.941.319,25 atau turun 5,89% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.746.200.545,04 .

Rincian saldo Investasi Permanen dibandingkan dengan Tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 75 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim - Metode Biaya	4.246.771.000,00	4.246.771.092,11
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM - Metode Ekuitas	10.244.795.518,75	10.977.548.550,93
3	Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja -Metode Ekuitas	8.796.374.800,50	9.521.880.902,00
Jumlah		23.287.941.319,25	24.746.200.545,04

Penjelasan rinci atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Pemerintah Daerah	(Rp)	(Rp)
pada PT Bank Jatim	4.246.771.000,00	4.246.771.092,11

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.246.771.000,00 terkoreksi Rp92,11 dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.246.771.092,11. Nilai tersebut merupakan penyertaan modal sebanyak 16.987.084 lembar saham berdasarkan Surat Kolektif Saham Bank Jatim tanggal 10 Juli 2012. Penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Blitar menerima manfaat ekonomis dari investasi tersebut berupa dividen sebesar Rp818.777.448,80 atas bagian laba Tahun buku 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun an Tahun Buku 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tanggal 26 April 2019 No 99.

Penyertaan Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2. Pemerintah Daerah	(Rp)	(Rp)
pada PDAM	10.244.795.518,75	10.977.548.550,93



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.244.795.518,75. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM turun sebesar 6,68% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.977.548.550,93. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dihitung dengan menggunakan Metode Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

d. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar	Rp	
	32.782.368.963,58	
s/d Tahun 2018		
e. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar		Rp
	2.500.000.000,00	
pada Tahun 2019		
f. Penyertaan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp	
	5.981.471.897,50	
g. Hibah Pemerintah Provinsi Jatim	Rp	
	1.033.276.800,00	
h. Hibah Pemerintah Kota Blitar	<u>Rp</u>	
	<u>214.753.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Kota Blitar	Rp	42.511.870.661,08
1) Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	Rp	
(170.297.497,00)		
2) Rugi s.d 31 Desember 2020	Rp	
(31.364.024.613,15)		
3) Rugi Tahun 2020	<u>Rp</u>	
<u>(732.753.032,18)</u>		
Jumlah Ekuitas pada PDAM	Rp	
10.244.795.518,75		

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.511.870.661,08 terdiri dari modal pendirian dan pembangunan sarana prasarana pengelolaan air minum. Pada Tahun 2019 telah dicairkan penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 24554/LS PEMBIAYAAN DAU tanggal 23 Desember 2019.

Sumber pencatatan penyertaan modal kepada PDAM diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp32.782.368.963,58, berdasarkan:



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-
- a) Hibah Non Kas dari Pusat atas utang PDAM sebesar Rp19.284.423.541,58 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 - b) Penyertaan modal dari penyetoran ke PDAM sebesar Rp13.497.945.422,00.
 - 2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar ke PDAM pada Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 24554/LS PEMBIAYAAN DAU Tanggal 23 Desember 2019.
 - 3) Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.981.471.897,50, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Penyerahan Proyek Dari Walikota Blitar kepada Direktur Utama PDAM Nomor 024/26/422.021/2000 Tanggal 22 Juni 2000 nilai atas penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp5.715.623.000,00;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 02/BAST/PK-PAM.JT/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp167.917.200,00;
 - c) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp97.931.697,50.
 - 4) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.033.276.800,00, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 29/BAST/PK-PAM.JT/2008 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp258.744.200,00;
 - b) BAST Pengelolaan Sementara Hasil Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Blitar Nomor 602.1/750/121/PP/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Prasarana Perkotaan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur TA 2004 kepada Plt. Direktur Utama PDAM sebesar Rp645.389.800,00;
 - c) Surat perintah mengeluarkan barang Tanggal 29 April dan 11 Mei 2011 atas pekerjaan SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur di Kota Blitar sebesar Rp31.142.800,00;
 - d) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp98.000.000,00.
 - 5) Hibah dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp214.753.000,00, berdasarkan:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Dokumen bantuan instalasi perpompaan sesuai SK Walikota Blitar Nomor 188/249/HK/422.010/06 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp38.500.000,00;
- b) Proposal Bantuan Renovasi Gedung Kantor PDAM Pagar Pengaman, Pengadaan—Meubelair pada Tahun 2011 sebesar Rp176.253.000,00.

3. Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	8.796.374.800,50	9.521.880.902,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Artha Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.796.374.800,50. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Artha Praja turun sebesar 7,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.521.880.902,00. Penurunan ini disebabkan BPR Artha Praja Kota Blitar mengalami kerugian pada Tahun 2020 sebesar Rp586.223.080,00.

Perusahaan Daerah BPR Artha Praja Kota Blitar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Juli 2004. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Kepemilikan modal Pemerintah Kota Blitar pada BPR Artha Praja adalah 100% sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2020	Rp	8.000.000.000,00
2) Akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2020	Rp	796.374.800,50
Nilai Investasi per 31 Desember 2020	Rp	8.796.374.800,50

Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2020 dirinci sebagai berikut:

1) Investasi awal Tahun 2004	Rp	1.000.000.000,00
2) Penambahan modal Tahun 2010	Rp	250.000.000,00
3) Penambahan modal Tahun 2012	Rp	750.000.000,00
4) Penambahan modal Tahun 2015	Rp	1.500.000.000,00
5) Penambahan modal Tahun 2016	Rp	2.000.000.000,00
6) Penambahan modal Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
7) Penambahan modal Tahun 2018	Rp	1.500.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	Rp 8.000.000.000,00
Sedangkan akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2020 dirinci sebagai berikut:	
1) Cadangan Umum	Rp 802.459.636,00
2) Cadangan Tujuan	Rp 802.459.636,00
3) Rugi per 31/12/2020	Rp (586.223.080,00)
4) Pembagian Dividen untuk Daerah	Rp (222.321.391,50)
Jumlah	Rp 796.374.800,50

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Blitar menerima manfaat ekonomis dari investasi tersebut berupa dividen sebesar Rp222.321.391,50 atas bagian laba Tahun 2019.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah guna menjamin kepastian, ketepatan dalam pencatatan dan akurasi data sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah maupun PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah akan dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar.

Tabel 76 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2020
1	Tanah	1.241.309.792.331,00	11.787.295.320,00	12.806.796.000,00	1.240.290.291.651,00
2	Peralatan dan Mesin	462.624.820.786,92	58.980.340.002,25	7.187.705.856,80	514.417.454.932,37
3	Gedung dan Bangunan	812.529.119.338,04	28.856.135.932,72	6.132.826.904,68	835.252.428.366,08
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	748.545.212.935,91	27.709.533.810,72	1.275.970.171,75	774.978.776.574,88
5	Aset Tetap lainnya	36.806.720.619,34	3.321.545.800,81	1.142.160.640,81	38.986.105.779,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.817.496.055,00	4.050.603.355,41	923.585.236,41	11.944.514.174,00
7	Akumulasi Penyusutan	(967.361.425.412,76)	(147.924.581.780,26)	(676.703.372,30)	(1.114.609.303.820,72)
Jumlah Aset Tetap		2.343.271.736.653,45	(13.219.127.558,35)	28.792.341.438,15	2.301.260.267.656,95

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.301.260.267.656,95 atau turun sebesar 15,22% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.343.271.736.653,45. Selanjutnya informasi terkait rincian Aset



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 19** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Rincian Aset Tetap per jenis aset adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Tanah	<u>1.240.290.291.651,00</u>	<u>1.241.309.792.331,00</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.240.290.291.651,00 atau turun 0,08% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.241.309.792.331,00. Rincian mutasi Tanah Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp 1.241.309.792.331,00**

Mutasi Tambah:

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2020 | Rp | 627.630.320,00 |
| 2. Hibah APBN berupa tanah situs candi gedog di Kecamatan Sananwetan | Rp | 126.825.000,00 |
| 3. Koreksi pencatatan tanah yang belum tercatat pada simbada sebesar Rp11.032.840.000,00 pada : | | |
| a. Dinas Pendidikan berupa tanah SDN Sananwetan IV | Rp | 5.578.846.000,00 |
| b. Dinas Pemuda dan Olahraga berupa tanah pada GOR Soekarno Hatta | Rp | 5.453.994.000,00 |

Jumlah	Rp	11.787.295.320,00
---------------	-----------	--------------------------

Mutasi Kurang:

- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Penghapusan tanah eks RSUD Mardi Waluyo di Jl. Dr. Soetomo Blitar karena dihibahkan ke Dirjen Dikti sesuai dengan SK Nomor : 188.4 / 4 / KEP / 410.010.2 / 2020 | Rp | 12.806.796.000,00 |
|--|----|-------------------|

Jumlah	Rp	12.806.796.000,00
---------------	-----------	--------------------------

Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Tanah	Rp	(1.019.500.680,00)
--	-----------	---------------------------

Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	1.240.290.291.651,00
---	-----------	-----------------------------

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	<u>514.417.454.932,37</u>	<u>462.624.820.786,92</u>



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp514.417.454.932,37 atau naik 11,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp462.624.820.786,92. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 462.624.820.786,92

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2020 Rp 48.384.461.472,20
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020 Rp 3.276.036.168,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.445.075.299,00 antara lain :
 - a. Reklasifikasi wastafel sebesar Rp1.571.374.450,00 pada :
 - Dinas Pendidikan Rp 83.721.800,00
 - UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rp 8.750.000,00
 - UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Rp 35.956.000,00
 - UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Rp 44.972.000,00
 - UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Rp 10.000.000,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp 53.066.000,00
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Rp 4.495.000,00
 - Dinas Perhubungan Rp 6.623.200,00
 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Rp 6.600.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja Rp 3.935.000,00
 - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 44.355.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 49.577.050,00
 - Dinas Kesehatan Rp 90.600.000,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Rp 228.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Dinas Sosial	Rp	4.750.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.997.400,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	Rp	8.760.000,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	23.100.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	39.000.000,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	119.841.000,00
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	18.498.700,00
- Bagian Umum	Rp	50.090.000,00
- Sekretariat DPRD	Rp	11.682.000,00
- Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	10.000.000,00
- Kecamatan Sukorejo	Rp	18.800.000,00
- Kecamatan Sananwetan	Rp	1.600.000,00
- Kelurahan Ngadirejo	Rp	17.500.000,00
- Kelurahan Sentul	Rp	17.600.000,00
- Kelurahan Kauman	Rp	20.800.000,00
- Kelurahan Tanggung	Rp	23.000.000,00
- Kelurahan Bendo	Rp	17.000.000,00
- Kelurahan Kepanjenlor	Rp	14.729.300,00
- Kelurahan Kepanjenkidul	Rp	25.800.000,00
- Kelurahan Pakunden	Rp	19.800.000,00
- Kelurahan Blitar	Rp	18.000.000,00
- Kelurahan Tlumpu	Rp	22.400.000,00
- Kelurahan Turi	Rp	10.800.000,00
- Kelurahan Karang Sari	Rp	25.200.000,00
- Kelurahan Sukorejo	Rp	35.200.000,00
- Kelurahan Tanjungsari	Rp	23.400.000,00
- Kelurahan Gedog	Rp	54.400.000,00
- Kelurahan Plosokerep	Rp	18.000.000,00
- Kelurahan Klampok	Rp	21.700.000,00
- Kelurahan Sananwetan	Rp	134.075.000,00
- Kelurahan Rembang	Rp	12.000.000,00
- Kelurahan Karangtengah	Rp	24.000.000,00
- Kelurahan Bendogerit	Rp	35.200.000,00
b. Reklasifikasi tandon air pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	1.500.000,00
c. Reklasifikasi tiang bendera	Rp	23.200.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-
-
- | | | |
|---|----|----------------|
| pada Dinas Perumahan Rakyat | | |
| d. Reklasifikasi lampu operasi, dan bracked lampu operasi pada RSUD Mardi Waluyo | Rp | 333.284.000,00 |
| e. Reklasifikasi pintu elektrik pada Bagian Umum | Rp | 30.170.000,00 |
| f. Reklasifikasi kursi roda pada Kecamatan Kepanjenkidul | Rp | 2.500.000,00 |
| g. Reklasifikasi papan nama pada Kelurahan Plosokerep | Rp | 12.000.000,00 |
| h. Reklasifikasi rambu-rambu pada Dinas Perhubungan | Rp | 461.507.474,00 |
| i. Reklasifikasi tenda pada Satuan Polisi Pamong Praja | Rp | 9.539.375,00 |
| | | |
| 4. Reklasifikasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin BOS dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.314.000,00 pada : | | |
| a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 | Rp | 10.000.000,00 |
| b. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 | Rp | 13.000.000,00 |
| c. Dinas Pendidikan (SD di kota blitar) | Rp | 25.314.000,00 |
| | | |
| 5. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp122.340.000,00 pada : | | |
| a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 | Rp | 111.640.000,00 |
| b. Dinas Pendidikan (SD di kota blitar) | Rp | 10.700.000,00 |
| | | |
| 6. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp901.548.791,00 pada : | | |
| a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 berupa meja tennis | Rp | 7.090.000,00 |
| b. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa alat olahraga | Rp | 529.872.560,00 |
| c. Dinas Lingkungan Hidup berupa mainan anak-anak | Rp | 199.190.000,00 |
| d. Dinas Pendidikan berupa alat | Rp | 165.396.231,00 |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

olahraga

7. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin BOS dari Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp29.098.400,00 pada :
 - a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Rp 1.999.000,00
 - b. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Rp 800.000,00
 - c. Dinas Pendidikan (SD di kota blitar) Rp 26.299.400,00
8. Dampak kumulatif penambahan aset tetap-Peralatan dan Mesin dari Hibah APBN 2018 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp450.480.000,00 antara lain :
 - a. Peralatan Personal Komputer Lainnya Rp 80.250.000,00
 - b. Uninterruptible Power Supply (UPS) Rp 3.000.000,00
 - c. Genset Rp 10.480.000,00
 - d. Televisi Rp 4.000.000,00
 - e. Mobil Unit Perpustakaan Keliling Rp 352.750.000,00
9. Kapitalisasi atas Aset yang direalisasikan melalui belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.072.188.250,00 pada :
 - a. Dinas kesehatan 330.562.000,00
 - b. RSUD Mardi Waluyo 2.741.626.250,00
10. Kapitalisasi bantuan barang berupa aset tetap yang diterima Pemkot Blitar sebesar Rp250.797.622,05 pada :
 - a. RSUD Mardi Waluyo berupa:
 - Cpap (Continuonus Positive Airway Pressure) Dari BPBD 1,00
 - Ventilator Usaid Type. Vyair Ltv 2200 Dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur 250.797.619,05
 - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa 2 buah wastafel dari Kementerian 2,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perdagangan

Jumlah	Rp	58.980.340.002,25
<u>Mutasi Kurang:</u>		
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan kapitalisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp2.122.540.084,00		
a. APBD	Rp	1.985.192.434,00
b. BOS	Rp	137.347.650,00
2. Reklasifikasi aset tetap-Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp934.929.457,00 pada :		
a. a. Dinas Pendidikan	Rp	227.189.807,00
b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	7.773.750,00
c. Dinas Penanaman Modal,Tenaga Kerja dan PTSP	Rp	3.420.000,00
d. Kelurahan Karangtengah	Rp	15.000.000,00
e. Kelurahan Kauman	Rp	15.275.000,00
f. Kelurahan Kepanjenlor	Rp	8.000.000,00
g. Kelurahan Pakunden	Rp	22.000.000,00
h. Kelurahan Sananwetan	Rp	19.000.000,00
i. Kelurahan Tanjungsari	Rp	10.000.000,00
j. Kelurahan Turi	Rp	5.000.000,00
k. UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Rp	20.550.000,00
l. UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	Rp	21.550.000,00
m. UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	Rp	28.310.000,00
n. UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	Rp	25.460.000,00
o. UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	Rp	19.400.000,00
p. UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	Rp	33.927.000,00
q. UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	Rp	20.000.000,00
r. UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	Rp	46.000.000,00
s. UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	Rp	18.895.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

t.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	720.000,00
u.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	49.450.000,00
v.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp	141.810.000,00
w.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	47.430.000,00
x.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	5.100.000,00
y.	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	1.528.000,00
z.	Kelurahan Karangsari	Rp	7.000.000,00
aa.	Dinas Kesehatan	Rp	115.140.900,00
3.	Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa lukisan	Rp	10.000.000,00
4.	Penghapusan kendaraan Bagian Umum (sedan Wawali) dikarenakan penjualan sesuai dengan SK Nomor : 188.4 / 5 / KEP / 410.010.2 / 2020	Rp	533.910.000,00
5.	Reklas antar akun aset tetap dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp2.899.617.800,00 berupa:		
a.	Dinas Pendidikan berupa Perencanaan Papan Nama SD	Rp	71.251.200,00
b.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp2.828.366.600,00 berupa :		
-	Pembangunan Jaringan FO	Rp	74.205.000,00
-	Perencanaan Pembangunan Jaringan SD	Rp	245.690.000,00
-	Komputer Unit/Jaringan Lain-lain (Pembangunan Jaringan FO Pemerintah Kota Blitar untuk Termin ke-3)	Rp	2.508.471.600,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain pada Dinas Kesehatan yang terdampak kebakaran pada tahun 2020	Rp	355.325.618,30



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7. Koreksi saldo awal Aset Tetap – Peralatan dan Mesin atas asset yang di non kapitalisasi	Rp	331.382.897,50
Jumlah	Rp	7.187.705.856,80
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	Rp	51.792.634.145,45
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	514.417.454.932,37

3. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	835.252.428.366,08	812.529.119.338,04

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp835.252.428.366,08 atau naik 2,80% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp812.529.119.338,04. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp 812.529.119.338,04**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2020	Rp	28.512.608.932,72
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020	Rp	117.546.000,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp167.400.000,00 pada :		
a. Kelurahan Gedog berupa kamar mandi di lapangan voli	Rp	25.000.000,00
b. Dinas pendidikan sebesar Rp142.400.000,00 berupa	Rp	
- Tempat Cuci Piring TKN Bendogerit	Rp	22.916.084,00
- Kamar Mandi TKN Blitar	Rp	60.206.674,00
- Kamar Mandi TK Sananwetan	Rp	59.277.242,00
4. Kapitalisasi atas Aset yang direalisasikan melalui belanja Tidak Terduga pada RSUD Mardi Waluyo	Rp	58.581.000,00
Jumlah	Rp	28.856.135.932,72

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan kapitalisasi Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Blitar Sebesar
Rp447.636.700,00

a.	APBD	Rp	396.546.700,00
b.	BOS	Rp	51.090.000,00
2.	Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.445.075.299,00 antara lain :		
a.	Reklasifikasi wastafel sebesar Rp1.571.374.450,00 pada :		
-	Dinas Pendidikan	Rp	83.721.800,00
-	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	Rp	8.750.000,00
-	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	Rp	35.956.000,00
-	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	Rp	44.972.000,00
-	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	Rp	10.000.000,00
-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	53.066.000,00
-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp	4.495.000,00
-	Dinas Perhubungan	Rp	6.623.200,00
-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	6.600.000,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	3.935.000,00
-	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	44.355.000,00
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	49.577.050,00
-	Dinas Kesehatan	Rp	90.600.000,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	228.000.000,00
-	Dinas Sosial	Rp	4.750.000,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.997.400,00
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	Rp	8.760.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	23.100.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	39.000.000,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	119.841.000,00
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	18.498.700,00
- Bagian Umum	Rp	50.090.000,00
- Sekretariat DPRD	Rp	11.682.000,00
- Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	10.000.000,00
- Kecamatan Sukorejo	Rp	18.800.000,00
- Kecamatan Sananwetan	Rp	1.600.000,00
- Kelurahan Ngadirejo	Rp	17.500.000,00
- Kelurahan Sentul	Rp	17.600.000,00
- Kelurahan Kauman	Rp	20.800.000,00
- Kelurahan Tanggung	Rp	23.000.000,00
- Kelurahan Bendo	Rp	17.000.000,00
- Kelurahan Kepanjenlor	Rp	14.729.300,00
- Kelurahan Kepanjenkidul	Rp	25.800.000,00
- Kelurahan Pakunden	Rp	19.800.000,00
- Kelurahan Blitar	Rp	18.000.000,00
- Kelurahan Tlumpu	Rp	22.400.000,00
- Kelurahan Turi	Rp	10.800.000,00
- Kelurahan Karang Sari	Rp	25.200.000,00
- Kelurahan Sukorejo	Rp	35.200.000,00
- Kelurahan Tanjungsari	Rp	23.400.000,00
- Kelurahan Gedog	Rp	54.400.000,00
- Kelurahan Plosokerep	Rp	18.000.000,00
- Kelurahan Klampok	Rp	21.700.000,00
- Kelurahan Sananwetan	Rp	134.075.000,00
- Kelurahan Rembang	Rp	12.000.000,00
- Kelurahan Karangtengah	Rp	24.000.000,00
- Kelurahan Bendogerit	Rp	35.200.000,00
b. Reklasifikasi tandon air pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	1.500.000,00
c. Reklasifikasi tiang bendera pada Dinas Perumahan Rakyat	Rp	23.200.000,00
d. Reklasifikasi lampu operasi, dan bracked lampu operasi pada RSUD Mardi Waluyo	Rp	333.284.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

e.	Reklasifikasi pintu elektrik pada Bagian Umum	Rp	30.170.000,00
f.	Reklasifikasi kursi roda pada Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	2.500.000,00
g.	Reklasifikasi papan nama pada Kelurahan Plosokerep	Rp	12.000.000,00
h.	Reklasifikasi rambu-rambu pada Dinas Perhubungan	Rp	461.507.474,00
i.	Reklasifikasi tenda pada Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	9.539.375,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap- Peralatan dan Mesin BOS dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.314.000,00 BOS pada :		
a.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	Rp	10.000.000,00
b.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	Rp	13.000.000,00
c.	Dinas Pendidikan (SD di kota blitar)	Rp	25.314.000,00
4.	Reklasifikasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.243.369.220,00 pada:		
a.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 berupa talud air	Rp	107.442.210,00
b.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Amping Paving Kebun Edukasi Pertanian	Rp	16.490.000,00
c.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa saluran air	Rp	199.465.789,00
d.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Jalan Setapak Agrowisata Blimbing Karang	Rp	794.971.221,00
e.	Kelurahan Gedog		
f.	Paving Jl. Kasan Sobari RW 12	Rp	30.000.000,00
g.	Saluran air depan Mushola Syafaatul Ummah	Rp	40.000.000,00
h.	Paving Area Punden Joko Pangon	Rp	30.000.000,00
i.	Saluran air depan Masjid Sadwika Rohmah	Rp	25.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-
-
5. Reklasifikasi Aset Tetap -
Gedung dan Bangunan ke Aset
Tidak Berwujud sebesar
Rp356.858.825,00 pada :
- a. Dinas Kesehatan berupa studi kelayakan psc Rp 74.736.425,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa
 - Review DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu Rp 78.858.240,00
 - Penyusunan UKL UPL Penataan Kawasan Bendo Rp 136.950.660,00
 - Penyusunan Andalalin Penataan Kawasan Bendo Rp 66.313.500,00
6. Reklasifikasi Aset Tetap -
Gedung dan Bangunan ke Aset
Lain-lain sebesar
Rp36.944.600,00 pada:
- a. Bagian Umum berupa :
 - Pagar Rp 9.762.000,00
 - Kolam koi Rp 19.633.000,00
 - b. Dinas Kesehatan berupa aset yang terdampak kebakaran pada tahun 2020 Rp 7.549.600,00
7. Penghapusan bangunan TPST Kali Lahar Sangut pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan SK Nomor : 188.4 / 2 / KEP / 410.010.2 / 2020 Rp 195.899.080,00
8. Reklas antar akun aset tetap dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar
Rp693.553.306,41 pada :
- a. Dinas Lingkungan Hidup
 - Jasa perencanaan pembangunan taman selatan kantor Rp 7.907.900,00
 - Perencanaan pembangunan jogging track dan pagar aloon-aloon TA 2020 Rp 49.938.700,00
 - Jasa perencanaan pembangunan aula dan gudang penyimpanan Rp 39.579.100,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	barang di DLH		
b.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	
-	Perencanaan tempat ibadah / Musholla	Rp	16.223.089,00
-	Perencanaan Kamar Mandi	Rp	6.790.585,00
-	Perencanaan Tempat Parkir	Rp	23.299.976,00
-	Perencanaan Pagar Keliling Kantor	Rp	18.284.450,00
-	Perencanaan Rehab Gudang Arsip	Rp	19.369.680,00
-	Perencanaan Pembangunan Kantin	Rp	8.651.500,00
-	Perencanaan Pembangunan Taman	Rp	4.454.400,00
-	Cut and Feel Padat Dozer/Tanah Urug Perluasan Kantor	Rp	207.497.000,00
c.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	
-	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rp	19.760.000,00
d.	SMP Negeri 7	Rp	
-	Perencanaan Atap Lapangan Basket	Rp	11.904.090,00
e.	Dinas Perumahan Rakyat	Rp	
-	Perencanaan Pembangunan Selasar/Penghubung Gedung Rusunawa TB II dan TB III	Rp	6.650.600,00
-	Perencanaan Rehab Tempat Parkir dan Taman (Dispera)	Rp	8.220.700,00
f.	Dinas Pemuda dan Olahraga		
-	Perencanaan bangunan gedung tempat olahraga Stadion (Media Center dll)	Rp	40.320.000,00
g.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
-	Perencanaan Ornament Kebun Edukasi Pertanian	Rp	17.721.000,00
h.	dinas Pendidikan		
-	Site plant / perencanaan pembangunan TKN Pembina	Rp	29.500.000,00
i.	dinas perindustrian		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Sentra PKL Jl. Bengawan Solo	Rp	157.480.536,41		
9. Koreksi saldo awal Aset Tetap – Gedung dan Bangunan atas asset yang di non kapitalisasi	Rp	658.861.925,00		
10. Koreksi kurang volume aset tetap Gedung dan Bangunan Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berupa Paket Pengerjaan Peningkatan Sarana Prasarana Agrowisata Belimbing Karangsari (Jalan Setapak Agrowisata Blimbing Karangsari)	Rp	6.313.949,27		
Jumlah	Rp	6.132.826.904,68		
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Gedung dan Bangunan			Rp	22.723.309.028,04
Saldo Akhir per 31 Desember 2020			Rp	835.252.428.366,08

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	774.978.776.574,88	748.545.212.935,91

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp774.978.776.574,88 atau naik 3,53% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp748.545.212.935,91. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp 748.545.212.935,91**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2020	Rp	26.260.496.590,72
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020	Rp	10.700.000,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.243.369.220,00 pada:		
a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 berupa talud air	Rp	107.442.210,00
b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Amping Paving Kebun Edukasi Pertanian	Rp	16.490.000,00
c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa saluran	Rp	199.465.789,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

air		
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Jalan Setapak Agrowisata Blimbing Karang	Rp	794.971.221,00
e. Kelurahan Gedog		
f. Paving Jl. Kasan Sobari RW 12	Rp	30.000.000,00
g. Saluran air depan Mushola Syafaatul Ummah	Rp	40.000.000,00
h. Paving Area Punden Joko Pangon	Rp	30.000.000,00
i. Saluran air depan Masjid Sadwika Rohmah	Rp	25.000.000,00
4. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp194.968.000,00		
j. Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2020.	Rp	44.020.000,00
k. Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Mahakam Lanjutan.	Rp	55.198.000,00
l. Perencanaan Kegiatan DAK Jalan di Kec. Kepanjenkidul TA 2019	Rp	95.750.000,00

Jumlah	Rp	27.709.533.810,72
---------------	-----------	--------------------------

Mutasi Kurang:

1. Reklas Aset Tetap- Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat berupa lampu jalan	Rp	51.000.000,00
2. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp122.340.000,00 pada :		
a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	Rp	111.640.000,00
b. Dinas Pendidikan (SD di kota blitar)	Rp	10.700.000,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp167.400.000,00 pada :		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a.	Kelurahan Gedog berupa kamar mandi di lapangan voli	Rp	25.000.000,00
b.	Dinas pendidikan sebesar Rp142.400.000,00 berupa		
-	Tempat Cuci Piring TKN Bendogerit	Rp	22.916.084,00
-	Kamar Mandi TKN Blitar	Rp	60.206.674,00
-	Kamar Mandi TK Sananwetan	Rp	59.277.242,00
4.	Reklas antar akun aset tetap dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp457.432.249,00 pada :		
a.	Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp298.336.249,00 berupa :		
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan Rt.01,02 di Rw 02 Jl.Sukun Kel.Turi	Rp	7.670.000,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan Gg.Family Rt.01 Rw 03 Kel.Karangsari	Rp	4.105.500,00
-	Perencanaan Drainase Lingkungan di Jl.Kedodong Rw 03 Kel.Turi	Rp	4.105.500,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.Bengawan Solo Gg XIV Rt.05 .Rw.03 Kel.Pakunden	Rp	7.670.000,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.Jati Gg.Vii Rt.04 Rw.13 Kel.Sukorejo	Rp	7.367.000,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di gg. Timur Masjid Nurul Huda Rw.II Kel. Sukorejo	Rp	9.880.000,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl. Ketapang dan Jl.Widuri Gg.V Kel.Tlumpu	Rp	9.880.320,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Jl.Lingkungan	Rp	9.880.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

di Jl.Tirtoyodo Rt.01.02 Rw.I Kel.Blitar		
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di jl. Kalisari Rt.03 Rw.09 Kel.Kauman	Rp	3.980.900,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Gg. IX Rt.02 Rw.09 Kel.Kepanjenkidul	Rp	5.402.650,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan Gg.I Rt.03/02 dan Gg IV Rt.01 /12 Kel.Kepanjenkidul	Rp	5.402.650,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Rt.03/ 09 DAN rT 02/07 Kel.Bendo	Rp	9.866.900,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Rt.02 Rw. 08 Kel.Tanggung	Rp	3.781.900,00
- Perencanaan Rehab DrainaseLingkungan di Rt.03 Rw.07 Kel.Kauman	Rp	4.439.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Rt.02Rw.07 Kel.Kauman	Rp	5.031.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.Dieng gg Barat Kel.Bendogerit	Rp	5.030.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan Jl Candi Jago Kel.Bendogerit	Rp	9.967.000,00
- Perencanaan Rehab Drainse Lingkungan di Jl.Kurma Gang Kel.Kepanjenkidul	Rp	6.215.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di RW.1 Kel.Bendo (Utara Sumber Udel) Keg.Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	Rp	7.518.000,00
- Perencanaan Paningkatan Jalan di Jl.Pinus Tembus	Rp	4.576.501,54



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jl.Kurma		
Kel.Kepanjenkidul		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Kurma	Rp	4.601.753,66
Gg.Rw.I		
Kel.Kepanjenkidul		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Melati Gg.IV	Rp	5.153.964,10
Rw.02 Kel.Kepanjenkidul		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Kalasan Barat	Rp	7.477.849,70
Gg. IV Kel.Bendogerit		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Rw.II kel.Bendo	Rp	7.046.435,00
(utara Sumber Udel)		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Mataram Gg.2	Rp	7.526.000,00
Rt.02 Rw.05		
Kel.Kepanjenkidul (PSU)		
- Perencanaan Peningkatan		
Jl.di Jl, Maerdeka Gg.III	Rp	8.065.000,00
Kel.Kepanjenkidul		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl Serayu	Rp	3.156.000,00
gg.Rw.07 Kel.Bendo		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Cimalaya	Rp	3.191.000,00
gg,16 Rt.04 Rw.09		
Kel.Bendo		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Cicadas Gg.1	Rp	6.430.000,00
Rt.01 Rw.08 Kel Bendo		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.tidar Gg.Rw.04	Rp	3.738.500,00
Kel.Kauman		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl.Semeru	Rp	6.644.500,00
Gg.Kel.Kauman		
- Perencanaan Peningkatan		
Jalan di Jl Gg.Tembus	Rp	3.738.500,00
Utara Barat RT.01/07		
Kel.Karangtengah		
- Perencanaan Peningkatan		
Jl.Bali Gg.1 Rt.02 Rw.05	Rp	3.738.500,00
Kel.Karangtengah		
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di	Rp	7.090.000,00
Jl.S.Brojonegoro Gang		
Timur Kel,Sentul		
- Perencanaan Rehab	Rp	7.090.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Drainase Lingkungan di RW,3 Belakang Masjid AL IKLAS Kel Sentul			
-	Perencanaan Rehab		
	Drainase Lingkungan di Jl.S. Brojonegoro Gang Barat Kelurahan Sentul	Rp	8.360.000,00
-	Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.S.Brojonegoro Gg.Timur Ke Sentul	Rp	6.452.000,00
-	Perencanaan Pembangunan Jalan Hotmix di Perumahan BTN Tlumpu	Rp	11.150.975,00
-	Perencanaan Pembangunan jalan Hotmix diperumahan Griya Melati Indah	Rp	11.150.975,00
-	Perencanaan Pembangunan jalan Hotmix di Perumahan ASABRI	Rp	11.150.975,00
-	Perencanaan Pembangunan Saluran Darinse Perumahan Tanggung ASRI	Rp	11.204.500,00
-	Perencanaan Pembangunan Salauran Drainase di Perumahan Patria Green House	Rp	11.204.500,00
-	Perencanaan Pembangunan Rehab Saluran Drainase Lingkungan Perumahan Pakunden	Rp	11.204.500,00
b.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp104.203.500,00 berupa :		
-	Perencanaan JUT (Jalan Usaha Tani) Bendogerit	Rp	29.425.000,00
-	Perencanaan Konstruksi Pintu Air	Rp	27.349.000,00
-	Perencanaan Instalasi Pengairan Tanaman Kebun Edukasi Pertanian	Rp	18.004.500,00
-	Perencanaan JUT (Jalan Usaha Tani) Tanjungsari	Rp	29.425.000,00
c.	Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp54.892.500,00		
-	Perencanaan	Rp	10.978.500,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Klampis Kel. Tlumpu		
-	Perencanaan		
	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Letda Markawi Kel. Gedog	Rp	10.978.500,00
-	Perencanaan		
	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Widuri Kel. Tlumpu	Rp	10.978.500,00
-	Perencanaan		
	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Durian Kel. Tlumpu	Rp	10.978.500,00
-	Perencanaan		
	Pembangunan Saluran Drainase Tahap 1:	Rp	10.978.500,00
5.	Reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp175.997.600,00		
a.	Pemetaan jaringan irigasi dengan aplikasi E- Paksi	Rp	75.882.300,00
b.	Updating peta geospasial dan data base irigasi	Rp	100.115.300,00
6.	Reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain pada Dinas Perumahan Rakyat berupa Pembangunan Jalan di Lingkungan Perumahan Puri Kenari Asri karena belum dijumpai BA Penyerahan PSU Perumahan ke Pemkot Blitar	Rp	203.413.375,00
7.	Koreksi atas temuan kekurangan volume paket pengerjaan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp98454.748,89 pada :		
a.	Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp13.696.616,69 berupa :		
-	Paket Pengerjaan Pembangunan Hotmix Jalan Semeru Barat Tahun 2020	Rp	6.624.349,76
-	Paket Pengerjaan Pembangunan Hotmix Jalan Kangean Gang Rt.05/03 Kel.Sananwetan	Rp	7.072.266,93



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2020			
b. Dinas Pekerjaan Umum			
sebesar Rp84.758.132,20			
berupa :			
- Paket Pengerjaan			
Pelebaran Jalan Sigaran-	Rp	1.532.470,13	
Wagir Tahun 2020			
- Paket Pengerjaan			
Pembuatan R Jalan	Rp	823.568,08	
Bengawan Solo-Jl			
Tanjung Tahun 2020			
- Paket Pengerjaan			
Pelebaran Jalan Akasia	Rp	1.402.799,38	
Tahun 2020			
- Paket Pengerjaan			
Pembuatan R Jalan	Rp	3.333.092,29	
Ciliwung - Jl Serayu			
Tahun 2020			
- Paket Pengerjaan Jl	Rp	5.065.899,00	
Teratai Tahun 2020			
- Paket Pengerjaan			
Pelebaran Jl Buru Tahun	Rp	8.652.599,16	
2020			
- Paket Pengerjaan			
Pemeliharaan Berkala Jl	Rp	48.205.185,55	
Melati Tahun 2020			
- Paket Pengerjaan			
Pemeliharaan Berkala Jl	Rp	15.674.717,47	
Mahakam Tahun 2020			
Jumlah	Rp	1.275.970.171,75	
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap –			Rp 26.433.563.638,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Saldo Akhir per 31 Desember 2020			Rp 774.978.776.574,88
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
	(Rp)	(Rp)	
5. Aset Tetap Lainnya	38.986.105.779,34	36.806.720.619,34	

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.986.105.779,34 naik 5,92% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.806.720.619,34. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 36.806.720.619,34
<u>Mutasi Tambah:</u>	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2020	Rp	2.618.204.260,81
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020	Rp	663.091.540,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa lukisan	Rp	10.000.000,00
4. Dampak kumulatif penambahan aset tetap-Peralatan dan Mesin dari Hibah APBN 2018 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku umum	Rp	30.250.000,00
Jumlah	Rp	3.321.545.800,81

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan kapitalisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp12.670.000,00		
a. APBD	Rp	10.470.000,00
b. BOS	Rp	2.200.000,00
2. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp901.548.791,00 pada :		
a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 berupa meja tennis	Rp	7.090.000,00
b. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa alat olahraga	Rp	529.872.560,00
c. Dinas Lingkungan Hidup berupa mainan anak-anak	Rp	199.190.000,00
d. Dinas Pendidikan berupa alat olahraga	Rp	165.396.231,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin BOS dari Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp29.098.400,00 pada :		
a. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	Rp	1.999.000,00
b. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	Rp	800.000,00
c. Dinas Pendidikan (SD di kota blitar)	Rp	26.299.400,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Reklasifikasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak berwujud pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa E-book Tahun 2020	Rp	107.693.449,81	
5. Penghapusan hewan-hewan dikarenakan sudah mati pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan SK Nomor : 188.4/1/KEP/410.010.2/2020	Rp	91.150.000,00	
Jumlah	Rp	1.142.160.640,81	
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya			Rp 2.179.385.160,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020			Rp 38.986.105.779,34

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	11.944.514.714,00	8.817.496.055,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo KDP per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.944.514.714,00 naik 35,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.817.496.055,00. Rincian mutasi KDP Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp 8.817.496.055,00**

Mutasi Tambah:

1. Reklas antar akun aset tetap dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp2.899.617.800,00 berupa:
 - a. Dinas Pendidikan berupa Perencanaan Papan Nama SD Rp 71.251.200,00
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp2.828.366.600,00 berupa :
 - Pembangunan Jaringan FO Rp 74.205.000,00
 - Perencanaan Pembangunan Jaringan SD Rp 245.690.000,00
 - Komputer Unit/Jaringan Lain-lain (Pembangunan Rp 2.508.471.600,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jaringan FO Pemerintah Kota Blitar untuk Termin ke-3)			
2.	Reklas antar akun aset tetap dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp693.553.306,41 pada :		
a.	Dinas Lingkungan Hidup		
-	Jasa perencanaan pembangunan taman selatan kantor	Rp	7.907.900,00
-	Perencanaan pembangunan jogging track dan pagar aloon-aloon TA 2020	Rp	49.938.700,00
-	Jasa perencanaan pembangunan aula dan gudang penyimpanan barang di DLH	Rp	39.579.100,00
b.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	
-	Perencanaan tempat ibadah / Musholla	Rp	16.223.089,00
-	Perencanaan Kamar Mandi	Rp	6.790.585,00
-	Perencanaan Tempat Parkir	Rp	23.299.976,00
-	Perencanaan Pagar Keliling Kantor	Rp	18.284.450,00
-	Perencanaan Rehab Gudang Arsip	Rp	19.369.680,00
-	Perencanaan Pembangunan Kantin	Rp	8.651.500,00
-	Perencanaan Pembangunan Taman	Rp	4.454.400,00
-	Cut and Feel Padat Dozer/Tanah Urug Perluasan Kantor	Rp	207.497.000,00
c.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	
-	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rp	19.760.000,00
-	SMP Negeri 7	Rp	
-	Perencanaan Atap Lapangan Basket	Rp	11.904.090,00
d.	Dinas Perumahan Rakyat	Rp	
-	Perencanaan Pembangunan Selasar/Penghubung	Rp	6.650.600,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gedung Rusunawa TB II dan TB III		
-	Perencanaan Rehab Tempat Parkir dan Taman (Dispera)	Rp 8.220.700,00
e.	Dinas Pemuda dan Olahraga	
-	Perencanaan bangunan gedung tempat olahraga Stadion (Media Center dll)	Rp 40.320.000,00
f.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
-	Perencanaan Ornament Kebun Edukasi Pertanian	Rp 17.721.000,00
g.	Dinas Pendidikan	
-	Site plant / perencanaan pembangunan TKN Pembina	Rp 29.500.000,00
h.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
-	Sentra PKL Jl. Bengawan Solo	Rp 157.480.536,41
3.	Reklas antar akun aset tetap dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp457.432.249,00 pada :	
a.	Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp298.336.249,00 berupa :	
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan Rt.01,02 di Rw 02 Jl.Sukun Kel.Turi	Rp 7.670.000,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan Gg.Family Rt.01 Rw 03 Kel.Karangsari	Rp 4.105.500,00
-	Perencanaan Drainase Lingkungan di Jl.Kedodong Rw 03 Kel.Turi	Rp 4.105.500,00
-	Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.Bengawan Solo Gg XIV Rt.05 .Rw.03 Kel.Pakunden	Rp 7.670.000,00
-	Perencanaan Rehab	Rp 7.367.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Drainase Lingkungan di Jl.Jati Gg.Vii Rt.04 Rw.13 Kel.Sukorejo		
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di gg. Timur Masjid Nurul Huda Rw.II Kel. Sukorejo	Rp	9.880.000,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di Jl. Ketapang dan Jl.Widuri Gg.V Kel.Tlumpu	Rp	9.880.320,00
- Perencanaan Rehab		
Draainase Jl.Lingkungan di Jl.Tirtoyodo Rt.01.02 Rw.I Kel.Blitar	Rp	9.880.000,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di jl. Kalisari Rt.03 Rw.09 Kel.Kauman	Rp	3.980.900,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di Gg. IX Rt.02 Rw.09 Kel.Kepanjenkidul	Rp	5.402.650,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan Gg.I Rt.03/02 dan Gg IV Rt.01 /12 Kel.Kepanjenkidul	Rp	5.402.650,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di Rt.03/ 09 DAN rT 02/07 Kel.Bendo	Rp	9.866.900,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di Rt.02 Rw. 08 Kel.Tanggung	Rp	3.781.900,00
- Perencanaan Rehab		
DrainaseLingkungan di Rt.03 Rw.07 Kel.Kauman	Rp	4.439.000,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di Rt.02Rw.07 Kel.Kauman	Rp	5.031.000,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan di Jl.Dieng gg Barat Kel.Bendogerit	Rp	5.030.000,00
- Perencanaan Rehab		
Drainase Lingkungan Jl Candi Jago	Rp	9.967.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kel.Bendogerit		
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.Kurma Gang Kel.Kepanjenkidul	Rp	6.215.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di RW.1 Kel.Bendo (Utara Sumber Udel) Keg.Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	Rp	7.518.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Pinus Tembus Jl.Kurma Kel.Kepanjenkidul	Rp	4.576.501,54
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Kurma Gg.Rw.I Kel.Kepanjenkidul	Rp	4.601.753,66
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Melati Gg.IV Rw.02 Kel.Kepanjenkidul	Rp	5.153.964,10
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Kalasan Barat Gg. IV Kel.Bendogerit	Rp	7.477.849,70
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Rw.II kel.Bendo (utara Sumber Udel)	Rp	7.046.435,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Mataram Gg.2 Rt.02 Rw.05 Kel.Kepanjenkidul (PSU)	Rp	7.526.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jl.di Jl, Maerdeka Gg.III Kel.Kepanjenkidul	Rp	8.065.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl Serayu gg.Rw.07 Kel.Bendo	Rp	3.156.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Cimalaya gg,16 Rt.04 Rw.09 Kel.Bendo	Rp	3.191.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.Cicadas Gg.1 Rt.01 Rw.08 Kel Bendo	Rp	6.430.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.tidar Gg.Rw.04 Kel.Kauman	Rp	3.738.500,00
- Perencanaan Peningkatan	Rp	6.644.500,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jalan di Jl.Semeru Gg.Kel.Kauman		
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl Gg.Tembus Utara Barat RT.01/07 Kel.Karangtengah	Rp	3.738.500,00
- Perencanaan Peningkatan Jl.Bali Gg.1 Rt.02 Rw.05 Kel.Karangtengah	Rp	3.738.500,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.S.Brojonegoro Gang Timur Kel,Sentul	Rp	7.090.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di RW,3 Belakang Masjid AL IKLAS Kel Sentul	Rp	7.090.000,00
- Perencanaan Rehab Drainase Lingkungan di Jl.S. Brojonegoro Gang Barat Kelurahan Sentul	Rp	8.360.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl.S.Brojonegoro Gg.Timur Ke Sentul	Rp	6.452.000,00
- Perencanaan Pembangunan Jalan Hotmix di Perumahan BTN Tlumpu	Rp	11.150.975,00
- Perencanaan Pembangunan jalan Hotmix diperumahan Griya Melati Indah	Rp	11.150.975,00
- Perencanaan Pembangunan jalan Hotmix di Perumahan ASABRI	Rp	11.150.975,00
- Perencanaan Pembangunan Saluran Darinse Perumahan Tanggung ASRI	Rp	11.204.500,00
- Perencanaan Pembangunan Salauran Drainase di Perumahan Patria Green House	Rp	11.204.500,00
- Perencanaan Pembangunan Rehab Saluran Drainase Lingkungan Perumahan Pakunden	Rp	11.204.500,00
b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp104.203.500,00 berupa :		
- Perencanaan JUT (Jalan Usaha Tani) Bendogerit	Rp	29.425.000,00
- Perencanaan Konstruksi Pintu Air	Rp	27.349.000,00
- Perencanaan Instalasi Pengairan Tanaman Kebun Edukasi Pertanian	Rp	18.004.500,00
- Perencanaan JUT (Jalan Usaha Tani) Tanjungsari	Rp	29.425.000,00
c. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp54.892.500,00		
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Klampis Kel. Tlumpu	Rp	10.978.500,00
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Letda Markawi Kel. Gedog	Rp	10.978.500,00
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Widuri Kel. Tlumpu	Rp	10.978.500,00
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Durian Kel. Tlumpu	Rp	10.978.500,00
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Tahap 1:	Rp	10.978.500,00
Jumlah	Rp	4.050.603.355,41

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp194.968.000,00
 - Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2020. Rp 44.020.000,00
 - Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Mahakam Lanjutan. Rp 55.198.000,00
 - Perencanaan Kegiatan DAK Jalan di Kec. Rp 95.750.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepanjenkidul TA 2019	
2. Reklas Aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan ke beban jasa konsultasi atas belanja modal konstruksi dalam pengerjaan tahun 2020 yang perencanaannya tidak dilanjutkan sebesar Rp215.327.136,41 pada :	
a. Dinas Lingkungan Hidup	
- Jasa perencanaan pembangunan taman selatan kantor	7.907.900,00
- Perencanaan pembangunan jogging track dan pagar aloon-aloon TA 2020	49.938.700,00
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
- Sentra PKL Jl. Bengawan Solo	157.480.536,41
3. Koreksi saldo awal atas Aset tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan sebesar Rp513.290.100,00	
a. Sekretariat DPRD	
- Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/ WC (2019)	31.509.500,00
b. Badan Perencanaan Pembangunan	
- Study Kelayakan Kel. Tlumpu 2017 (2019)	48.800.000,00
- Studi Kelayakan Pengembangan Pasar Dimoro (2018)	77.275.000,00
- Masterplan Pasar Dimoro (2018)	75.006.000,00
c. Dinas Kesehatan	
- Biaya perencanaan pembangunan puskesmas Sukorejo (2019)	133.144.500,00
d. Dinas Lingkungan Hidup	
- Perencanaan taman PETA (2017)	30.000.000,00
e. Dinas Perhubungan	
- Biaya Perencanaan PJU TH 2018 (2019)	31.065.000,00
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Penyusunan DED Geometrik di Pertigaan Jalan cemara - jalan palem (2019)	44.600.000,00		
- Peningkatan jalan di Pertigaan Jl. Palem dan Jl. Cemara Perencanaan. (2018)	8.202.100,00		
- Peningkatan jalan di Jl. Merapi Perempatan, Perencanaan (2018)	15.800.000,00		
- Perencanaan talud strain kali lahar kelurahan sukorejo (2018)	17.888.000,00		
Jumlah	Rp 923.585.236,41		
Jumlah mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp 3.127.018.119,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2020		Rp 11.944.514.174,00	

7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(1.114.609.303.820,72)	(967.361.425.412,76)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Blitar dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Blitar nomor 74 Tahun 2019.

Perhitungan penyusutan dihitung secara Tahunan pada akhir periode Tahun berjalan/saat penyusunan laporan keuangan, meskipun aset baru diperoleh dalam hitungan hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar (1.114.609.303.820,72) ini naik sebesar 15,22% dibandingkan saldo Tahun 2019 sebesar (Rp967.361.425.412,76).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 77 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo	Mutasi	Mutasi	Saldo
		Awal	Tambah	Kurang	Akhir
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Peralatan dan mesin	321.831.210.945,25	78.810.480.522,97	615.266.287,32	400.026.425.180,90
2	Gedung dan bangunan	293.528.975.768,26	24.723.528.706,16	54.781.149,96	318.197.723.324,46
3	Jalan, instalasi jaringan	346.110.092.019,72	42.895.780.076,13	6.655.935,02	388.999.216.160,83
4	Aset tetap lainnya	5.891.146.679,53	1.494.792.475,00		7.385.939.154,53
Jumlah		967.361.425.412,76	147.924.581.780,26	676.703.372,30	1.114.609.303.820,72

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(400.026.425.180,90)	(321.831.210.945,25)

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar (Rp400.026.425.180,90) atau naik sebesar 24,30% dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp321.831.210.945,25). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019

Rp (321.831.210.945,25)

Mutasi Tambah:

1. Beban penyusutan 2020	Rp (78.700.838.522,97)
2. Dampak kumulatif akumulasi penyusutan atas hibah peralatan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diperoleh pada tahun 2018	Rp (109.642.000,00)
Jumlah	Rp (78.810.480.522,97)

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan kendaraan Bagian Umum (sedan Wawali) dikarenakan penjualan sesuai dengan SK Nomor : 188.4 / 5 / KEP / 410.010.2 /2020	Rp (320.346.000,00)
2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke	Rp (294.920.287,32)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain- Lain pada Dinas Kesehatan yang terdampak kebakaran pada tahun 2020	Jumlah	Rp (615.266.287,32)	
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		Rp (78.195.214.235,65)	
Saldo Akhir per 31 Desember 2020		Rp (400.026.425.180,90)	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(318.197.723.324,46)	(293.528.975.768,26)

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp318.197.723.324,46) atau naik sebesar 8,40% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp293.528.975.768,26) Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp** (293.528.975.768,26)

Mutasi Tambah:

1. Beban penyusutan	Rp (24.723.107.776,20)
Jumlah	Rp (24.723.107.776,20)

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan bangunan TPST Kali Lahar Sangut pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan SK Nomor : 188.4 / 2 / KEP /410.010.2 / 2020	Rp (48.974.770,00)
2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Pagar dan Kolam Koi di Kel. Karangtengah dari Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-Lain	Rp (5.385.450,00)
Jumlah	Rp (54.360.220,00)

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (24.668.747.556,20)
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp (318.197.723.324,46)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(388.999.216.160,83)	(346.110.092.019,72)

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp388.999.216.160,83) atau naik sebesar 12,39% dibandingkan dengan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp346.110.092.019,72). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019 Rp (346.110.092.019,72)

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan	Rp (42.889.124.141,11)
Jumlah	Rp (42.889.124.141,11)

Mutasi Kurang:

Jumlah	Rp (0,00)
---------------	------------------

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp (42.889.124.141,11)

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 Rp (388.999.216.160,83)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(7.385.939.154,53)	(5.891.146.679,53)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp7.385.939.154,53) atau naik sebesar 25,37% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp5.891.146.679,53). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 Rp (5.891.146.679,53)

Mutasi Tambah:

1. Beban penyusutan	Rp (1.494.792.475,00)
Jumlah	Rp (1.494.792.475,00)

Mutasi Kurang:

Jumlah	Rp (0,00)
---------------	------------------

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp (1.494.792.475,00)

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 Rp (7.385.939.154,53)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selain Aset Tetap tersebut diatas, Pemerintah Kota Blitar membukukan nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember 2020 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp2.582.846.784,00. Rincian Aset Tetap *Ekstracomptable* disajikan pada **Lampiran 20**.

7.5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Tabel 78 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	386.657.500,00	394.418.750,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.114.000.000,00	3.114.000.000,00
Aset Tak Berwujud	16.934.121.184,81	11.955.752.880,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(8.650.684.931,96)	(6.814.709.566,00)
Aset Lain-lain	4.894.951.639,35	7.723.578.326,05
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(3.771.465.628,37)	(5.996.116.666,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	129.442.000,00	141.920.000,00
Jumlah	13.037.021.763,83	10.518.843.724,05

Aset Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	13.037.011.763,83	10.518.843.724,05

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.037.011.763,83 atau naik 23,94% dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.518.843.724,05. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	386.657.500,00	394.418.750,00

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2020 sebesar Rp386.657.500,00. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2020 sebesar Rp386.657.500,00 atau turun sebesar 1,97%



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp394.418.750,00 dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas 25 anggota DPRD Pemkot Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.

Tabel 79 Perhitungan Tuntutan Ganti Rugi Tahun

2020

(dalam

Rupiah)

No	Uraian	Pembayaran 2019	Saldo 31/12/2019	Pembayaran 2020	Saldo 31/12/2020
1.	Sekretariat DPRD 1.429.470.000,00 (Juni 2019 s/d Mei 2021)	347.091.250,00	1.082.378.750,00	456.302.500,00	626.076.250,00
	Tagihan TGR		394.418.750,00		386.657.500,00
	Bagian Lancar TGR		687.960.000,00		239.418.750,00

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 25 anggota DPRD Pemerintah Kota Blitar dibuat atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dengan nilai total sebesar Rp1.429.470.000,00. Nilai tersebut telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp803.393.750,00 sampai dengan TA 2020, sehingga pada 31 Desember 2020 terdapat saldo TGR sebesar Rp626.076.250,00. Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 tersebut adalah sebesar Rp239.418.750,00, sedangkan sisanya sebesar Rp386.657.500,00 disajikan pada Aset Lainnya. Perhitungan Rinci Saldo Akhir Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2020 disajikan pada **Lampiran 21** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		3.114.000.000,00	3.114.000.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.114.000.000,00 merupakan nilai aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang dikerjasamakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) untuk *Blitar Square* berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar diaddendum dengan perjanjian Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3. Aset Tak Berwujud	16.934.121.184,81	11.955.752.880,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.934.121.184,81 atau naik sebesar 41,64% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp11.955.752.880,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset *software*, masterplan, dan kajian dengan rincian mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 11.955.752.880,00

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2020	Rp 4.336.318.430,00
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020	Rp 1.500.000,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp356.858.825,00 pada :	
a. Dinas Kesehatan berupa studi kelayakan psc	Rp 74.736.425,00
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa	
g. Review DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu	Rp 78.858.240,00
h. Penyusunan UKL UPL Penataan Kawasan Bendo	Rp 136.950.660,00
i. Penyusunan Andalalin Penataan Kawasan Bendo	Rp 66.313.500,00
4. Reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp175.997.600,00	
a. Pemetaan jaringan irigasi dengan aplikasi E- Paksi	Rp 75.882.300,00
b. Updating peta geospasial dan data base irigasi	Rp 100.115.300,00
5. Reklasifikasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak berwujud pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa E-book Tahun 2020	Rp 107.693.449,81

Jumlah

Rp 4.978.368.304,81

Mutasi Kurang:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	Rp	0,00
Jumlah mutasi bersih Aset Tidak Berwujud		Rp 4.978.368.304,81
Saldo Akhir per 31 Desember 2020		Rp 16.934.121.184,81

Daftar Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 22** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>(8.650.684.931,96)</u>	<u>(6.814.709.566,00)</u>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar (Rp8.650.684.931,96) atau turun sebesar 26,94% sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp6.814.709.566,00). Rincian mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp (6.814.709.566,00)**

Mutasi Tambah:

1. Beban penyusutan	Rp (1.835.975.365,96)
Jumlah	Rp (1.835.975.365,96)

Mutasi Kurang:

Jumlah	Rp	(0,00)
Jumlah mutasi bersih Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp (1.835.975.365,96)	
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp (8.650.684.931,96)	

5. Aset Lain-lain	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>4.894.951.639,35</u>	<u>7.723.578.326,05</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.894.951.639,35 atau turun 36,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.723.578.326,05. Aset Lain-lain terdiri dari kumpulan usulan penghapusan atas Aset Tetap SKPD sebelum diterbitkan SK Penghapusan atas pengadaan sampai dengan tahun 2019 dan Aset Tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat dengan rincian mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 7.723.578.326,05

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain sebesar Rp36.944.600,00 pada:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Bagian Umum berupa :		
j. Pagar	Rp	9.762.000,00
k. kolam koi kel karangtengah	Rp	19.633.000,00
b. Dinas Kesehatan berupa aset yang terdampak kebakaran pada tahun 2020	Rp	7.549.600,00
2. Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain pada Dinas Kesehatan yang terdampak kebakaran pada tahun 2020	Rp	355.325.618,30
3. Reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain pada Dinas Perumahan Rakyat berupa Pembangunan Jalan di Lingkungan Perumahan Puri Kenari Asri karena belum dijumpai BA Penyerahan PSU Perumahan ke Pemkot Blitar	Rp	203.413.375,00
Jumlah	Rp	595.683.593,30

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset lain-lain pada :		
a. Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan SK Nomor : 188.4/3/kep/410.010.2/2020 penghapusan aset-aset yang hilang karena pencurian	Rp	44.703.630,00
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan SK Nomor: 188.4 / 6 / KEP / 410.010.2 / 2020 penghapusan Jl. Halmahera & Jl. Maluku yang dimusnahkan karena diganti baru.	Rp	1.434.003.950,00
c. Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan SK Nomor : 188.4 / 7 / KEP / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	609.732.500,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d.	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	312.250.000,00	
e.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	413.115.200,00	
f.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	10.000.000,00	
g.	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	571.110.000,00	
h.	Bagian Umum berdasarkan SK Nomor 188 / 350 / HK / 410.010.2 / 2020 Penghapusan pagar dan kolam koi di eks Kantor Kelurahan Karangtengah di Jl Bali yang dihibahkan kepada LP Anak karena bangunan kantornya dikembalikan kepada LP Anak	Rp	29.395.000,00	
	Jumlah	Rp	3.424.310.280,00	
	Jumlah mutasi bersih Aset Lain-lain			Rp (2.828.626.686,70)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020			Rp 4.894.951.639,35
Daftar Aset Lain-Lain per SKPD disajikan pada Lampiran 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.				
	Akumulasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
		(Rp)	(Rp)	
6.	Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.771.465.628,37)	(5.996.116.666,00)	

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar (Rp3.771.465.628,37) atau turun sebesar 37,10% dibandingkan dengan saldo per



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2019 sebesar (Rp5.996.116.666,00). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019

Rp (5.996.116.666,00)

Mutasi Tambah:

1. Beban penyusutan 2020	Rp	(353.048.049,71)
2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Pagar dan Kolam Koi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-Lain	Rp	(5.385.450,00)
3. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain pada Dinas Kesehatan yang terdampak kebakaran pada tahun 2020	Rp	(294.920.287,32)
4. Koreksi atas kurang catat nilai buku dan lebih catat akumulasi penyusutan Pagar dan Kolam Koi pada saat penghapusan	Rp	(16.156.350,00)
5. Koreksi atas kurang catat nilai buku dan lebih catat akumulasi penyusutan Jl. Halmahera dan Jl. Maluku sebesar di Dinas Pekerjaan Umum pada saat penghapusan	Rp	(0,34)
Jumlah	Rp	(669.510.137,37)

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan pada :		
a. Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan SK Nomor : 188.4/3/kep/410.010.2/2020 penghapusan aset-aset yang hilang karena pencurian	Rp	(20.015.458,00)
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan SK Nomor: 188.4 / 6 / KEP /410.010.2 / 2020 penghapusan Jl. Halmahera & Jl. Maluku yang dimusnahkan karena diganti baru.	Rp	(1.546.128.717,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	c. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	(312.250.000,00)
	d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	(413.115.200,00)
	e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	(10.000.000,00)
	f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berdasarkan SK Nomor : 188.4. / 7 / 410.010.2 / 2020 penghapusan software	Rp	(571.110.000,00)
	g. Bagian Umum berdasarkan SK Nomor 188 / 350 / HK / 410.010.2 / 2020 Penghapusan pagar dan kolam koi di eks Kantor Kelurahan Karangtengah di Jl Bali yang dihibahkan kepada LP Anak karena bangunan kantornya dikembalikan kepada LP Anak	Rp	(21.541.800,00)
	Jumlah	Rp	(2.894.161.175,00)
	Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	2.224.651.037,63
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	(3.771.465.628,37)
7.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
		129.442.000,00	141.920.000,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas Dibatasi Penggunaannya terdiri dari Jaminan Bongkar Sewa Reklame dan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Jaminan Bongkar Sewa Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat tersebut. Uang Jaminan Sewa Rusunawa adalah uang yang dijaminakan oleh setiap calon penghuni kepada pengelola untuk dapat tinggal di rusunawa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila penyewa yang tidak bertanggungjawab meninggalkan rumah rusak/ada barang yang hilang maka uang sebagai pengganti untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh penghuni sewa rusunawa.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.442.000,00 atau turun 8,79% dibandingkan dengan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp141.920.000,00. Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.442.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80 Rincian Kas Dibatasi Penggunaannya Tahun 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2020	2019
1.	Jaminan Bongkar Sewa Reklame	DPM Naker dan PTSP	442.000,00	1.025.000,00
2.	Jaminan Sewa Rumah Susun	Dispera	129.000.000,00	127.150.000,00
3	Utang Pihak Ketiga karena kesalahan pendebetan oleh Bank	UPTD SMPN 3	0,00	13.745.000,00
Jumlah			129.442.000,00	141.920.000,00

7.5.3.2. Kewajiban

Esensi dari Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa datang. Kewajiban dirinci menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.578.335.382,16 atau naik 63,45% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.095.925.157,99

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.578.335.382,16 atau naik



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

63,45% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.095.925.157,99

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar 100% dibandingkan saldo PFK per 31 Desember 2019 sebesar Rp300.000,00. Rincian Utang Kepada Fihak Ketiga 2020 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 81 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Utang Pemotongan PPh 21	0,00	300.000,00
	Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	300.000,00

2. Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>2.631.117.225,29</u>

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban kepada penyedia barang/jasa yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 turun 0,00% dibandingkan dengan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.631.117.225,29. Penurunan Utang Kepada pihak ketiga yang signifikan disebabkan oleh adanya reklasifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga 2020 ke rekening Utang Beban. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 2020 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 82 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	RSUD MARDI WALUYO		
	Utang beban obat-obatan	0,00	1.041.598.732,88
	Utang beban alat Kesehatan	0,00	621.760.567,41
	Utang beban bahan kimia	0,00	391.937.975,00
	Utang beban alat kesehatan pihak ke III	0,00	440.280.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2020	2019
	Utang belanja pemeliharaan gedung TK Negeri	0,00	121.794.950,00
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 Blitar (DANA BOS)		
	Utang belanja peralatan ekstrakurikuler	0,00	13.745.000,00
	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	2.631.117.225,29

3. Utang Beban	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	24.054.762.489,21	14.776.923.750,69

Utang Beban merupakan barang/jasa yang sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum terbayarkan. Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.054.762.489,21 atau naik sebesar 62,79% dibandingkan dengan saldo Saldo Utang Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.776.923.750,69. Utang Beban 2020 pada BLUD RSUD Mardi Waluyo dan seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar berupa tagihan listrik, telepon, air, internet, jasa kerja, jasa pelayanan kesehatan, premi jamkesda, bantuan sosial, dan BBM. Rincian utang beban disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 83 Rincian Utang beban per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Seluruh SKPD	BLUD	Jumlah Utang Beban 2020	Utang Beban 2019
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1	Beban listrik	838.105.978,00	116.778.956,00	954.884.934,00	531.588.149,00
2	Beban air	2.672.850,00	27.000,00	2.699.850,00	3.182.350,00
3	Beban telepon	17.403.979,00	7.807.304,00	25.211.283,00	28.965.645,00
4	Beban internet	117.983.479,00	0,00	117.983.479,00	113.833.518,00
5	Beban insentif pemungutan pajak daerah tribulan IV 2020	340.998.008,00	0,00	340.998.008,00	466.178.766,00
6	Beban insentif pemungutan retribusi daerah tribulan IV 2020	180.179.792,00		180.179.792,00	223.946.835,69
7	Beban jasa kerja	33.010.000,00	0,00	33.010.000,00	62.435.000,00
8	Beban jasa pelayanan kesehatan	70.537.720,00	16.122.444.219,00	16.192.981.939,00	13.255.960.812,00
9	Beban pelayanan yang ditanggung RSUD	0,00	54.043.683,00	54.043.683,00	52.104.683,00
10	Beban premi jamkesda	11.216.748,00	0,00	11.216.748,00	18.514.192,00
11	Beban bantuan sosial santunan kematian	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Seluruh SKPD	BLUD	Jumlah Utang Beban 2020	Utang Beban 2019
12	Beban bahan bakar minyak	10.658.004,00	8.922.900,00	19.580.904,00	6.848.800,00
13	Beban makan dan minum rapat/kegiatan	2.686.200,00	0,00	2.686.200,00	7.600.000,00
14	Beban jasa persampahan	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
15	Beban makanan dan minuman rapat/kegiatan-PROLANIS	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
16	Beban jasa tenaga ahli/narasumber-PROLANIS	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
17	Beban obat-obatan	0,00	2.656.057.499,24	2.656.057.499,24	0,00
18	Beban alat Kesehatan	0,00	2.303.436.271,97	2.303.436.271,97	0,00
19	Beban bahan kimia	0,00	806.351.898,00	806.351.898,00	0,00
20	Beban alat habis pakai pihak ke III	0,00	353.440.000,00	353.440.000,00	0,00
Jumlah		1.625.452.758,00	22.429.309.731,21	24.054.762.489,21	14.776.923.750,69

Selanjutnya informasi terkait Rincian Utang Beban per SKPD disajikan pada **Lampiran 24** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	4.902.250.123,00	333.612.682,00

Utang Jangka Pendek lainnya adalah klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.902.250.123,00 atau naik 2.070% dibandingkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp333.612.682,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya 2020 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Penerimaan Kas yang Belum teridentifikasi dan Kelebihan Pembayaran Rincian utang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil Berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021.

Tabel 84 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	2020	2019
1	Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi terdiri dari:		
	a. Dinas Pendidikan	214.266.800,00	333.612.682,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	163.080.000	0,00
	- Biaya Operasional Madrasah	57.400,00	0,00
	- Banprop HAI	0,00	0,00
	- Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non Pegawai Negeri Sipil	17.600.000,00	0,00
	- Pengelolaan Peserta didik dan pengembangan pembangunan karakter PAUD dan PNF	0,00	100.000,00
	- Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	0,00	45.497.000,00
	b. Dinas Kesehatan		
	- Pendampingan Poskestren	29.402.300,00	0,00
	- Taman Posyandu	3.875.900,00	0,00
	- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	51.238.682,00
	c. Bagian Umum		
	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke 75 Tahun 2020	251.200,00	0,00
	d. Bagian Tata Pemerintahan (Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)	0,00	1.577.000,00
	e. BPKAD (BPPDGS sebesar Rp193.200.000,00 dan Bantuan Sekolah Swasta sebesar Rp42.000.000,00)	0,00	235.200.000,00
2	Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya terdiri dari :	129.442.000,00	0,00
	a. Jaminan Bongkar Reklame (jambong) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	442.000,00	0,00
	b. Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat	129.000.000,00	0,00
3	Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 terdiri dari :	4.558.541.323,00	0,00
	a. Kelebihan Pembayaran DBH Pajak Penghasilan sampai dengan Tahun Anggaran 2018		
	- PPh 21	714.992.726,00	0,00
	- PPh 25/29	2.477.080.365,00	0,00
	b. Kelebihan Pembayaran DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sampai		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	dengan Tahun Anggaran 2018		
	- Minyak Bumi 15%	1.271.855.488,00	0,00
	- Minyak Bumi 0,5 %	91.640.344,00	0,00
	c. Kelebihan Pembayaran DBH PBB Tahun Anggaran 2019		
	- Bagian Daerah Perhutanan	2.853.600,00	0,00
	- Biaya Pemungutan Perhutanan	118.800,00	0,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	4.902.250.123,00	333.612.682,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5. Pendapatan Diterima di Muka	(Rp)	(Rp)
	621.322.769,95	225.796.500,01

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah namun belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar bagian manfaat yang belum diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp621.322.769,95 atau naik sebesar 175,17% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.796.500,01 yang terdiri dari:

**Tabel 85 Rincian Pendapatan Diterima di Muka
per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)				
No	SKPD	2020	2019	Keterangan
1	RSUD Mardi Waluyo	16.333.333,33	15.666.666,67	Pendapatan sewa tanah Kantor & ATM BPD Jatim, ATM Mandiri, ATM BRI
1	BPKAD	84.000.000,00	84.000.000,00	Fasilitas Umum - Sewa Tanah SPBU Kebonrojo
2	BPKAD	6.686.258,33	14.101.926,67	Fasilitas Umum - ATM BRI
3	BPKAD	61.038.739,00	0,00	Fasilitas Umum - ATM BPD Jatim dan PIPP
4	BPKAD	20.908.800,00	28.749.600,00	Fasilitas Umum - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Sananwetan
5	BPKAD	11.644.160,00	16.010.720,00	Fasilitas Umum - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Bendogerit



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	2020	2019	Keterangan
6	BPKAD	7.180.140,00	16.100.920,00	Fasilitas Umum - ATM Bank Mandiri
7	BPKAD	92.326.000,00	0,00	Fasilitas Umum-Sewa Tanah pada Alun-alun, Taman Pecut, Stadion Soeprijadi, PIPP, Taman Kebon rojo, Museum Bung Karno, GOR Soekarno Hatta , Makam Bung Karno, Pasar Legi, Agrowisata Blimbing
8	BPKAD	2.205.875,00	0,00	Fasilitas Umum-Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo
9	BPKAD	8.855.416,67	0,00	Fasilitas Umum- Pembangunan dan Penempatan jaringan utilitas kabel fiber optik dan pemasangan tiang untuk kabel udara
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.958.333,33	24.750.000,00	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
11	Kecamatan Sukorejo	48.685.714,29	26.416.666,67	Fasilitas Umum – Sewa Agrowisata Belimbing Karangsari
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	247.500.000,00	0,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Menyewa Waterpark Sumberudel Kota Blitar
Total		621.322.769,95	225.796.500,01	

Rincian mutasi Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal

225.796.500,01

Mutasi Tambah :

Dampak Kumulatif Kurang Catat Saldo

Awal Pendapatan Diterima di Muka

0,00

Realisasi LRA Tahun 2020

570.778.411,62



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Mutasi Tambah	570.778.411,62
<u>Mutasi Kurang :</u>	
Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas tahun sebelumnya menjadi Pendapatan LO TA 2020	<u>175.252.141,68</u>
Jumlah Mutasi Kurang	175.252.141,68
Jumlah Mutasi Bersih	395.526.269,94
Saldo Akhir	621.322.769,95

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di Lingkungan PIPP Kota Blitar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan , Penempatan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Micro Cell Pole (MCP) Antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Dayamitra Telekomunikasi dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Sewa Menyewa Hak Atas tanah yang berlokasi di Lingkungan Kantor Walikota Blitar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan , Penempatan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Micro Cell Pole (MCP) Antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Dayamitra Telekomunikasi dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Sewa Tanah Aset Pemerintah Kota Blitar Antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Moderna Tehnik Perkasa dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2021;
6. Sewa Menyewa antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar (Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi) dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2021;
7. Sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi bersama dan fasilitas penunjangnya dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2021;
8. Sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung antara Dinas



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan PT.Telekomunikasi Seluler dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

9. Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri Bank Jatim antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2021;
10. Sewa Menyewa antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar (Sewa Bangunan Kantor Kas Bank Jatim) dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan 25 April 2021;
11. Perpanjangan Sewa Lokasi ATM antara RSUD Mardi Waluyo dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021;
12. Sewa Menyewa Waterpark Sumberudel Kota Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 20 Nopember 2021;
13. Sewa Tanah milik Pemerintah Kota Blitar Pada Area Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kota Blitar antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Mega Akses Perkasa dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2025;
14. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo antara Pemerintah Kota Blitar dengan PDAM dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2025;
15. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT. Supra Primatama Nusantara (BIZNET) Tentang sewa tanah milik Pemerintah Kota Blitar pada area Ruang Milik Jalan di Wilayah Kota Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 2 Juni 2025; dan
16. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di lingkungan PIPP Kantor Walikota Kota Blitar dan di Lingkungan PIPP antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT. BPD Jawa Timur Cabang Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Desember 2025.
17. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah, Bangunan, dan Pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karang Sari yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 24 April 2021.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Metode pengakuan pendapatan terutang atas perjanjian yang disusun pada tanggal pertengahan bulan berjalan yaitu dengan menghitung masa manfaat terutang pada awal bulan berikutnya.

Selanjutnya, informasi terkait perhitungan pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 yang menyajikan nomor perjanjian, jangka waktu perjanjian, nilai perjanjian, dan perhitungan secara rinci disajikan pada **Lampiran 25** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

6.	Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
		0,00	128.175.000,00

Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya adalah uang yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan.

Saldo Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan saldo Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp128.175.000,00. Saldo Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya terdiri dari saldo Jaminan Bongkar Reklame (jambong) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan saldo Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat yang direklas ke akun utang jangka pendek lainnya.

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika kewajiban tersebut jatuh tempo lebih dari satu Tahun setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Blitar tidak mempunyai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020.

7.5.3.2.3. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	2.565.469.218.822,12	2.626.637.116.873,18

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Blitar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Blitar. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.565.469.218.822,12 turun sebesar 2,33%



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2019 sebesar Rp2.626.637.116.873,18.

7.5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

7.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO. Realisasi Pendapatan Tahun 2020 LO sebesar Rp860.098.294.124,93. Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 86 Rincian Pendapatan—LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan %
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	156.129.107.599,29	178.822.948.907,70	(12,69)
2	Pendapatan Transfer – LO	677.723.841.938,00	773.861.717.755,00	(12,42)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	26.245.344.587,64	74.141.058.896,80	(64,60)
Jumlah		860.098.294.124,93	1.026.825.725.559,50	(16,24)

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp156.129.107.599,29 mengalami penurunan sebesar 12,69% dibandingkan tahun 2019 Rp178.822.948.907,70. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 87 Rincian Pendapatan Asli Daerah—LO
Tahun Anggaran 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	37.826.418.938,90	45.340.370.942,53	(16,57)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.546.286.860,67	10.291.269.455,50	(36,39)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	818.777.448,80	997.102.292,74	(17,88)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.937.624.350,92	122.194.206.216,93	(9,21)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	156.129.107.599,29	178.822.948.907,70	(12,69)
---------------	--------------------	--------------------	---------

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2. Pendapatan Pajak Daerah – LO	37.826.418.938,90	45.340.370.942,53

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh BPKAD Kota Blitar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2020 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2020. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp37.826.418.938,90 mengalami penurunan sebesar 16,57% dibandingkan Tahun 2019 Rp45.340.370.942,53. Berikut adalah perhitungan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2020.

Pajak Daerah – Laporan Realisasi Anggaran **Rp 37.530.670.035,90**

Mutasi Tambah:

1	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020	Rp 8.882.141.610,00
2	Pendapatan diterima di muka Pajak Daerah per 31 Desember 2019	Rp 0
3	Kas di Bendahara Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2020	Rp 300.000,00
4	Dampak Kumulatif atas lebih catat Piutang Pajak Daerah	Rp 1.750.000,00

Jumlah	Rp 8.884.191.610,00
---------------	----------------------------

Mutasi Kurang:

1	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019	Rp 8.566.328.579,00
2	Dampak Kumulatif atas kurang catat Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 400.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2019	Rp 10.514.579,00
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Pajak Daerah	Rp 11.199.549,00

Jumlah	Rp 8.588.442.707,00
---------------	----------------------------

Jumlah mutasi bersih	Rp 295.748.903,00
----------------------	-------------------

Pajak Daerah- Laporan Operasional	Rp 37.826.418.938,90
--	-----------------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 88 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO
Tahun Anggaran 2020 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	610.460.773,00	1.102.357.060,00	(44,62)
2	Pajak Restoran-LO	3.325.425.430,00	4.573.815.103,60	(27,29)
3	Pajak Hiburan-LO	321.052.935,00	2.078.900.683,00	(84,56)
4	Pajak Reklame-LO	418.148.897,90	628.799.066,93	(33,50)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	10.517.597.333,00	10.373.567.262,00	1,39
6	Pajak Parkir-LO	118.246.511,00	339.963.031,00	(65,22)
7	Pajak Air Tanah-LO	54.135.765,00	63.280.814,00	(14,45)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	12.998.705.819,00	12.663.256.122,00	2,65
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	9.462.645.475,00	13.516.431.800,00	(29,99)
Jumlah		37.826.418.938,90	45.340.370.942,53	(16,57)

3. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	6.546.286.860,67	10.291.269.455,50

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kota Blitar dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Blitar didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Operasional Retribusi Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp6.546.286.860,67 mengalami penurunan sebesar 36,39% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp10.291.269.455,50. Berikut adalah perhitungan atas Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2020.

Retribusi Daerah - Laporan Realisasi Anggaran	Rp	6.681.655.444,00
Mutasi tambah :		
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020	Rp	7.156.884.515,00
Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah per 31 Desember 2020	Rp	8.198.000,00
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2019	Rp	24.750.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	7.189.832.515,00
Mutasi Kurang :		
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019	Rp	7.035.399.765,00
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2020	Rp	261.458.333,33
Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah per 31 Desember 2019	Rp	7.898.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Retribusi	Rp	20.445.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	7.325.201.098,33	
Jumlah Mutasi Bersih			Rp (135.368.583,33)
Retribusi Daerah- Laporan Operasional			Rp 6.546.286.860,67

Rincian penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 89 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	3.508.850.104,00	5.098.579.573,00	(31,18)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	523.368.004,00	1.254.259.472,00	(58,27)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	210.029.000,00	263.623.000,00	(20,33)
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.280.344.000,00	1.791.873.000,00	(28,55)
	Retribusi Pelayanan Pasar	850.962.000,00	1.034.457.000,00	(17,74)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	442.244.400,00	527.227.901,00	(16,12)
	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	18.480.000,00	23.400.000,00	(21,03)
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	5.170.000,00	10.900.000,00	(52,57)
	Sewa Alat-alat Berat/Walls	6.400.000,00	24.650.000,00	(74,04)
	Pelayanan Pemeriksaan Lab kesehatan Lingkungan	151.680.000,00	150.470.000,00	0,80
	Retribusi Tera Ulang	20.172.700,00	17.719.200,00	13,85
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.601.074.756,67	4.317.307.382,50	(39,75)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.029.625.590,00	1.795.033.382,50	(42,64)
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	158.991.666,67	136.825.000,00	16,20
	Retribusi Terminal	115.716.500,00	117.722.000,00	(1,70)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	458.754.000,00	676.242.000,00	(32,16)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	325.589.000,00	315.877.000,00	3,07
	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	93.985.000,00	171.365.000,00	(45,16)
	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran-LO	46.053.000,00	60.591.000,00	(23,99)
	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	372.360.000,00	1.043.652.000,00	(64,32)
3	Retribusi Perijinan Tertentu-LO	436.362.000,00	875.382.500,00	(50,15)
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	435.905.000,00	873.989.500,00	(50,12)
	Retribusi Ijin Trayek	457.000,00	1.393.000,00	(67,19)
	Jumlah (1+2+3)	6.546.286.860,67	10.291.269.455,50	(36,39)

Pendapatan Hasil Pengelolaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	(Rp)	(Rp)
	818.777.448,80	997.102.292,74

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Blitar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yaitu Penyertaan Modal pada PT Bank Jawa Timur dan PD BPR Artha Praja. Realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp818.777.448,80 mengalami penurunan sebesar (17,88)% dibandingkan Pendapatan LO 2019 sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp997.102.292,74. Perhitungan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Laporan Realisasi Anggaran **Rp 1.041.098.840,30**

Mutasi tambah :

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 Rp 0,00

Jumlah Mutasi Tambah **Rp 0,00**

Mutasi Kurang :

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 Rp 222.321.391,50

Jumlah Mutasi Kurang **Rp 222.321.391,50**

Jumlah Mutasi Bersih **Rp (222.321.391,50)**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Laporan Operasional **Rp 818.777.448,80**

Rincian penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD-LO			
A	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT Bank Jawa timur	818.777.448,80	774.780.901,24	5,68
B	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD BPR Artha Praja	0,00	222.321.391,50	(100,00)
	Jumlah	818.777.448,80	997.102.292,74	(17,88)

Pemerintah Kota Blitar dalam menghitung pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menggunakan metode ekuitas (kepemilikan diatas 50%) yaitu pendapatan diakui sebesar laba BUMD yang diperoleh untuk PD BPR Artha Praja dan proporsional untuk PT Bank Jawa Timur sesuai hasil RUPS (metode perolehan).

5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
		110.937.624.350,92	122.194.206.216,93

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode tahun anggaran 2020. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp110.937.624.350,92, mengalami penurunan sebesar 9,21% dibandingkan Pendapatan LO Tahun 2019 terealisasi



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp122.194.206.216,93. Perhitungan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Laporan Realisasi Anggaran **Rp 129.337.214.124,03**

Mutasi tambah :

1	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020	Rp	25.071.013.723,79
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp	201.046.500,01
3	Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020	Rp	2.645.434,52
4	Dampak Kumulatif atas lebih catat piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan	Rp	2.920.085.751,38
5	Biaya Kliring penerimaan Klaim RSUD Mardi Waluyo	Rp	734.220,00
6	Kas di Bendahara Lainnya	Rp	44.957.965,73
7	Beban administrasi pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	Rp	7.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	28.240.490.595,43

Mutasi Kurang :

1	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp	45.669.947.272,37
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020	Rp	359.864.436,62
3	Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp	69.355.391,21
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan	Rp	601.278,64
5	Penghapusan aset (kendaraan roda empat)	Rp	73.230.000,00
6	Pembayaran Kas Di Bendahara Lainnya	Rp	10.779.489,70
7	Pembayaran TPTGR	Rp	456.302.500,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	46.640.080.368,54

Jumlah Mutasi Bersih

Rp (18.399.589.773,11)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan - Laporan Operasional

Rp 110.937.624.350,92



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan %
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	46.470.000,00	178.214.499,00	(73,92)
A	Penjualan hasil penebangan pohon	11.200.000,00	14.840.000,00	(24,53)
B	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	0,00	132.550.999,00	(100,00)
C	Penjualan hasil pertanian	3.480.000,00	5.400.000,00	(35,56)
D	Penjualan hasil perikanan	25.590.000,00	25.423.500,00	0,65
E	Penjualan Hasil Peternakan	6.200.000,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	1.870.355.765,50	3.449.859.650,70	(45,78)
3	Pendapatan Bunga –LO	2.985.968.780,89	1.936.174.173,12	54,22
A	Bank Jatim	1.158.082.191,58	571.318.493,05	102,70
B	Bank BNI 46	475.329.457,00	450.672.599,14	5,47
C	Bank Mandiri	397.376.691,00	318.976.289,76	24,58
D	Bank BRI	528.763.002,00	407.474.283,36	29,77
E	Bank BTN	413.506.849,31	174.821.917,81	136,53
F	PDAM	12.910.590,00	12.910.590,00	0,00
4	Lain - lain/Pembulatan Gaji-LO	17.847,00	122.610,00	(85,44)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	372.767.519,00	446.520.077,75	(16,52)
A	Bidang Pendidikan	1.391.068,00	9.534.450,00	(85,41)
B	Bidang Kesehatan	0,00	84.403.657,71	(100,00)
C	Bidang Pekerjaan Umum	4.111.777,00	338.390.892,11	(98,78)
D	Bidang Lingkungan Hidup	0,00	5.819.924,64	(100,00)
E	Bidang Pariwisata	2.510.950,00	8.371.153,29	(70,00)
F	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	9.031.700,00	0,00	0,00
G	Bidang Komunikasi dan Informatika	351.186.024,00	0,00	0,00
H	Bidang Pengawasan	4.536.000,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak-LO	44.570.027,50	602.424.172,00	(92,60)
A	Denda Pajak Bumi dan Bangunan	44.570.027,50	602.424.172,00	(92,60)
7	Pendapatan Denda Retribusi-LO	72.963.500,00	213.072.000,00	(65,76)
A	Denda Retribusi Jasa Umum	72.531.500,00	109.700.000,00	(33,88)
B	Denda Retribusi Jasa Usaha	432.000,00	103.372.000,00	(99,58)
8	Pendapatan Denda Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	0,00	250.000,00	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian –LO	1.289.862.996,68	394.564.471,00	226,91
A	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	1.289.862.996,68	394.564.471,00	226,91
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum-LO	1.480.323.640,05	1.442.922.942,99	2,59
A	Fasilitas Umum	1.338.519.850,05	1.269.969.446,99	5,40
B	Fasilitas Rusunawa	141.803.790,00	172.953.496,00	(18,01)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	96.073.815.818,40	107.632.781.642,76	(10,74)
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	724.073,62	0,00	0,00
A	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir KPUK BNI	724.073,62	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan %
13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	6.146.508.600,00	5.355.828.300,00	14,76
A	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjen Kidul	1.984.641.300,00	1.637.209.200,00	21,22
B	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	1.900.054.800,00	1.628.120.400,00	16,70
C	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	2.261.812.500,00	2.090.498.700,00	8,19
14	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran	161.749,20	4.239.166,00	(96,18)
A	Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	10.000,00	50.900,00	(80,35)
B	Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah	88.000,00	3.899.000,00	(97,74)
C	Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang sah	63.749,20	289.266,00	(77,96)
15	Lain Lain PAD yang sah Lainnya – LO	7.853.729,87	1.367.200,00	474,44
16	BPJS Kesehatan Non Kapitasi	463.299.837,00	516.756.100,00	(10,34)
17	Hasil Eksekusi Jaminan	81.959.814,35	18.401.447,65	345,40
A	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	75.380.500,00	8.824.223,94	754,25
B	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	6.579.314,35	9.577.223,71	(31,30)
18	Pendapatan Bunga Tabungan- LO	651,86	707.763,96	(99,91)
Jumlah 1 s/d 18		110.937.624.350,92	122.194.206.216,93	(9,21)

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 sebesar Rp677.723.841.938,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perhitungan atas Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Transfer - Laporan Realisasi Anggaran Rp 688.978.396.667,00

Mutasi tambah :

1	Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020	Rp 11.163.183.924,00
2	Dampak Kumulatif Lebih Catat Piutang	Rp 10.339.997.664,00

Jumlah Mutasi Tambah Rp 21.503.181.588,00

Mutasi Kurang :

1	Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2019	Rp 27.984.928.194,00
2	Utang Transfer Pemerintah Pusat	Rp 4.558.541.323,00
3	Sisa Bantuan Keuangan Provinsi yang diterima tahun 2020 yang belum disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Rp 214.266.800,00

Jumlah Mutasi Kurang Rp 32.757.736.317,00
Jumlah Mutasi Bersih Rp (11.254.554.729,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Transfer - Laporan Operasional

Rp 677.723.841.938,00

Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	546.550.970.475,00	641.979.344.464,00	(14,86)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	56.837.217.000,00	51.430.800.000,00	10,51
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	74.335.654.463,00	80.451.573.291,00	(7,60)
Jumlah		677.723.841.938,00	773.861.717.755,00	(12,42)

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	546.550.970.475,00	641.979.344.464,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2020 sebesar Rp546.550.970.475,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 93 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan %
1	Bagi Hasil Pajak	33.917.440.113,00	42.515.389.332,00	(20,22)
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2.894.125.822,00	4.381.586.509,00	(33,95)
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri	13.664.652.291,00	11.905.625.329,00	14,77
	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	17.358.662.000,00	26.228.177.494,00	(33,82)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	33.793.709.855,00	76.309.046.859,00	(55,71)
	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	29.017.602.375,00	65.153.062.564,00	(55,46)
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	2.765.293.225,00	8.763.773.812,00	(68,45)
	Bagi Hasil Pertambangan Umum Royalti	647.749.055,00	1.381.798.587,00	(53,12)
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	35.924.375,00	38.789.197,00	(7,39)
	Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	225.660.825,00	207.161.707,00	8,93
	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	1.101.480.000,00	764.460.992,00	44,09
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	393.568.516.000,00	430.364.698.000,00	(8,55)
4	Dana Alokasi Umum Tambahan	7.350.000.000,00	7.411.761.000,00	(0,83)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan %
5	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	77.921.304.507,00	85.378.449.273,00	(8,73)
	DAK Bidang Pendidikan	8.126.417.903,00	4.841.763.342,00	67,84
	DAK Bidang Kesehatan	9.781.556.520,00	7.897.897.386,00	23,85
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	5.508.759.640,00	9.013.132.350,00	(38,88)
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	2.107.876.970,00	(100,00)
	DAK Bidang Sanitasi (reguler)	1.799.347.000,00	1.028.239.000,00	74,99
	DAK Bidang Pertanian	0,00	2.547.599.701,00	(100,00)
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	641.094.443,00	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.142.803.000,00	3.209.644.000,00	(33,24)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	0,00	1.172.921.600,00	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Bidang KB (penugasan)	1.196.577.252,00	1.008.802.900,00	18,61
	DAK Bidang Sanitasi (penugasan)	274.300.000,00	445.200.000,00	(38,39)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	988.920.850,00	1.099.104.511,00	(10,02)
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.838.638.132,00	3.524.945.350,00	(19,47)
	Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru	37.947.222.000,00	40.291.163.325,00	(5,82)
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	4.785.769.160,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	0,00	2.935.551.276,00	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Penyelenggaraan Pendidikan	1.140.450.000,00	1.828.100.000,00	(37,62)
	Dana Alokasi Khusus Koperasi dan UKM	464.332.613,00	470.000.000,00	(1,21)
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataaan	156.100.800,00	521.736.000,00	(70,08)
	Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru	12.825.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan	757.284.637,00	793.677.119,00	(4,59)
	Jumlah	546.550.970.475,00	641.979.344.464,00	(14,86)

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	(Rp)	(Rp)
	56.837.217.000,00	51.430.800.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2020 sebesar Rp56.837.217.000,00 merupakan insentif daerah. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,51% dibandingkan pendapatan pada Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp51.430.800.000,00.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Transfer Pemerintah Provinsi—LO	(Rp)	(Rp)
	74.335.654.463,00	80.451.573.291,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur – LO Tahun 2020 sebesar Rp74.335.654.463,00 dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Transfer Pemerintah Provinsi - Laporan Realisasi Anggaran **Rp 72.066.616.195,00**

Mutasi tambah :

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 Rp 5.563.388.916,00

Jumlah Mutasi Tambah Rp 5.563.388.916,00

Mutasi Kurang :

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2019 Rp 3.080.083.848,00

Sisa Bantuan Keuangan Provinsi yang diterima tahun 2020 yang belum disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp 214.266.800,00

Jumlah Mutasi Kurang Rp 3.294.350.648,00

Mutasi Bersih Rp 2.269.038.268,00

Transfer Pemerintah Provinsi – LO **Rp 74.335.654.463,00**

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.183.193.882,00	25.861.006.458,00	(25,82)
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.770.038.121,00	11.593.325.833,00	(32,98)
3	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.375.621.045,00	20.072.488.448,00	(28,38)
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	200.953.509,00	216.577.401,00	(7,21)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	31.182.555.706,00	21.168.228.833,00	47,31
6	Bantuan Keuangan Provinsi	1.623.292.200,00	1.539.946.318,00	5,41
Jumlah		74.335.654.463,00	80.451.573.291,00	(7,60)

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Lainnya yang Sah—LO	(Rp)	(Rp)
	26.245.344.587,64	74.141.058.896,80

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp26.245.344.587,64 merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar 64,60% dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar Rp74.141.058.896,80. Mutasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Lainnya yang Sah – LRA	Rp 17.307.870.000,00
Mutasi tambah : Pendapatan Hibah	Rp 8.937.474.587,64
Mutasi Kurang:	Rp 0,00
Pendapatan Lainnya yang Sah – LO	Rp 26.245.344.587,64

Unsur Pendapatan Lain-lain yang Sah dari Pendapatan Lainnya Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO
(dalam Rupiah)

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	Nominal
1	Pendapatan Hibah BOSNAS	17.307.870.000,00
2	Pendapatan Hibah Barang Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan KB	82.915.200,00
3	Pendapatan Hibah persediaan cetak dari Pemerintah Pusat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	232.562.000,00
4	Pendapatan Hibah tanah dari Pemerintah Pusat ke Kecamatan Sananwetan	126.825.000,00
5	Pendapatan Hibah persediaan obat-obatan, bahan kesehatan, pakaian kerja lapangan, perlengkapan dan atribut pakaian kerja lapangan dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	82.424.000,00
6	Pendapatan Hibah persediaan bahan kesehatan dari Pemerintah Propinsi ke Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	186.088.500,00
7	Pendapatan Hibah persediaan bahan kesehatan dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.250.000,00
8	Pendapatan Hibah berupa aset tetap dari Pemerintah Propinsi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	250.797.619,05
9	Pendapatan Hibah persediaan bahan kesehatan dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.045.600,00
10	Pendapatan Hibah berupa aset tetap dari Pemerintah Pusat ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,00
11	Pendapatan Hibah barang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ke Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	30.745.000,00
12	Pendapatan Hibah Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ke Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	1.705.770.460,00
13	Pendapatan Hibah berupa aset tetap dari Pemerintah Pusat ke Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	1,00
14	Pendapatan Hibah persediaan obat-obatan, bahan kesehatan dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Kesehatan	6.204.271.205,59
15	Pendapatan Hibah barang dari PT. Petrokimia Gresik ke UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	21.780.000,00
	Jumlah	26.245.344.587,64

7.5.4.2 BEBAN LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	293.703.698.073,00	310.084.447.278,09



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp293.703.698.073,00 atau turun 5,28% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp310.084.447.278,09. Rincian Beban Pegawai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 96 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	235.726.562.022,00	241.468.852.059,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	44.930.463.776,00	56.187.922.824,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	4.274.738.000,00	3.934.224.100,00
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	224.794.735,00	351.082.303,09
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	1.063.789.024,00	1.732.902.542,00
6	Uang Lembur-LO	653.005.000,00	328.596.500,00
7	Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit	6.830.345.516,00	6.080.866.950,00
Jumlah		293.703.698.073,00	310.084.447.278,09

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Persediaan	(Rp)	(Rp)
	127.171.341.124,14	113.706.236.916,26

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode Harga Pembelian Terakhir. Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 sebesar Rp127.171.341.124,14 atau naik 11,84% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp113.706.236.916,26. Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 97 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	14.101.387.077,21	12.613.827.025,86
2	Beban Bahan/Material	25.354.712.713,74	12.905.383.747,22
3	Beban Publikasi	7.765.776.520,00	5.745.530.725,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	10.483.335.800,50	12.489.013.585,44
5	Beban Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Atribut Dinas	465.082.400,00	557.329.565,00
6	Beban Pakaian Kerja	3.173.683.490,00	2.525.072.815,00
7	Beban Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	3.496.923.530,00	5.215.651.875,00
8	Beban Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00
9	Beban Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
10	Beban Barang/Jasa Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.742.203.144,34	9.424.387.537,46
11	Beban Materi Pendidikan dan Perlengkapan Siswa	6.974.099.555,00	7.083.264.851,00
12	Beban Persediaan BLUD	46.614.136.893,35	45.146.775.189,28
Jumlah		127.171.341.124,14	113.706.236.916,26

7.5.4.2.3 Beban Jasa

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Beban Jasa	189.083.228.287,32	190.683.550.907,94

Jumlah Beban Jasa pada tahun 2020 sebesar Rp189.083.228.287,32 atau turun 0,84% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp190.683.550.907,94. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Honorarium PNS	3.179.846.000,00	3.454.436.000,00
2	Honorarium Non PNS	3.470.407.765,00	5.318.898.245,00
3	Beban Jasa Kantor	82.995.643.396,72	78.557.930.632,30
4	Beban Premi Asuransi	18.246.780.901,00	9.765.439.249,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	3.603.001.494,00	3.616.305.822,00
6	Beban Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	282.588.300,00	1.405.972.100,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	155.964.900,00	654.867.250,00
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.815.147.558,33	6.346.389.640,00
9	Beban Makanan dan Minuman	21.686.077.411,00	27.949.995.671,00
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2.629.103.622,00	9.866.979.903,00
11	Beban Jasa Konsultansi	6.395.653.326,41	7.340.514.908,40
12	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	458.450.000,00	1.129.908.800,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.413.462.916,00	7.895.106.418,00
14	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat	0,00	0,00
15	Beban Jasa BLUD	38.751.100.696,86	27.380.806.269,24
Jumlah		189.083.228.287,32	190.683.550.907,94

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Beban Pemeliharaan	37.071.258.760,27	28.750.894.250,75



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2020 sebesar Rp37.071.258.760,27 atau naik 28,94% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp28.750.894.250,75. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Pemeliharaan Jalan	1.489.056.807,00	1.512.953.009,00
2	Beban Pemeliharaan Jembatan	99.717.000,00	98.966.755,00
3	Beban pemeliharaan Gedung	11.792.645.208,07	9.250.236.092,94
4	Beban pemeliharaan Bangunan bukan Gedung	3.612.104.423,53	3.370.408.463,94
5	Beban pemeliharaan Mebeulair	386.583.000,00	321.072.935,00
6	Beban pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya	1.025.584.349,00	1.055.626.670,00
7	Beban Pemeliharaan <i>Software</i>	478.466.941,67	383.619.533,33
8	Beban Pemeliharaan Air Conditioner /AC	442.088.500,00	391.906.950,00
9	Beban pemeliharaan peralatan/mesin kantor	117.205.700,00	128.707.900,00
10	Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	337.135.450,00	353.953.900,00
11	Beban pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	68.626.900,00	45.765.000,00
12	Beban pemeliharaan Alat - alat studio	83.292.150,00	115.874.900,00
13	Beban pemeliharaan Alat - Alat kedokteran/kesehatan	148.483.000,00	38.570.900,00
14	Beban pemeliharaan Alat - alat Berat	201.161.000,00	287.859.000,00
15	Beban pemeliharaan Alat - alat bengkel/mesin	123.437.466,00	123.400.000,00
16	Beban pemeliharaan alat - alat Kesenian/Kebudayaan dan Olahraga	39.106.450,00	53.374.700,00
17	Beban pemeliharaan alat - alat Pertanian dan Perkebunan	9.502.000,00	633.500,00
18	Beban pemeliharaan alat laboratorium	41.325.000,00	56.145.500,00
19	Beban pemeliharaan alat - alat ukur	600.000,00	600.000,00
20	Beban pemeliharaan buku/kepuustakaan	727.000,00	2.890.200,00
21	Beban pemeliharaan Jaringan Air (kanal,irigasi,reservoir,air bersih/minum,saluran drainase/gorong-gorong)	1.877.237.605,00	2.647.476.260,36
22	Beban pemeliharaan Jaringan Listrik penerangan jalan umum, taman dan hutan kota	5.298.135.300,00	126.780.600,00
23	Beban Pemeliharaan Rambu - rambu Lalu lintas	768.373.936,00	485.184.394,00
24	Beban pemeliharaan instalasi telepon, internet dan listrik gedung	620.028.100,00	223.404.200,00
25	Beban pemeliharaan peralatan dapur/rumah tangga	14.094.600,00	12.652.000,00
26	Beban pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga	77.720.650,00	30.833.550,00
27	Beban pemeliharaan tugu/tanda batas	10.830.000,00	3.915.000,00
28	Beban pemeliharaan trotoar	240.731.700,00	299.164.822,00
29	Beban Pemeliharaan alat - alat angkutan darat tidak bermotor		48.971.232,00
30	Beban Pemeliharaan Alat-alat Persampahan	311.908.025,00	205.408.925,00
31	Beban pemeliharaan alat-alat peternakan dan perikanan	14.840.000,00	7.575.000,00
32	Belanja pemeliharaan alat - alat Persenjataan/Keamanan	208.366.350,00	101.519.600,00
33	Beban pemeliharaan jaringan komputer peralatan sistem teknologi informasi	303.260.600,00	130.675.500,00
34	Beban pemeliharaan alat-alat bantu (feeder,compressor,electric generating set,pompa,mesin bor,unit pemeliharaan lapangan,alat pengolahan air kotor)	196.545.500,00	179.526.200,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
35	Beban pemeliharaan peralatan pemancar	89.591.000,00	177.470.820,00
36	Beban pemeliharaan bangunan bersejarah	46.800.000,00	
37	Beban pemeliharaan BLUD	6.495.947.049,00	6.477.770.238,18
Jumlah		37.071.258.760,27	28.750.894.250,75

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Perjalanan Dinas	(Rp)	(Rp)
	15.481.707.985,00	32.218.513.371,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2020 sebesar Rp15.481.707.985,00 atau turun 51,95% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp32.218.513.371,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	980.000,00	7.674.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	14.939.071.877,00	26.351.810.626,00
3	Beban perjalanan dinas luar daerah untuk masyarakat	228.504.395,00	3.734.598.485,00
4	Beban perjalanan dinas BLUD	313.151.713,00	2.124.430.260,00
Jumlah		15.481.707.985,00	32.218.513.371,00

7.5.4.2.6 Beban Bunga

Tidak terdapat realisasi Beban Bunga pada TA 2020.

7.5.4.2.7 Beban Subsidi

Tidak terdapat realisasi Beban Subsidi pada TA 2020.

7.5.4.2.8 Beban Hibah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Hibah	(Rp)	(Rp)
	42.196.696.114,00	26.364.130.800,00

Jumlah Beban Hibah pada Tahun 2020 sebesar Rp42.196.696.114,00 atau naik 60,05% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp26.364.130.800,00. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 101 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.455.000.000,00	4.045.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	7.038.600.000,00	9.645.510.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
3	Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6.009.473.000,00	11.088.100.000,00
4	Beban Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.654.395.000,00	0,00
5	Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	1.335.600.000,00	0,00
6	Beban Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.703.628.114,00	1.585.520.800,00
Jumlah		42.196.696.114,00	26.364.130.800,00

7.5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	32.895.180.898,00	23.400.660.987,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2020 sebesar Rp32.895.180.898,00 atau naik 40,57% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp23.400.660.987,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	16.087.563.398,00	4.850.947.500,00
3	Beban Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	16.807.617.500,00	18.549.713.487,00
Jumlah		32.895.180.898,00	23.400.660.987,00

7.5.4.2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	148.160.910.964,99	120.957.690.526,75

Jumlah Beban Penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp148.160.910.964,99 atau naik 22,49% dengan tahun 2019 sebesar Rp120.957.690.526,75 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	78.700.838.522,97	49.179.785.123,31
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.723.107.776,20	31.396.417.457,51
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.889.124.141,11	39.005.962.535,85
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.494.792.475,00	924.062.986,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	353.048.049,71	451.462.424,08
Jumlah		148.160.910.964,99	120.957.690.526,75



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.2.11 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>1.835.975.365,96</u>	<u>1.294.160.610,00</u>

Jumlah Beban Amortisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp1.835.975.365,96 atau naik 41,87% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp1.294.160.610,00. Beban Amortisasi tersebut merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

7.5.4.2.12 Beban Transfer

Beban Transfer	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>546.889.575,00</u>	<u>522.520.505,00</u>

Jumlah Beban Transfer pada Tahun 2020 sebesar Rp546.889.575,00 atau naik 4,66% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp522.520.505,00. Beban Transfer tersebut merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	205.368.700,00	217.991.400,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	60.568.475,00	70.968.350,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	77.061.450,00	57.548.715,00
4	Partai Persatuan Pembangunan	58.968.650,00	46.559.400,00
5	Partai Demokrat	39.006.175,00	34.863.300,00
6	Partai Nasional Demokrat	0,00	14.546.200,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	22.211.225,00	20.202.300,00
8	Partai Golongan Karya	56.957.625,00	31.689.875,00
9	Partai Keadilan Sejahtera	26.747.275,00	21.063.285,00
10.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Malang	0,00	7.087.680,00
Jumlah		546.889.575,00	522.520.505,00

7.5.4.2.13 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>586.864.159,98</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2020 sebesar Rp586.864.159,98 atau naik 100% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp0,00 karena adanya reklasifikasi beban penyisihan piutang dari beban lain-lain. Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 105 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	356.174.542,10	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	122.355.570,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	91.671.103,98	0,00
4	Beban Penyisihan BLUD	16.662.943,90	0,00
Jumlah		586.864.159,98	0,00

7.5.4.2.14 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>6.103.471.069,68</u>	<u>6.015.652.781,81</u>

Jumlah Beban Lain-lain pada Tahun 2020 sebesar Rp6.103.471.069,68 atau naik 1,46% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp6.015.652.781,81. Pada Tahun 2020, adanya reklasifikasi atas penurunan Nilai Investasi BPR Artha Praja dan PDAM Kota Blitar dari defisit kegiatan non operasional ke beban lain-lain. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja Barang dan Modal Non Kapitalisasi	4.274.520.494,00	4.613.038.301,00
2	Beban Lain-lain BLUD	288.604.442,00	141.669.473,30
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	1.096.771.007,51
4	Beban Penyisihan (Investasi) Tak Tertagih	82.087.000,00	164.174.000,00
5	Penurunan Nilai Investasi BPR Artha Praja	725.506.101,50	0,00
6	Penurunan Nilai Investasi PDAM Kota Blitar	732.753.032,18	0,00
Jumlah		6.103.471.069,68	6.015.652.781,81

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>(34.738.928.252,41)</u>	<u>172.827.266.624,90</u>

Surplus dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional -LO dan Beban Operasional – LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2020 adalah sebesar (Rp34.738.928.252,41).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(13.731.509.765,34)	(19.580.056.317,17)

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2020 sebesar (Rp13.731.509.765,34) terdiri dari:

1. (Rp140.334.000,00) atas defisit penjualan aset non lancar untuk penjualan mobil Sedan Toyota Camry 2.5 V AT pada Bagian Umum Setda Kota Blitar dan dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188.4/5/KEP/410.010.2/2020
2. (Rp12.806.796.000,00) atas penghapuan tanah RSD Mardi yg dihibahkan ke Dirjen Dikti berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188.4/4/KEP/410.010.2/2020.
3. (Rp146.924.310,00) atas nilai buku bangunan TPST Kali Lahar Sngut yang telah dibongkar pada Dinas Lingkungan Hidup dan dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188.4/2/KEP/410.010.2/2020.
4. (Rp91.150.000,00) atas nilai buku hewan yang telah mati pada Dinas Lingkungan Hidup dan telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188.4/1/KEP/410.010.2/2020.
5. (Rp24.009.550,00) atas nilai buku pagar dan kolam koi di eks Kantor Kelurahan Karangtengah pada Bagian Umum Setda Kota Bitar yg telah dihibahkan kepada LP Anak karena bangunan kantornya dikembalikan kepada LP Anak dan telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188/350/HK/410.010.2/2020.
6. (Rp24.688.172,00) atas nilai buku laptop, notebook dan hardisk pada Badan Kepegawaian Daerah yang terdampak pencurian dan telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188.4/3/KEP/410.010.2/2020.
7. (Rp497.607.733,34) atas nilai buku Jl. Halmahera & Jl. Maluku yg dimusnahkan karena diganti baru pada Dinas Pekerjaan Umum dan telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188.4/6/KEP/410.010.2/2020.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(11.846.834.755,17)	(5.255.300,00)

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2020 adalah sebesar (Rp11.846.834.755,17).
Pos luar biasa tersebut dirinci sebagai berikut :

Beban Luar Biasa - Laporan Realisasi Anggaran	Rp	28.611.155.432,23
Mutasi Kurang :		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengembalian Belanja Tak Terduga TA 2020	Rp	10.575.000,00	
Kapitalisasi Belanja Tak Terduga ke Aset Tetap	Rp	3.130.769.250,00	
Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Persediaan	Rp	13.289.363.745,06	
Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2019 yang disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2020	Rp	333.612.682,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	344.187.682,00	
Mutasi Bersih		Rp	(16.764.320.677,06)
Beban Luar Biasa-LO		Rp	11.846.834.755,17

Selanjutnya informasi terkait Rincian Beban Luar Biasa disajikan pada **Lampiran 26** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

7.5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(60.317.272.772,92)	153.241.955.007,73
Surplus merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp60.317.272.772,92).		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah meliputi transaksi anggaran dan non anggaran yang memuat perbandingan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengeluaran kas, yaitu semua aliran kas yang keluar dari BUD, termasuk dana operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul serta Dana BOS di Dinas Pendidikan.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah menghasilkan kas tanpa ada bantuan sumberdaya lain.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	880.803.675.111,23	940.722.867.100,39
Arus Keluar Kas	753.246.801.972,62	727.340.398.902,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi	127.556.873.138,61	213.382.468.197,94

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp127.556.873.138,61 atau turun 40,22% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp213.382.468.197,94.

1. Arus Masuk Kas

Adalah kas masuk yang berasal dari Pendapatan APBD TA 2020 sebesar Rp880.803.675.111,23 terdiri dari arus masuk kas ke BUD dan termasuk Pendapatan yang dikelola BOSNAS, BLUD dan JKN FKTP. Pendapatan yang dikelola BLUD sebesar Rp113.435.366.040,16, FKTP JKN sebesar Rp6.146.508.600,00, dan dana BOS sebesar Rp17.307.870.000,00 sedangkan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp743.913.930.471,07 yang terdiri dari:

- a. Kas masuk ke BUD yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp37.530.670.035,90.
- b. Kas masuk ke BUD dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp6.681.655.444,00.
- c. Kas masuk ke BUD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penerimaan dividen kas atas Penyertaan Modal sebesar Rp1.041.098.840,30.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Kas masuk ke BUD, dana BLUD dari RSUD Mardi Waluyo dan dana JKN dari 3 FKTP yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp129.263.984.124,03. Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola BLUD sebesar Rp113.435.366.040,16, dana FKTP JKN sebesar Rp6.146.508.600,00 dan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp9.682.109.483,87.
- e. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp36.012.047.175,00.
- f. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp45.222.695.790,00.
- g. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum sebesar Rp400.918.516.000,00.
- h. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp77.921.304.507,00.
- i. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Dana Penyesuaian sebesar Rp56.837.217.000,00.
- j. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi hasil pajak sebesar Rp70.229.057.195,00.
- k. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp1.873.559.000,00.
- l. Kas masuk yang berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS 57 sekolah sebesar Rp17.307.870.000,00.

2. Arus Keluar Kas

Adalah kas keluar yang berasal dari belanja pegawai, barang dan jasa APBD termasuk Belanja yang dikelola BLUD, BOS dan JKN FKTP TA 2020 sebesar Rp753.246.801.972,62. Belanja yang dikelola BLUD sebesar Rp92.590.717.405,79, FKTP JKN sebesar Rp5.716.916.303,11, dana BOS sebesar Rp9.526.252.572,15. Sedangkan kas keluar dari BUD yaitu sebesar Rp543.234.668.672,34, yang terdiri dari:

- a. Kas keluar dari yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp293.925.147.874,69. Belanja pegawai yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp287.065.494.358,69, dari dana BLUD RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp6.830.345.516,00 dan dari dana BOS sebesar Rp29.308.000,00.
- b. Kas keluar dari BUD, dana BLUD RSUD Mardi Waluyo, dana JKN dari 3 FKTP dan dana BOS yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp377.654.652.692,70. Belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp276.680.419.927,65, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp85.760.371.889,79 dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp5.716.916.303,11 dan dari dana BOS sebesar Rp9.496.944.572,15.
- c. Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Hibah sebesar Rp38.493.073.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp14.015.883.398,00.
- e. Kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp546.889.575,00.
- f. Kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp28.611.155.432,23.

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	73.230.000,00	0,00
Arus Keluar Kas	114.808.593.714,45	249.885.889.913,72
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(114.735.363.714,45)	(249.885.889.913,72)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 sebesar (Rp114.735.363.714,45) atau naik 54,08% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 sebesar (Rp249.885.889.913,72).

1. Arus Kas Masuk

Adalah kas masuk ke BUD sebesar Rp73.230.000,00 atas penjualan mobil Sedan Toyota Camry 2.5 V AT.

2. Arus Kas Keluar

Adalah arus kas keluar dari BUD yang berasal dari Belanja APBD TA 2020 dan termasuk Belanja BLUD, dana BOS dan JKN dari 3 FKTP, yaitu sebesar Rp114.808.593.714,45 yang terdiri dari:

- a. Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp627.630.320,00.
- b. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.660.497.640,20. Belanja Peralatan dan Mesin yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp44.869.550.363,20, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp2.984.024.464, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp530.886.645,00 dan dana BOS sebesar Rp3.276.036.168,00.
- c. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.630.154.932,72. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp24.255.970.358,72. dan dari dana BLUD RSUD sebesar Rp4.124.146.174,00, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp132.492.400,00 dan dari dana BOS sebesar Rp117.546.000,00.
- d. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp26.271.196.590,72. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jaringan yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp26.250.096.590,72, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp10.400.000,00 dan dari dana BOS sebesar Rp10.700.000,00

- e. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.281.295.800,81. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp2.618.204.260,81 dan dari dana BOS sebesar Rp663.091.540,00.
- f. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp4.337.818.430,00. Belanja Modal Aset Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp4.144.093.430,00, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp192.225.000,00 dan dari dana BOS sebesar Rp1.500.000,00.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	21.112.715,54	62.582.722,53
Arus Keluar Kas	121.794.950,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan/Pendanaan	(100.682.234,46)	62.582.722,53

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2020 sebesar (Rp100.682.234,46) atau turun 260,88% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2019 sebesar Rp62.582.722,53.

1. Arus Kas Masuk

Adalah arus kas masuk ke BUD yang berasal penerimaan Dana Bergulir sebesar Rp21.112.715,54.

2. Arus Keluar Kas

Adalah arus kas keluar dari BUD sebesar Rp121.794.950,00 untuk pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga TA 2019 di Dinas Pendidikan atas paket pekerjaan pemeliharaan Gedung TKN (TKN Sukorejo 1, TKN Karang Sari 1, TKN Pakunden 1, TKN Tanggung 1, TKN Ngadirejo 1).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	66.735.289.722,93	76.490.784.582,85
Arus Keluar Kas	66.735.289.722,93	76.497.051.404,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(0,00)	(6.266.821,91)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2020 sebesar (Rp0,00) atau turun 100% dibandingkan dengan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 sebesar (Rp6.266.821,91). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan arus kas bersih dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2020 yang berasal dari BUD, BLUD RSUD, JKN dari 3 FKTP dan BOSNAS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Jenis PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Arus Kas Bersih
IWP 8%	10.723.036.841,00	10.723.036.841,00	0,00
IWP 1%	2.318.589.265,00	2.318.589.265,00	0,00
Taperum	185.214.000,00	185.214.000,00	0,00
Askes	9.274.581.258,00	9.274.581.258,00	0,00
JKK	295.617.354,00	295.617.354,00	0,00
JKM	886.855.312,00	886.855.312,00	0,00
PPh 21 gaji	945.144.103,00	945.144.103,00	0,00
PPh 21 BTL	8.250.890.765,00	8.250.890.765,00	0,00
PPN BL	1.591.068.089,00	1.591.068.089,00	0,00
PPh 21 BL	1.827.136.955,00	1.827.136.955,00	0,00
PPh 22 BL	1.510.575.815,00	1.510.575.815,00	0,00
PPh 23 BL	1.034.832.250,00	1.034.832.250,00	0,00
PPh Final BL	19.178.693.409,00	19.178.693.409,00	0,00
BLUD	7.694.609.256,00	7.694.609.256,00	0,00
JKN	442.907.294,93	442.907.294,93	0,00
BOSNAS	575.537.756,00	575.537.756,00	0,00
Jumlah	66.735.289.722,93	66.735.289.722,93	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)	(Rp)
Saldo Akhir Kas	187.504.347.334,43	174.768.316.930,87

Nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp187.504.347.334,43 perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 108 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019
1.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	12.720.827.189,70	(36.447.085.735,16)
2.	Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	164.626.861.717,21	191.485.363.908,07
3.	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	20.080,00	0,00
4.	Saldo Awal Kas BOSNAS	3.819.225.903,24	2.082.743.069,59
5.	Saldo Awal Kas BLUD	5.448.648.445,76	17.177.448.413,71
6.	Saldo Awal Kas JKN	768.900.139,00	365.186.629,00
7.	Saldo Akhir Kas BLUD + Bendahara Pengeluaran + BOSNAS + BLUD + JKN (1+2+3+4+5+6+7)	187.384.483.474,91	174.663.656.285,21
8.	Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	11.143.434,52	29.575.551,66
9.	Saldo Akhir Kas Bendahara Lainnya	108.720.425,00	75.085.094,00
	Saldo Akhir Kas (7+8+9)	187.504.347.334,43	174.768.316.930,87



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Saldo awal ekuitas

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Saldo awal ekuitas	2.626.637.116.873,18	2.418.486.225.592,99

Pada Tahun 2020 terdapat saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp2.626.637.116.873,18.

7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit-LO	(60.317.272.772,92)	153.241.955.007,73

Surplus/Defisit – LO Tahun 2020 Pemerintah Kota Blitar sebesar (Rp60.317.272.772,92) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Blitar Pada Tahun 2020.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh koreksi saldo awal TA 2020 sebesar (Rp850.625.278,14) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1. Piutang	(13.229.587.587,74)	6.300.826.345,00

Koreksi nilai piutang atas nilai Saldo Awal piutang 2019 sebesar (Rp13.229.587.587,74) yang terdiri dari:

1. Koreksi atas kurang catat piutang awal pajak hotel akibat piutang tercatat minus a.n Budi Manis masa Oktober Minggu I 2014 sebesar Rp5.000,00 dan masa Oktober Minggu II 2014 Rp235,00;
2. Koreksi atas kurang catat piutang awal pajak restoran-rumah makan akibat piutang tercatat minus a.n KFC masa November 2015 sebesar Rp1,00;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Koreksi atas kurang catat piutang awal pajak parkir akibat piutang tercatat minus a.n Budiman masa November 2015 sebesar Rp60.000,00;
4. Koreksi atas kurang catat saldo awal piutang restoran sebesar Rp1.396.800,00 yang terdiri dari Aa Raffi Fried Chicken Masa Desember 2019 sebesar Rp396.800,00 dan Warung Mak Nyak Masa Desember 2019 sebesar Rp1.000.000,00 pada BPKAD;
5. Koreksi atas belum tercatatnya piutang pajak catering Tahun 2019 sebesar Rp6.248.789,00 yang terdiri dari:

**Tabel 109 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Pajak Catering**

No	Nama Wajib Pajak	Masa	Tahun	Nominal
1	Wippy Catering	Juni	2019	19.091,00
2	Syam Catering	Mei	2019	306.700,00
3	Es Mini Catering	Mei	2019	222.000,00
4	Ayam Kremes Tulang Lunak	Desember	2019	1.160.000,00
5	Wippy Catering	Januari	2019	70.909,00
6	Wippy Catering	Maret	2019	70.909,00
7	Cita Rasa Catering	Desember	2019	68.182,00
8	Wippy Catering	Maret	2019	19.091,00
9	Wippy Catering	Januari	2019	19.091,00
10	Wippy Catering	Desember	2019	22.273,00
11	Wippy Catering	September	2019	87.273,00
12	Wippy Catering	Februari	2019	19.091,00
13	Wippy Catering	November	2019	87.273,00
14	Es Mini Catering	Mei	2019	26.182,00
15	Wippy Catering	April	2019	19.091,00
16	Wippy Catering	Juli	2019	70.909,00
17	Wippy Catering	Oktober	2019	22.273,00
18	Wippy Catering	Agustus	2019	19.091,00
19	Benik Kue	Juni	2019	204.600,00
20	Sari Bundo Catering	September	2019	18.200,00
21	Benik Kue	November	2019	138.200,00
22	Benik Kue	Oktober	2019	68.200,00
23	Cake &Catering Rahayu	September	2019	477.300,00
24	Benik Kue	September	2019	181.900,00
25	Cake &Catering Rahayu	November	2019	91.650,00
26	Cake &Catering Rahayu	November	2019	431.850,00
27	Cake &Catering Rahayu	November	2019	159.100,00
28	Cake &Catering Rahayu	November	2019	92.750,00
29	Ethes Catering	Desember	2019	395.455,00
30	Es Mini Catering	November	2019	90.950,00
31	Hc Sound System Dan Catering	November	2019	31.850,00
32	Lalapan Djoss	November	2019	285.500,00
33	Es Mini Catering	November	2019	427.300,00
34	Es Mini Catering	November	2019	188.200,00
35	Gemah Ripah	November	2019	30.500,00
36	Es Mini Catering	November	2019	152.200,00
37	Patria Buah	November	2019	58.200,00
38	Dewi Catering	Desember	2019	395.455,00
Jumlah				6.248.789,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Koreksi atas kurang catat saldo awal piutang pajak kos sebesar Rp1.170.000,00 pada BPKAD yang terdiri dari:

**Tabel 110 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Pajak Kos**

No	Nama Wajib Pajak	Masa	Nominal
1	Kos Ayam Tentrem	Desember 2019	150.000,00
2	Kos Kosan Jeruk	Desember 2019	120.000,00
3	Buyung Mahardika	Nopember 2019	150.000,00
4	Buyung Mahardika	Oktober 2019	150.000,00
5	Buyung Mahardika	September 2019	150.000,00
6	Buyung Mahardika	Agustus 2019	150.000,00
7	Buyung Mahardika	Juli 2019	150.000,00
8	Buyung Mahardika	Desember 2019	150.000,00
	Total		1.170.000,00

7. Koreksi atas lebih catat saldo awal piutang pajak hiburan sebesar Rp1.750.000 atas nama Karaoke Traffic Light Family Masa Oktober Tahun 2015 berdasarkan bukti setoran ke kas daerah pada tanggal 18 November 2015 pada BPKAD.
8. Koreksi atas kurang Catat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa halaman stadion sebesar Rp130.000,00 atas nama Wahyu Jatmiko masa November – Desember Tahun 2019.
9. Koreksi lebih catat Piutang Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp10.339.997.664,00 berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 pada BPKAD dengan rincian sebagai berikut:
- Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Rp278.608.669,00;
 - Piutang Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Rp9.272.303.397,00;
 - Piutang Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi Rp158.651.980,00;
 - Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Hutan Rp46.994.146,00;
 - Piutang Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi Rp4.013.524,00.
10. Koreksi atas kurang catat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD sebesar Rp2.318.724,00, yang terdiri dari :

**Tabel 111 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

No	Nama WP	Tahun	Nominal
1	Setyaningsih Setyawan	2019	162.254,00
2	Sumarsih	2017	105.316,00
3	Sumarsih	2018	105.316,00
4	Sumarsih	2019	105.316,00
5	Katemi	2018	23.980,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama WP	Tahun	Nominal
6	Katemi	2019	23.980,00
7	Wijianto	2016	148.814,00
8	Wijianto	2017	148.814,00
9	Wijianto	2018	148.814,00
10	Wijianto	2019	148.814,00
11	Sahid/Saodah	2016	209.418,00
12	Sahid/Saodah	2017	209.418,00
13	Sahid/Saodah	2018	209.418,00
14	Sahid/Saodah	2019	209.418,00
15	Nina Anikarini	2019	223.080,00
16	Yunoko	2019	136.554,00
Jumlah			2.318.724,00

11. Koreksi atas kurang catat Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan karena pada BPKAD sebesar Rp601.278,64, yang terdiri dari :

**Tabel 112 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan**

No	Nama WP	Tahun	Nominal
1	Setyaningsih Setyawan	2019	9.735,24
2	Sumarsih	2017	50.552,00
3	Sumarsih	2018	31.594,80
4	Sumarsih	2019	6.318,96
5	Katemi	2018	7.194,00
6	Katemi	2019	1.438,80
7	Wijianto	2016	71.431,00
8	Wijianto	2017	71.431,00
9	Wijianto	2018	44.644,20
10	Wijianto	2019	8.928,84
11	Sahid/Saodah	2016	100.520,64
12	Sahid/Saodah	2017	100.520,64
13	Sahid/Saodah	2018	62.825,40
14	Sahid/Saodah	2019	12.565,08
15	Nina Anikarini	2019	13.384,80
16	Yunoko	2019	8.193,24
Jumlah			601.278,64

12. Koreksi lebih catat Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD sebesar Rp188,223,38, yang terdiri dari :

**Tabel 113 Rincian Dampak Kumulatif atas Lebih Catat
Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan**

No	Nama WP	Tahun	Nominal
1	Siswo Sudjono/Sulimah	1998	0,40
2	Marilah li	1998	0,40
3	Suwarno.Sh	1998	0,08
4	Abraham Sahertian	1998	0,12



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama WP	Tahun	Nominal
5	Pujiono	1998	0,48
6	Marilah li	1999	0,40
7	Suwarno.Sh	1999	0,08
8	Sudibyo	1999	0,32
9	Marilah li	2000	0,40
10	Suwarno.Sh	2000	0,08
11	Marilah li	2001	0,40
12	Suwarno.Sh	2001	0,08
13	Misgimin	2002	0,36
14	Maryati	2002	0,12
15	Candra Halim	2003	0,36
16	Sasmito	2003	0,08
17	Misgimin	2003	0,48
18	Drs. Soebiantoro, Msi	2005	0,40
19	Maskur	2006	0,36
20	Anwar Achmad Mustamin	2010	0,20
21	Sudarto Drs	2011	0,28
22	Ingggrid Puspitasari A	2013	0,36
23	Sudibyo	2013	0,48
24	Sudibyo	2013	0,04
25	Mulyono	2014	62.233,80
26	Kasiyadi	2014	0,36
27	Pt Bakti Bumi Perdana	2014	0,48
28	Dijah Rumanti Sri S.	2014	0,40
29	Tri Supadmi Handayaningsi	2014	0,32
30	Wasitah	2014	0,40
31	Siti Kasanah	2014	0,48
32	Mujiati	2014	0,32
33	Basuki	2014	0,20
34	Anna Rosita	2014	0,20
35	Kasiyadi	2015	0,36
36	Sutaryo	2015	0,24
37	Tri Supadmi Handayaningsi	2015	0,32
38	Wasitah	2015	0,40
39	Siti Kasanah	2015	0,48
40	Imam Ghozali	2015	0,16
41	J.R. Marwi Sumiati	2015	0,48
42	Anna Rosita	2015	0,20
43	Mochamad Soleh	2016	0,48
44	Ny Joyo Pawiro Al Marinem	2016	0,08
45	Indayati	2016	0,20
46	Sutaryo	2016	0,24
47	Achmad Assegaf	2016	0,12
48	Siti Kasanah	2016	0,48
49	Arief Trisnadi Wibisono, S.E	2016	0,48
50	Misdi	2016	0,20
51	Paulus Nur Suharmoko	2016	0,04
52	Suyono .H	2016	0,12
53	Titik Wiyanti, Sh	2017	0,16
54	Wijianto	2017	0,40
55	Tukidjan	2017	0,32
56	Ali Wiyono	2017	0,12
57	Rini	2017	0,44



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama WP	Tahun	Nominal
58	Amijah	2017	0,12
59	Suharsono, Sh	2017	0,20
60	Agus Wiyono	2017	0,20
61	Perum Pjka/Lamari	2017	0,44
62	Umi Barokah	2017	0,12
63	Warsini	2017	0,12
64	Anita Erlina	2017	0,16
65	Ika Lulita	2017	0,36
66	Djemali	2017	103.112,00
67	Agus Wantono/Samini	2017	0,28
68	Amati Hulu	2017	0,36
69	Sukadi	2017	0,44
70	Paulus Nur Suharmoko	2017	0,04
71	Siti Avivah	2017	0,44
72	Sri Susilowati	2017	0,44
73	Abdul Salam	2017	0,36
74	Ny Satro	2017	0,28
75	Asli Sinu	2017	0,40
76	Anna Rosita	2017	0,20
77	Soewito Al Ramidi	2018	22.856,10
78	Siti Qomariyah	2019	0,08
Jumlah			188.223,38

13. Koreksi lebih catat Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD sebesar Rp2.919.897.528,00 karena tidak terdapat Surat Tagihan sebagai dasar pengakuan piutang.
14. Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan atas nama Cafe Jojo Tahun 2019 sebesar Rp9.500.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
15. Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga (Pemakaian GOR Sasana Krida) sebesar Rp10.845.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 114 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

No	Uraian	Nominal
1	latihan rutin tanggal 01-01-2014 s/d 29-01-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
2	latihan rutin tanggal 05-11-2014 s/d 26-11-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
3	latihan rutin tanggal 04-06-2014 s/d 25-06-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
4	latihan rutin tanggal 02-06-2014 s/d 06-06-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
5	latihan rutin tanggal 06-08-2014 s/d 27-08-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
6	latihan rutin tanggal 07-05-2014 s/d 28-05-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
7	latihan rutin tanggal 05-03-2014 s/d 26-03-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
8	latihan rutin tanggal 03-12-2014 s/d 31-12-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nominal
9	latihan rutin tanggal 05-02-2014 s/d 26-02-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
10	latihan rutin tanggal 02-04-2014 s/d 06-04-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
11	latihan rutin tanggal 01-10-2014 s/d 29-10-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
12	latihan rutin tanggal 03-09-2014 s/d 24-09-2014 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
13	latihan rutin tanggal 07-01-2015 s/d 28-01-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
14	latihan rutin tanggal 01-07-2015 s/ 29-07-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
15	latihan rutin tanggal 07-10-2015 s/d 28-10-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
16	latihan rutin tanggal 04-03-2015 s/d 25-03-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
17	latihan rutin tanggal 01-04-2015 s/d 29-04-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
18	latihan rutin tanggal 03-06-2015 s/d 24-06-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
19	latihan rutin tanggal 06-05-2015 s/d 27-05-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
20	latihan rutin tanggal 04-11-2015 s/d 25-11-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
21	latihan rutin tanggal 02-12-2015 s/d 06-12-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
22	latihan rutin tanggal 04-02-2015 s/d 25-02-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
23	tanggal 05-08-2015 s.d 26-08-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
24	latihan rutin tanggal 02-09-2015 s/d 30-09-2015 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
25	latihan rutin tanggal 06-07-2016 s/d 27-07-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
26	latihan rutin tanggal 05-10-2016 s/d 26-10-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
27	latihan rutin tanggal 03-08-2016 s/d 31-08-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
28	latihan rutin tanggal 07-09-2016 s/d 28-09-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
29	latihan rutin tanggal 06-04-2016 s/d 27-04-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
30	latihan rutin tanggal 02-03-2016 s/d 06-03-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
31	latihan rutin tanggal 07-12-2016 s/d 28-07-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
32	latihan rutin tanggal 03-02-2016 s/d 24-02-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
33	latihan rutin tanggal 06-01-2016 s/d 27-01-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
34	latihan rutin tanggal 02-11-2016 s/d 30-11-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
35	latihan rutin tanggal 01-06-2016 s/d 29-06-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
36	latihan rutin tanggal 04-05-2016 s/d 25-04-2016 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
37	latihan rutin tanggal 03-05-2017 s/d 31-05-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
38	latihan rutin tanggal 02-08-2017 s/d 30-08-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
39	latihan rutin tanggal 06-09-2017 s/d 27-09-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
40	latihan rutin tanggal 04-10-2017 s/d 25-10-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
41	latihan rutin tanggal 04-01-2017 s/d 25-01-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nominal
42	latihan rutin tanggal 07-06-2017 s/d 28-06-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
43	latihan rutin tanggal 05-04-2017 s/d 26-04-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
44	latihan rutin tanggal 06-12-2017 s/d 27-12-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
45	latihan rutin tanggal 05-07-2017 s/d 26-07-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
46	latihan rutin tanggal 01-03-2017 s.d 29-03-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
47	latihan rutin tanggal 01-02-2017 s/d 22-02-2017 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
48	latihan rutin tanggal 02-05-2018 s/d 30-05-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
49	latihan rutin tanggal 07-02-2018 s/d 28-02-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
50	latihan rutin tanggal 06-06-2018 s/d 27-06-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
51	latihan rutin tanggal 01-08-2018 s/d 29-08-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
52	latihan rutin tanggal 04-07-2018 s/d 25-07-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
53	latihan rutin tanggal 05-09-2018 s/d 26-09-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
54	latihan rutin tanggal 04-04-2018 s/d 25-04-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
55	latihan rutin tanggal 07-03-2018 s/d 28-03-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
56	latihan rutin tanggal 05-12-2018 s/d 26-12-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
57	latihan rutin tanggal 07-11-2018 s/d 28-11-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	120.000,00
58	latihan rutin tanggal 03-01-2018 s/d 31-01-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
59	latihan rutin tanggal 03-10-2018 s/d 31-10-2018 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
60	latihan rutin tanggal 01-05-2019 s/d 29-05-2019 a/n SUPRIYADI/PB NIRWARNA	150.000,00
61	latihan rutin tanggal 03-12-2019 s/d 31-12-2019 a/n SUWARI	135.000,00
62	latihan rutin tanggal 02-12-2016 s/d 30-12-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
63	latihan rutin tanggal 02-11-2016 s/d 30-11-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
64	latihan rutin tanggal 02-09-2016 s/d 01-09-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
65	latihan rutin tanggal 03-08-2016 s/d 31-08-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
66	tanggal 01-07-2016 s/d 29-07-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
67	latihan rutin tanggal 01-06-2016 s/d 29-06-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
68	latihan rutin tanggal 04-05-2016 s/d 27-05-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	240.000,00
69	latihan rutin tanggal 01-04-2016 s/d 29-04-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	270.000,00
70	latihan rutin tanggal 05-10-2016 s/d 28-10-2016 a/n BAMBANG PRIAMBODO	240.000,00
71	latihan rutin hari jumat tanggal 04-10-2019 s/d 25-10-2019 a/n AGUS SONDIK	120.000,00
72	latihan rutin hari Jumat tanggal 06-09-2019 s/d 27-09-2019 a/n AGUS SONDIK	120.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nominal
73	latihan rutin hari Jumat tanggal 01-11-2019 s/d 29-11-2019 a/n AGUS SONDIK	150.000,00
74	latihan rutin hari jumat tanggal 06-12-2019 s/d 27-12-2019 a/n AGUS SONDIK	120.000,00
Jumlah		10.845.000,00

16. Koreksi atas lebih catat Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga (Sewa GOR Sasana Praja) atas nama Mudjianto/Pb Dasa Digdaya Tahun 2019 sebesar Rp30.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2. Penyisihan Piutang	2.440.560.258,72	0,00
Koreksi atas lebih catat penyisihan piutang retribusi pemakaian daerah karena pembayaran piutang dengan kategori macet sebesar Rp381.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena penghapusan piutang denda PBB dikarenakan pengakuan piutang tidak berdasarkan Surat Tagihan sebesar Rp2.440.179.258,72 pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.		

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3. Bagian Lancar	0,00	687.690.000,00
Tuntutan Ganti Rugi		
Koreksi nilai Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi TA 2020 sebesar Rp0,00.		

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4. Penyisihan Investasi	17.836.785,46	31.916.084,91
Tak Tertagih		
Koreksi atas lebih catat penyisihan Investasi tak Tertagih atas Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp13.873.728,46 dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 3.963.057,00.		

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5. Hutang	(4.465,47)	(4.740.000,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Koreksi nilai hutang atas kurang catat nilai saldo awal hutang 2020 sebesar (Rp4.465,47) yang terdiri dari :

Koreksi nilai hutang atas lebih catat nilai saldo awal hutang beban 2020 sebesar Rp14.000,00 dari PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) BPJS Kesehatan yang terdiri dari :

- | | | |
|--|----|----------|
| a. UPT Puskesmas Sananwetan sebesar Rp7.000,00 atas lebih catat saldo awal hutang beban makanan dan minuman rapat/kegiatan dan jasa instruktur dan narasumber. | Rp | 7.000,00 |
| b. UPT Puskesmas Sukorejo sebesar Rp7.000,00 atas lebih catat saldo awal hutang beban makanan dan minuman rapat/kegiatan dan jasa instruktur dan narasumber. | Rp | 7.000,00 |

Koreksi kurang catat saldo awal utang pada Dinas Pendidikan atas penyetoran sisa transfer sebesar Rp18.465,47 pada Dinas Pendidikan	Rp	(18.465,47)
Jumlah	Rp	(4.465,47)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6. Persediaan	19.776.745,50	(241.522.364,00)

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp19.776.745,50 atas kurang cata nilai Saldo Awal Persediaan , terdiri dari

- a. DinasPerhubungan atas kurang catat saldo awal karcis sebesar Rp2.890,50.
- b. Dinas Perdagangan dan Peridustrian atas kurang catat saldo awal arcis sebesar Rp139.745,00.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atas kurang catat saldo awal karcis sebesar Rp4.762.290,00.
- d. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas kurang catat saldo awal karcis sebesar Rp9.644.500,00.
- e. UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul atas kurang catat saldo awal karcis sebesar Rp5.227.320,00.
- f. Bagian Umum atas kesalahan rekening saldo awal persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/Alat Rumah Tangga sebesar Rp205.000



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang tercatat pada Rekening alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, stop kontak/plugs/soket, kabel).

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7. Kas	400.000,00	2.140.666,03

Koreksi nilai saldo awal kas sebesar Rp400.000,00 atas kurang catat Kas di Bendahara Penerimaan di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk penerimaan pendapatan pajak setoran tanggal 23 sd 31 Desember 2019 yang disetorkan tahun 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8 Aset Lainnya	0,00	393.918.750,00

Koreksi nilai Saldo Awal Aset Lainnya 2020 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
9. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	(7.333.333,33)

Pada TA 2020, dampak kumulatif atas kurang catat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp0,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
10. Utang PFK	0,00	0,00

Pada TA 2020, dampak kumulatif atas Utang PFK sebesar Rp 0,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
11. Aset Tetap	10.010.035.077,50	(1.065.520.872,90)

Pada TA 2020, dampak kumulatif atas Aset Tetap sebesar Rp10.010.035.077,50 terdiri dari:

1. Hibah APBN tahun 2018 pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan berupa :

a. Peralatan Personal Komputer Lainnya	Rp	80.250.000,00
b. Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp	3.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c.	Genset	Rp	10.480.000,00
d.	Televisi	Rp	4.000.000,00
e.	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Rp	352.750.000,00
f.	Buku Umum	Rp	30.250.000,00
2.	Koreksi pencatatan tanah yang belum tercatat berupa :		
a.	Tanah GOR Soekarno Hatta	Rp	5.453.994.000,00
b.	Tanah SDN Sananwetan IV	Rp	5.578.846.000,00
3.	Koreksi saldo awal atas Aset tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan		
a.	Sekretariat DPRD		
-	Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/ WC (2019)		(31.509.500,00)
b.	Badan Perencanaan Pembangunan		
-	Study Kelayakan Kel. Tlumpu 2017 (2019)		(48.800.000,00)
-	Studi Kelayakan Pengembangan Pasar Dimoro (2018)		(77.275.000,00)
-	Masterplan Pasar Dimoro (2018)		(75.006.000,00)
c.	Dinas Kesehatan		
-	Biaya perencanaan pembangunan puskesmas Sukorejo (2019)		(133.144.500,00)
d.	Dinas Lingkungan Hidup		
-	Perencanaan taman PETA (2017)		(30.000.000,00)
e.	Dinas Perhubungan		
-	Biaya Perencanaan PJU TH 2018 (2019)		(31.065.000,00)
f.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
-	Penyusunan DED Geometrik di Pertigaan Jalan cemara - jalan palem (2019)		(44.600.000,00)
-	Peningkatan jalan di Pertigaan Jl. Palem dan Jl. Cemara Perencanaan. (2018)		(8.202.100,00)
-	Peningkatan jalan di Jl. Merapi Perempatan, Perencanaan (2018)		(15.800.000,00)
-	Perencanaan talud strain kali lahar kelurahan sukorejo (2018)		(17.888.000,00)
4.	Koreksi atas Aset Tetap - Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- | | |
|------------------------|------------------|
| a. Gedung dan Bangunan | (658.861.925,00) |
| b. Peralatan dan Mesin | (331.382.897,50) |

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(109.642.000,00)	(1.043.277.359,81)

Koreksi nilai penyusutan aset tetap pada tahun 2020 sebesar (Rp109.420.000,00) merupakan pencatatan dampak kumulatif akumulasi penyusutan atas hibah APBN peralatan mesin sebesar Rp109.642.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diperoleh pada tahun 2018

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
14. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	1.866.407.043,68

Koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan kurang catat amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
16. Investasi Permanen	(92,11)	1.039.328.064,27

Pada TA 2020, dampak komulatif Investasi Permanen sebesar (Rp92,11) atas Investasi Permanen pada PT. Bank Jatim.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
17. Investasi Non Permanen	0,00	517,24

Koreksi atas kurang catat Investasi Dana Bergulir sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
18. Akumulasi Penyusutan	(0,00)	(19.000.910.131,57)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Lainnya

Koreksi nilai penyusutan aset tetap pada Tahun 2020 sebesar (Rp0,00) merupakan koreksi penghapusan aset lain-lain Tahun 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
19. Perubahan Kodifikasi BMD	0,00	(120.303.149,66)

Koreksi atas aset yang telah terdampak perubahan kodifikasi BMD berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp0,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
20. Dampak Kumulatif kurang/lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Perubahan Masa Manfaat	0,00	(3.929.399.982,40)

Koreksi tambah dan kurang nilai penyusutan aset tetap pada Tahun 2020 sebesar (Rp0,00) akibat kurang dan lebih catat atas perubahan masa manfaat penyusutan Aset Lainnya pada tahun 2019 yang terdampak perubahan kodifikasi BMD berdasarkan Permendagri 108 tahun 2016 .

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada akhir periode pelaporan. Saldo Ekuitas akhir berasal dari:

Tabel 115 Perhitungan Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)	
Ekuitas Awal	2.626.637.116.873,18
Surplus Laporan Operasional	(60.317.272.772,92)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(850.625.278,14)
Ekuitas Akhir	2.565.469.218.822,12



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.7 Informasi Penting Lainnya Yang Diperlukan

Dalam BAB ini akan disampaikan informasi-informasi yang perlu untuk diketahui oleh pemakai terkait dengan laporan keuangan. Informasi-informasi dimaksud sebagai berikut:

7.5.7.1 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Pemerintah Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam Tahun Anggaran 2020 Kota Blitar tidak mendapat Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

7.5.7.2 Penerimaan Kas yang Tidak Diterima Melalui Kas Umum Daerah

Penerimaan Kas yang tidak diterima melalui RKUD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah di RSD Mardi Waluyo, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 3 UPT Puskesmas.

7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan kemajuan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan tahun anggaran berjalan. Berikut ini pengungkapan informasi penyelesaian kerugian daerah pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) dibentuk Nomor 188/888/HK/410.010.2/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang kemudian dirubah dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/148/HK/410.010.2/2016 tanggal 7 Maret 2016 selanjutnya dirubah dengan SK Walikota Nomor 188/164/HK/410.010.2/2017 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Blitar kemudian dirubah lagi dengan SK Walikota



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Blitar Nomor 188/232/HK/410.010.2/2019 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah tahun

2019 dan terakhir dengan SK Walikota Nomor 188/186/HK/410.010.2/2020 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Tahun 2020 tanggal 30 April 2020. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan pedoman teknis pelaksanaan TP-TGR melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Posisi kerugian daerah pada Pemerintah Kota Blitar sebanyak 410 kasus sebesar Rp7.209.460.025,78 terdiri dari:

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 100 kasus sebesar Rp3.523.181.869,04. Dari 100 kasus tersebut telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebanyak 42 kasus sebesar Rp501.748.164,00, pembayaran secara angsuran yang telah dilunasi sebanyak 37 kasus sebesar Rp1.651.589.131,04 dan pembayaran secara angsuran yang belum lunas sebanyak 21 kasus sebesar Rp546.668.34,00 sehingga kasus yang belum selesai sebesar Rp823.176.250,00 (Rp3.523.181.869,04 – Rp501.748.164,00 – Rp1.662.613.705,04 – Rp535.643.750,00).
- b. Tidak terdapat kasus kerugian yang sedang dalam proses pembebanan, baik yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lainnya, dan Pihak Ketiga.
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebanyak 310 kasus sebesar Rp3.686.278.156,74. Dari 310 kasus tersebut, telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebanyak 233 kasus sebesar Rp2.647.874.962,82, pembayaran angsuran sebanyak 77 kasus sebesar Rp1.038.43.93,92 sehingga sisa kasus yang belum selesai sebesar Rp0,00 (Rp3.686.278.156,74 – Rp1.038.403.193,92 – Rp2.647.874.962,82).

Tim MP TPTGR telah mengusulkan pembebasan dan penghapusan kerugian daerah sebanyak tiga kasus kerugian daerah yang telah diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM Tuntutan ganti Rugi dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp225.116.229,00, atas usulan tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. H.M.Suwito Kurnia Wijaya telah didukung SKTJM sebesar Rp37.000.000,00 dan telah diangsur sebesar Rp12.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp25.000.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2005. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapus dengan diterbitkannya SK Walikota blitar Nomor



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

188/732/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. H.M.

Suwito Kurnia Wijaya sebesar Rp25.000.000,00. Namun sisa kerugian daerah atas nama Drs.H.M.Suwito Kurnia Wijaya yang telah dihapuskan tersebut, ditindaklanjuti kembali oleh Ahli Waris dengan menyeter ke kas daerah sebesar Rp25.000.000,00.

- 2) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Heru Juswadi, yang terjadi pada tahun 2007 telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp3.016.229,00 dan belum terdapat angsuran. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dibebaskan dengan terbitnya SK Walikota Blitar Nomor 188/46/410.010.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pembebasan Kerugian Daerah a.n. Sdr. Drs. Heru Juswadi. Namun, sisa kerugian daerah atas nama Drs.Heru Juswadi yang telah dibebaskan tersebut, ditindaklanjuti kembali dengan menyeter ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.016.229,00.
- 3) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Agus Sularso telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp207.615.500,00 dan telah diangsur sebesar Rp10.515.500,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp197.100.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapuskan dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/731/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. Agus Sularso sebesar Rp197.100.000,00.

Penghapusan kewajiban penggantian kerugian daerah a.n. Drs. Agus Sularso (Alm) telah mendapatkan pertimbangan dari Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR pada tanggal 26 Juni 2013 mengenai ketidakmampuan Sdr. Drs. Agus Sularso dalam menyelesaikan ganti kerugian daerah dan persetujuan DPRD Kota Blitar sesuai surat persetujuan tanggal 11 September 2013. Akan tetapi karena SK Walikota Blitar Nomor 188/731/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. Agus Sularso sebesar Rp197.100.000,00 belum dilengkapi dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri maka penghapusan belum sah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada pasal 20 ayat (3).

7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi

1. Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim nomor rekening 0101028020 dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp44.804,71 yang merupakan saldo minimal pada buku tabungan yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

2. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 11 (sebelas) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank Jawa Timur dan 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim dengan posisi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 116 Rekening Penampungan Dana Bergulir
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Saldo per 31-Des-19	Pendapatan Bunga	Penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun 2019 pokok dan bunga dana bergulir ke kas daerah	Setoran minimal Saldo	Penyetoran Bunga Tabungan ke RKUD sebagai penerimaan jasa giro kas daerah	Biaya Pajak dan Administrasi	Saldo per 31-Des-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4-5+6-7-8)
1	0142167484 - Dalir UKM	276.496,14	2.580,05	0,00	200.000,00	14.026,37	96.516,01	368.533,81
2	0141038773 - Dalir UKM	255.561,31	899,43	0,00	200.000,00	6.472,39	96.179,88	353.808,47
3	0142186217 - Dalir UKM	1.317.577,97	4.304,75	1.000.000,00	200.000,00	55.350,99	96.860,95	369.670,78
4	0141036520 - Dalir UKM	317.533,62	2.949,17	0,00	200.000,00	4.736,14	96.589,83	419.156,82
5	0142136325 - Dalir UKM	344.797,64	3.597,23	0,00	200.000,00	5.175,16	96.719,44	446.500,27
6	0142136341 - Dalir UKM	299.022,72	3.000,43	0,00	200.000,00	4.374,88	96.600,08	401.048,19
7	0142172470 - Dalir UKM	299.503,34	2.165,34	0,00	200.000,00	4.379,17	96.433,05	400.856,46
8	0143003728 - Dalir UKM	305.947,27	73,16	0,00	200.000,00	4.309,09	90.014,63	411.696,71
9	0142132711 - Dalir UKM	299.503,34	2.165,34	0,00	200.000,00	4.379,17	96.433,05	400.856,46
10	0142136333 - Dalir Koperasi	299.503,34	2.165,34	0,00	200.000,00	4.379,17	96.433,05	400.856,46
11	10111000729 - Dalir UKM	834.657,40	14.843,28	500.000,00	200.000,00	33.380,13	0,00	516.120,55



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

12	0141030671- Giro - Dalir Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.850.104,09	38.743,52	1.500.000,00	2.200.000,00	140.962,66	958.779,97	4.489.104,98

Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp4.489.104,98 yang terdiri dari:

- Rp38.743,52 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi dan UM tahun 2020 yang belum disetorkan yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- Rp4.450.361,46 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

7.5.7.5 Pelaksanaan Pendataan Barang Milik Daerah Tahun 2019 dan 2020

Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Pendataan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor: 78.B/LHP/XVIII/SBY/05/2019 tanggal 28 Mei 2019. Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2019 telah melakukan pendataan aset jenis peralatan mesin dan aset tidak berwujud dengan dibantu oleh tenaga surveyor yang dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2019. Pihak ketiga yang melaksanakan yaitu CV. SYNERGY dengan nomor kontrak 027/07.98/410.206.6/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Berdasarkan hasil pendataan barang milik daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan dibantu tenaga surveyor, masing-masing OPD/unit kerja sampai dengan akhir tahun 2019 diinstruksikan untuk melaksanakan tindak lanjut dengan menelusuri kembali aset-aset yang belum dinyatakan *clear* oleh surveyor. Namun pada akhir tahun 2019 belum semua OPD/unit kerja melaporkan hasil penelusuran kembali tersebut.

Dari sejumlah OPD/unit kerja yang telah mengirimkan hasil penelusuran kembalinya, Pemerintah Kota Blitar menindaklanjuti dengan melakukan validasi atas hasil penelusuran kembali tersebut yang dilakukan pada awal tahun 2020. Kegiatan validasi ini dilakukan oleh Tim Validasi yang terdiri dari unsur pengelola barang dan APIP Kota Blitar. Untuk tahap I, validasi dilakukan terhadap 43 OPD/unit kerja yang telah menyampaikan hasil penelusuran kembalinya. Kegiatan validasi ini masih akan terus berlangsung dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan OPD/unit kerja yang menyampaikan hasil penelusurannya. Pada bulan Maret 2020 kegiatan validasi ini untuk sementara dihentikan karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua OPD membatasi kontak fisik dan koordinasi langsung dengan tatap muka dengan OPD lain (*physical & social distancing*). Kegiatan validasi akan dilanjutkan jika situasi dan kondisi sudah memungkinkan.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Blitar melakukan pendataan aset jenis Gedung dan Bangunan dengan dibantu oleh tenaga surveyor yang dilakukan pada bulan Oktober - Desember 2020. Pihak ketiga yang melaksanakan yaitu CV.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SYNERGY dengan nomor kontrak 027/1025/410.206.6/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan fokus pendataan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan beserta sekolah-sekolah yang berada di bawahnya. Untuk rekomendasi/saran pada Pendataan Gedung dan Bangunan, BPKAD Kota Blitar belum dapat menindaklanjuti dikarenakan masih dalam proses meneliti dan membandingkan antara hasil penyusutan yang dihitung/diterapkan di aplikasi *New-Simbada* dengan hasil penyusutan yang dihitung dengan program *microsoft excell* sesuai hasil perhitungan penyusutan LKD 2019 *Audited*.

7.5.7.6 Pandemi COVID-19

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak dan percepatan penanganan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Informasi umum dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesehatan, perekonomian dan kebijakan keuangan

1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesehatan

Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 31 Desember 2020 adalah 667, terdiri dari kasus sembuh sebanyak 575 atau 86,20% dan kasus meninggal sebanyak 36 atau 5,40%, dengan Cluster (penyebab) sebagai berikut :

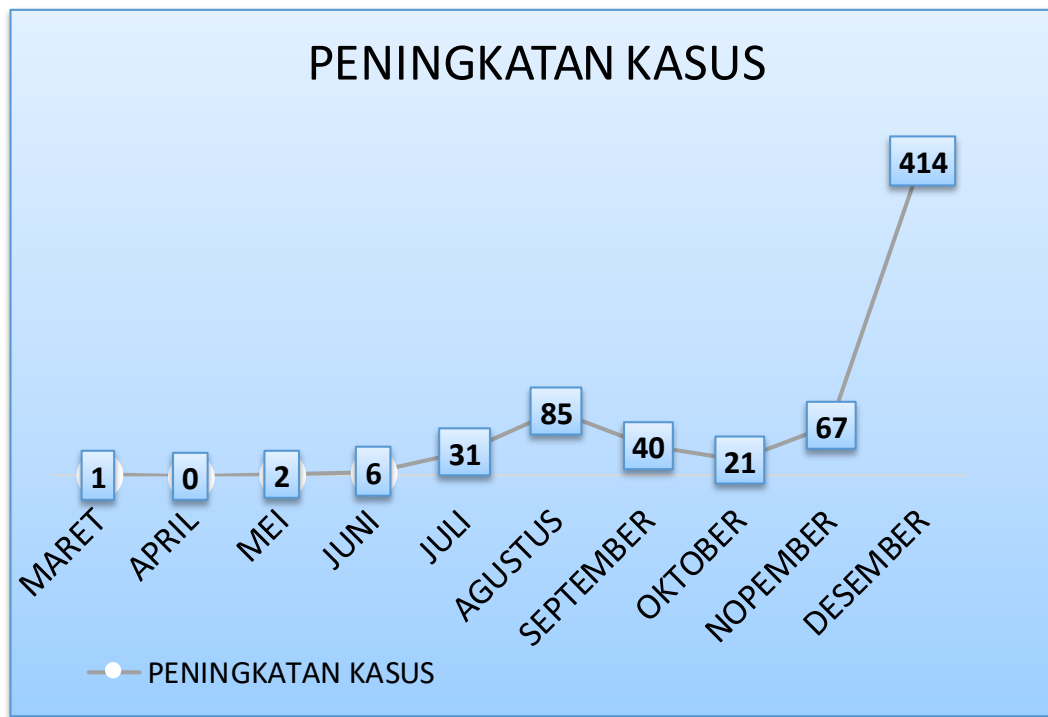
Tabel 117
Cluster (penyebab) Kasus Terkonfirmasi

NO	CLUSTER	JUMLAH
1.	Pelatihan Haji Sukolilo	1
2.	Ponpes Temboro	1
3.	Dokter RS Swasta Kab. Blitar 1	1
4.	Nakes RSD Rujukan Kab. Blitar	11
5.	Praktek Dokter	18
6.	Perkantoran Kab. Blitar	13
7.	Perjalanan	14
8.	Batalyon 511	9
9.	Ponpes Ponorogo	1
10.	Tidak Diketahui	5



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 9
Perkembangan Kasus Konfirmasi Tiap Bulan



2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian
Pandemi Covid-19 yang mengharuskan melakukan ` *physical & social distancing* berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 118 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
2019	5,84	7,13	4,64
2020	-2,28	7,78	6,68

3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kebijakan keuangan
Kebijakan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota akibat terdampak Pandemi Covid-19 adalah melaksanakan *Refocussing* dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pemenuhan Pendanaan Penanganan Covid-19 dengan cara:
- Realokasi dan *Refocussing* Anggaran Kegiatan (DBHCHT, DAK, DID, BLUD & Keg.PPMK)
 - Realokasi dan *Refocussing* Anggaran Kegiatan Yang Masih Dapat Ditunda / Tidak Dapat Dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah

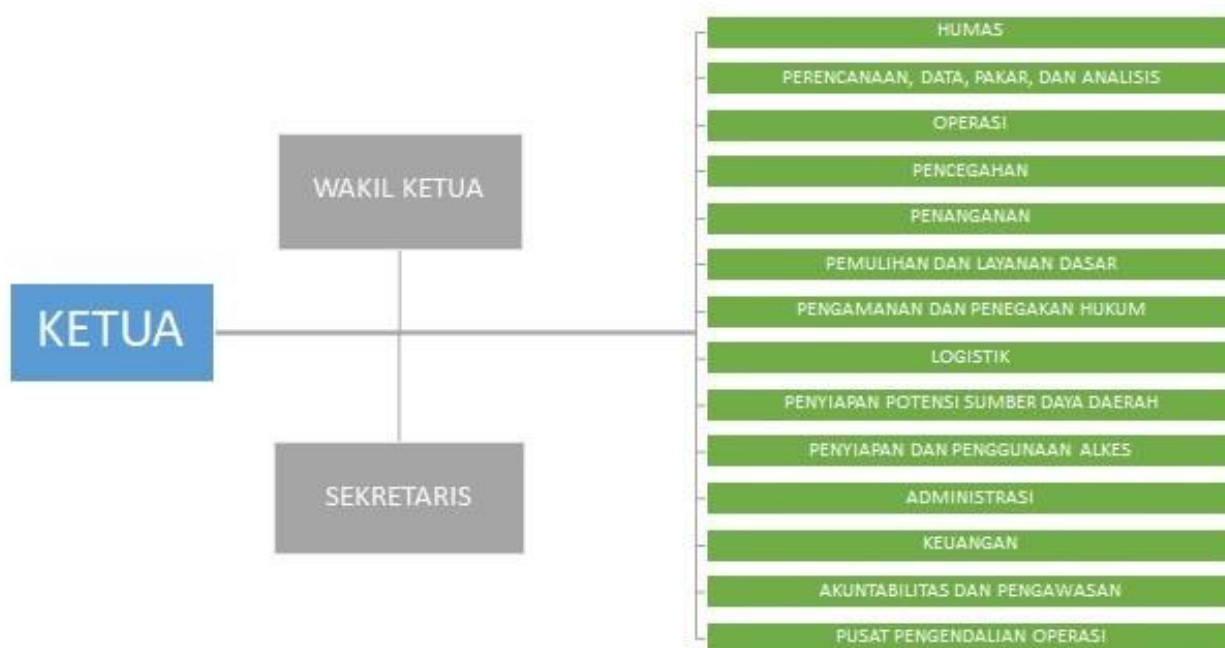


PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Pembebanan Pada Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bansos Tidak Direncanakan Yang Telah Tersedia di APBD TA 2020
 - Penjadwalan Ulang Capaian Program/ Kegiatan Dialihkan Ke BTT Dan Bantuan Sosial Tidak Terencana
 - b. Penyesuaian Kebijakan Pemotongan Dana-dana Transfer dan Potensi PAD Tidak Tercapai, dengan cara:
 - Pemotongan belanja langsung secara progresif meliputi : belanja modal yang kurang prioritas, belanja perjalanan dinas, belanja makan-minum, belanja ATK/cetak/ penggandaan, belanja pelaksanaan kegiatan rapat/ sosialisasi/diklat/bimtek dan lain-lain
 - Pemotongan Belanja Tidak Langsung : penghitungan ulang kebutuhan gaji, pemotongan belanja hibah
 - b. Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19
- Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19, antara lain:
1. Menyusun Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Walikota Blitar dan Keputusan Walikota Blitar dalam masa Pandemi Covid-19 yang disajikan dalam **Lampiran 27** yang merupakan bagian yang tidak sterpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
 2. Menyusun Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Gambar 11
Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19



(Keputusan Walikota Blitar No. 188/152/HK/410.010.2/2020)



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Langkah percepatan penanganan Covid-19 di Kota Blitar, sebagai berikut:

- SK Status Keadaan Darurat Covid-19
- Pembentukan Gugus Tugas Covid-19
- Penyusunan Renaksi Percepatan Penanganan Covid-19
- Edaran Walikota terkait Covid-19
- Edaran Walikota terkait Penutupan Tempat Wisata dan Tempat Hiburan
- Edaran Dinas Pendidikan terkait pembelajaran siswa di rumah
- Edaran MUI, BAMAG, Gereja mengenai peribadatan di rumah
- Edaran pengaturan jam kerja ASN
- Edaran tentang Peningkatan Kewaspadaan
- Edaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Edaran tentang Perjalanan Dinas ASN
- Pengamanan Pembatasan Penyebaran Covid-19
- Perwali tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat
- Perwali tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman di masa Pandemi Covid-19
- Keputusan Walikota Pembentukan Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan

3. Menyusun Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Gambar 12
Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid 19
(Keputusan Walikota Blitar No. 188/343/HK/410.010.2/2020)



4. Melaksanakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengamanan sosial dan penguatan ekonomi Fokus Penggunaan APBD dalam penanganan Pandemi Covid-19, dengan rincian berikut :



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 119 Anggaran Dana Penanganan Covid-19 TA 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Penanganan Bidang Kesehatan	
	Pengadaan bahan kesehatan, obat dan multivitamin	RS Mardi Waluyo, Dinas Kesehatan dan OPD lainnya
	Pengadaan alat kesehatan di RS Rujukan	RS Mardi Waluyo
	Kegiatan promosi dan sosialisasi pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	Bakesbangpol dan PBD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Dinas PUPR
	Kegiatan operasi penanganan kasus (tracing, testing, treatment)	Dinas Kesehatan
	Fasilitasi pelaksanaan pembatasan sosial dan operasi yustisi bersama instansi terkait	Pores Blitar Kota, Kodim 0808, Satpol PP, Pengadilan Negeri, Kejari
	Penyediaan jasa relawan dan jasa pemakaman	Bakesbangpol dan PBD
	Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan	RS Mardi Waluyo dan Dinas Kesehatan
	Penyediaan sarana prasarana dan biaya operasional rumah isolasi (rumah karantina)	Bakesbangpol dan PBD dan Dinas Kesehatan
	Pengadaan sarana komunikasi integrated system center untuk koordinasi daring pemerintah daerah	Diskominfotik
	Perubahan pola perilaku aman covid-19	Pores Blitar Kota, Kodim 0808, Satpol PP
	Penanganan Dampak Ekonomi	
	- Pelaksanaan program padat karya tunai melalui kegiatan DAU Tambahan Kelurahan	Kecamatan, Kelurahan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.	- Pemberian bantuan tunai produktif untuk pelaku usaha informal	
	Jaring Pengaman Sosial	
	- Pengadaan sembako untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak resiko sosial covid-19	Dinas Koperasi UM, Dinsos, Pertanian, DLH, Disparbud, Bag. Tapem Setda Kota Blitar
3.	- Pengadaan bantuan makanan bagi masyarakat terdampak covid	
	- Pengadaan sembako dan bahan kebutuhan lainnya untuk warga rentan sosial	

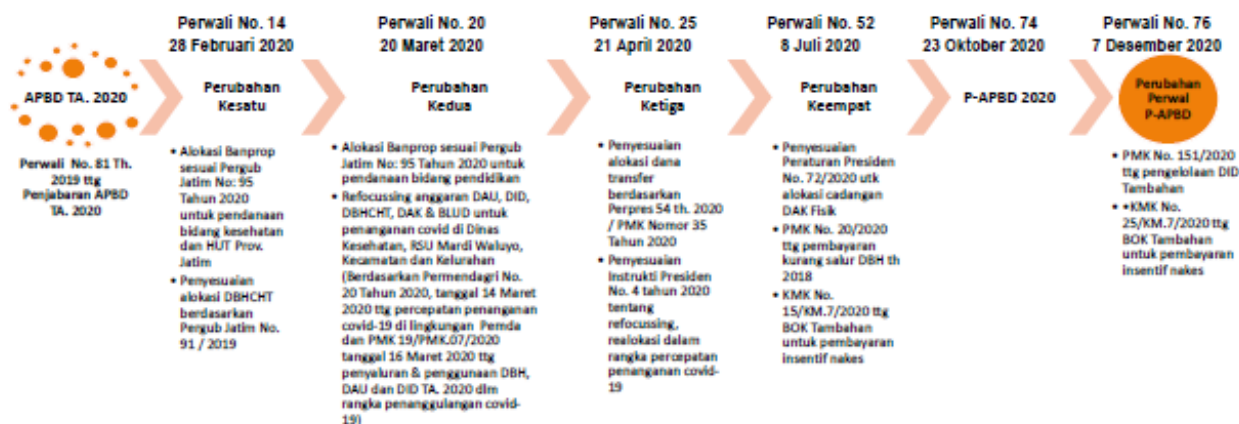
5. Melaksanakan Kebijakan Penanganan Covid-19 secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 13 Kebijakan Penanganan Covid-19



c. **Refocussing anggaran dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi**

Dasar hukum Pemerintah Kota Blitar melaksanakan *Refocussing* anggaran dan realokasi anggaran pada masa Pandemi Covid-19, terdiri dari:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ttg Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 ttg Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan /atau stabilitas sistem keuangan
2. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 ttg Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.07/2020 ttg Penyaluran & Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan covid-19
4. Permendagri 20 Tahun 2020 ttg Percepatan penanganan covid-19 di lingkungan pemerintah daerah
5. Permendagri 39 Tahun 2020 ttg Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD
6. SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ (No. 177/KMK.07/2020) ttg Percepatan penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanganan covid-19
7. Keputusan Walikota Blitar No. 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 di Kota Blitar

Tindak Lanjut berupa Perubahan Perkada Penjabaran APBD TA 2020, terdiri dari:

1. Peraturan Walikota Blitar No. 20 Tahun 2020 ttg Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD TA 2020; tanggal 20 Maret 2020



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Peraturan Walikota Blitar No. 25 Tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD TA 2020; tanggal 21 April 2020
3. Peraturan Walikota Blitar No. 52 Tahun 2020 ttg Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD TA 2020; tanggal 8 Juli 2020
4. Peraturan Walikota Blitar No. 76 Tahun 2020 ttg Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; tanggal 7 Desember 2020

Strategi Pendanaan, yaitu:

1. Melalui alokasi belanja langsung pada program/kegiatan di OPD terkait
2. Penyediaan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bansos Tidak Terencana secara memadai

Pemerintah Kota Blitar dalam APBD/P-APBD TA 2020 telah melaksanakan *refocussing* dan realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Anggaran Dana Penanganan Covid-19 TA 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	BELANJA	BANSOS	PROGRAM/	TOTAL
	TAK TERDUGA	TAK TERENCANA	KEGIATAN	
	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
PENANGANAN BIDANG KESEHATAN	34.756.154.777,00	-	20.374.764.696,00	55.130.919.473,00
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	8.712.500.000,00	-	3.387.225.250,00	12.099.725.250,00
JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)	-	11.631.600.000,00	290.765.850,00	11.922.365.850,00
TOTAL	43.468.654.777,00	11.631.600.000,00	24.052.755.796,00	79.153.010.573,00

Sedangkan realisasi dari dana penanganan Covid-19 TA 2020 dapat dilihat dibawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Realisasi Dana Penanganan Covid-19 TA 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	TOTAL	
	ANGGARAN	REALISASI



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENANGANAN BIDANG KESEHATAN	55.130.919.473,00	44.767.410.539,18
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	12.099.725.250,00	4.416.855.257,20
JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)	11.922.365.850,00	10.864.007.050,00
TOTAL	79.153.010.573,00	60.048.272.846,38

Realisasi dana penanganan Covid-19 TA 2020 berdasarkan sumber dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122
Realisasi Dana Penanganan Covid-19 per sumber dana
TA 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD PELAKSANA
BELANJA TIDAK TERDUGA:			
PENANGANAN BIDANG KESEHATAN	34.756.154.777	26.994.418.350	12 SKPD, KODIM 008, POLRESTA DAN YONIF 511
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	8.712.500.000	1.167.196.000	
JUMLAH	43.468.654.777	28.161.614.350	
BANSOS TAK TERENCANA:			
JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)	11.631.600.000,00	10.578.965.200,00	7 SKPD
JUMLAH	11.631.600.000,00	10.578.965.200,00	
PROGRAM/KEGIATAN:			
PENANGANAN BIDANG KESEHATAN	20.374.764.696	17.772.992.189	28 SKPD, 21 KEL dan 1 KEC
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	3.387.225.250	3.249.659.257	
JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)	290.765.850	285.041.850	DINAS SOSIAL
JUMLAH	24.052.755.796	21.307.693.296	
TOTAL	79.153.010.573,00	60.048.272.846,38	



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya informasi terkait Laporan Realisasi Dana Penanganan Covid-19 TA 2020 berdasarkan sumber dana, skpd pelaksana, penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi disajikan pada **Lampiran 28** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

d. Penjelasan atas penurunan penerimaan sebagai dampak perubahan kondisi makro ekonomi

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/156/HK/410.010.2/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 di Kota Blitar, berakibat pada pembatasan aktivitas sosial yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Blitar memberikan pembebasan atau keringanan dalam pembayaran Pendapatan Daerah sebagai upaya mendukung Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi wabah Covid-19, yaitu:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Tagihan atas Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 di Kota Blitar;
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penutupan Sementara Kegiatan dan Penghapusan Denda Keterlambatan atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Masa Darurat Nasional Bencana Non Alam Covid-19;
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Pengenaan Denda Administrasi atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Melewati Batas Waktu;
4. Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 973/1527/410.206.1/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberian insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19; dan
5. Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 118/125.a/410.115/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pembebasan Pembayaran Retribusi.

Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan efek penurunan pada perekonomian. Kondisi kahar yang disebabkan oleh masalah kesehatan berakibat pada pembatasan aktivitas sosial sehingga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang menurun cukup signifikan ini memiliki efek pada penurunan penerimaan daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp880.876.905.111,23 tercatat mengalami pertumbuhan minus 6,36% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp940.722.867.100,39. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 123



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Kenaikan / Penurunan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	PENDAPATAN	940.722.867.100,39	880.876.905.111,23	(6,36)
01.01	Pendapatan Asli Daerah	166.140.178.781,39	174.590.638.444,23	5,09
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	44.650.054.610,03	37.530.670.035,90	(15,94)
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.138.463.905,50	6.681.655.444,00	(34,10)
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.169.069.219,24	1.041.098.840,30	(10,95)
01.01.04	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110.182.591.046,62	129.337.214.124,03	17,38
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	757.519.568.319,00	688.978.396.667,00	(9,05)
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	617.074.500.118,00	560.074.563.472,00	(9,24)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	38.722.150.634,00	36.012.047.175,00	(7,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	55.197.441.211,00	45.222.695.790,00	(18,07)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	437.776.459.000,00	400.918.516.000,00	(8,42)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	85.378.449.273,00	77.921.304.507,00	(8,73)
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	51.430.800.000,00	56.837.217.000,00	10,51
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	51.430.800.000,00	56.837.217.000,00	10,51
01.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	89.014.268.201,00	72.066.616.195,00	(19,04)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.140.709.201,00	70.229.057.195,00	(19,41)
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.873.559.000,00	1.837.559.000,00	(1,92)
01.03	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.063.503.000,00	17.307.870.000,00	1,43
01.03.01	Pendapatan Hibah	17.063.120.000,00	17.307.870.000,00	1,43
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
	Jumlah Pendapatan	940.722.867.100,39	880.876.905.111,23	(6,36)

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya Pemerintah Pusat dalam merevisi target penerimaan pajak dan PNBPN yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah juga telah merevisi target Pendapatan Daerah dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap postur APBD Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dengan target Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 124
Kenaikan / Penurunan Target Pendapatan Daerah
Murni dan Perubahan Tahun 2020

Kode SKPD	Nama SKPD	Pendapatan Murni 2020	Pendapatan P-APBD 2020	Bertambah / Berkurang
1.01.01	Dinas Pendidikan	87.300.000,00	17.500.000,00	(69.800.000,00)
1.02.01	Dinas Kesehatan	2.354.194.334,00	1.184.082.136,00	(1.170.112.198,00)
1.02.0101	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1.872.000.000,00	1.947.484.800,00	75.484.800,00
1.02.0102	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	1.732.536.000,00	1.849.392.000,00	116.856.000,00
1.02.0103	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	1.800.000.000,00	2.138.400.000,00	338.400.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	115.777.700.000,00	87.500.001.010,00	(28.277.698.990,00)
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.000.000,00	424.780.000,00	(190.220.000,00)
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat	480.438.000,00	329.000.000,00	(151.438.000,00)
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	245.031.550,00	319.800.000,00	74.768.450,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kode SKPD	Nama SKPD	Pendapatan Murni 2020	Pendapatan P-APBD 2020	Bertambah / Berkurang
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	203.400.000,00	130.100.000,00	(73.300.000,00)
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.250.000,00	88.713.000,00	(41.537.000,00)
2.09.01	Dinas Perhubungan	2.455.435.000,00	1.702.202.800,00	(753.232.200,00)
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	25.340.661,00	(25.340.661,00)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	43.000.000,00	32.000.000,00	(11.000.000,00)
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	417.470.000,00	272.460.000,00	(145.010.000,00)
3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.119.884.000,00	544.494.750,00	(1.575.389.250,00)
3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.066.605.000,00	1.448.036.350,00	(618.568.650,00)
4.01.0204	Bagian Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.0501	Kecamatan Kepanjenkidul	295.108.191,00	285.725.739,00	(9.382.452,00)
4.01.0502	Kecamatan Sukorejo	403.574.810,00	410.191.215,00	6.616.405,00
4.01.0503	Kecamatan Sananwetan	320.571.589,00	292.663.440,00	(27.908.149,00)
4.04.01	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	787.038.978.721,00	718.537.819.064,78	(68.501.159.656,22)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kode SKPD	Nama SKPD	Pendapatan Murni 2020	Pendapatan P-APBD 2020	Bertambah / Berkurang
Jumlah Total		920.525.477.195,00	819.532.186.965,78	(100.993.290.229,22)

e. Perubahan anggaran karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan perubahan anggaran karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 sebanyak 4 (empat) kali sebelum P-APBD TA 2020 ditunjukkan dengan terbitnya Perubahan Perwali Keempat Tentang Penjabaran APBD TA 2020 dan 1 (satu) kali setelah P-APBD TA 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. APBD TA. 2020-Perwali No. 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
2. Perubahan Kesatu- Perwali No. 14 Tahun 2020, Tgl 28 Februari 2020
 - a. Alokasi Banprop sesuai Pergub Jatim No: 95 Tahun 2020 untuk pendanaan bidang kesehatan dan HUT Propinsi Jatim
 - b. Penyesuaian alokasi DBHCHT berdasarkan Pergub Jatim No. 91 / 2019
3. Perubahan Kedua- Perwali No. 20 Tahun 2020, Tgl 20 Maret 2020
 - a. Alokasi Banprop sesuai Pergub Jatim No: 95 Tahun 2020 untuk pendanaan bidang pendidikan
 - b. *Refocussing* anggaran DAU, DID, DBHCHT, DAK & BLUD untuk penanganan covid di Dinas Kesehatan, RSUD Mardi Waluyo, Kecamatan dan Kelurahan (Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2020, tanggal 14 Maret 2020 ttg percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda dan PMK 19/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 ttg penyaluran & penggunaan DBH, DAU dan DID TA. 2020 dlm rangka penanggulangan covid-19)
4. Perubahan Ketiga- Perwali No. 25 Tahun 2020, Tgl 21 April 2020
 - a. Penyesuaian alokasi dana transfer berdasarkan Perpres 54 th. 2020 / PMK Nomor 35 Tahun 2020
 - b. Penyesuaian Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang *refocussing*, realokasi dalam rangka percepatan penanganan covid-19
5. Perubahan Keempat-Perwali No. 52 Tahun 2020, Tgl 8 Juli 2020
 - a. Penyesuaian Peraturan Presiden No. 72/2020 utk alokasi cadangan DAK Fisik
 - b. PMK No. 20/2020 ttg pembayaran kurang salur DBH TA 2018
 - c. KMK No. 15/KM.7/2020 ttg BOK Tambahan untuk pembayaran insentif nakes
6. P-APBD 2020-Perwali No. 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
7. Perubahan Perwal P-APBD 2020-Perwali No. 76 Tahun 2020, Tgl 7 Desember 2020
 - a. PMK No. 151/2020 ttg pengelolaan DID Tambahan
 - b. KMK No. 25/KM.7/2020 ttg BOK Tambahan untuk pembayaran insentif nakes



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.8. PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Sal periode per 31 Desember 2020 . Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Keuangan Negara dan Daerah. Semoga Laporan Keuangan dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada para pengguna laporan dan *stakeholder*.


WALIKOTA BLITAR

SANTOSO